

Buletin Ilmiah

Marina

Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan
Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

marina	Vol. 2	No. 2	Hal: 45 - 102	Jakarta, Juni 2016	ISSN: 2502-0803
--------	--------	-------	---------------	--------------------	-----------------

Buletin Ilmiah "MARINA"
Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
VOLUME 2 NO. 2 DESEMBER 2016

Marina Buletin Ilmiah Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan adalah Buletin Ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, dengan tujuan menyebarkan hasil karya tulis ilmiah di bidang Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan.

Penerbit:

Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
(BALITBANG-KP)
bekerjasama dengan
Indonesian Marine and Fisheries Socio-Economics Research Network
(IMFISERN)

Penanggung Jawab:

Kepala Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Dewan Redaksi :

Ketua:

Dr. Tajerin (*Perencanaan dan Kebijakan Ekonomi Publik*)

Anggota:

Dr. Siti Hajar Suryawati (*Pengelola Sumber Daya Lingkungan*)
Dr. Achmad Rizal (*Kebijakan Lingkungan*)
Ary Wahyono, M.Si (*Studi dan Kemasyarakatan*)
Imam Syafii, M. Si (*Sejarah Maritim*)

Redaksi Pelaksana :

Catur Pramono Adi, M. Si
Andrian Ramadhan, S. Pi, MT
Rizki Muhartono, M. Si
Nila Mustikawati, S. Si
Asep Jajang Setiadi, S. Pi
Ilham Febriansyah, S. Kom

Mitra Bestari

Prof. Dr. Heny Warsilah (*Planologi - LIPI*)
Dr. Jardie Androkles Andaki, S. Pi, M. Si (*Universitas Sam Ratulangi*)
Dr. Venda Jolanda Pical (*Universitas Pattimura*)
Ir. Masyhuri Imron, MA (*Sosiologi-LIPI*)
Ir. Eni Yulinda, M. Si (*Universitas Riau*)

Alamat Redaksi:

Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Gedung Balitbang KP Lt. 3 - Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara
Telp. (021) 6471 1583, Faks. (021) 64700924
Jurnal Online: <http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/mra>
Email: pt.sosek@gmail.com

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, kami panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas terbitnya Marina Buletin Ilmiah Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Volume 2 Nomor 2 Tahun 2016 ini. Buletin ini merupakan perubahan dari penerbitan Warta Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan yang sebelumnya telah dipublikasikan mulai dari Vol. 1 tahun 2006 sampai Vol. 9 tahun 2014. Perbaikan ini ditujukan dengan alasan meningkatkan kualitas tulisan yang dimuat serta penyesuaian terhadap pedoman akreditasi majalah ilmiah dari LIPI.

Judul artikel ilmiah yang di muat pada Buletin Ilmiah “Marina” Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Volume 2 Nomor 2 Tahun 2016 yaitu; (i) Dampak Ekonomi Pemberlakuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 2015 Terhadap Aktivitas Usaha Nelayan Cantrang di Kota Probolinggo, Jawa Timur; (ii) Sertifikat Mutu Sebagai Salah Satu Jenis Hambatan Non Tarif Perdagangan Tuna Dan Udang: Definisi, Jenis dan Permasalahannya; (iii) Perubahan Mata Pencaharian Dari Petani Ke Nelayan Perikanan Tangkap Laut di Desa Kanigoro Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul; (iv) Prinsip-Prinsip Penanggulangan Kemiskinan di Wilayah Pesisir Utara Jawa Tengah; (v) Preferensi Masyarakat di Sekitar Waduk Kedung Ombo Terhadap Jenis Ikan Penebaran. Artikel-artikel tersebut diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pelaku usaha dan pengambil kebijakan di sektor kelautan dan perikanan terutama dari sisi sosial ekonomi.

Redaksi berharap semoga seluruh informasi yang disajikan dapat bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca. Kami selaku redaksi mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca untuk penyempurnaan penerbitan buletin berikutnya.

Selamat membaca dan terimakasih

Redaksi.

Buletin Ilmiah "MARINA"
Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
 VOLUME. 2 NO. 2 DESEMBER 2016

DAFTAR ISI	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
LEMBAR ABSTRAK	iii-v
 DAMPAK EKONOMI PEMBERLAKUAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NO. 2 TAHUN 2015 TERHADAP AKTIVITAS USAHA NELAYAN CANTRANG DI KOTA PROBOLINGGO, JAWA TIMUR <i>Oleh : Siti Hajar Suryawati dan Radityo Pramoda</i>	45 - 55
 SERTIFIKAT MUTU SEBAGAI SALAH SATU JENIS HAMBATAN NON TARIF PERDAGANGAN TUNA DAN UDANG: DEFINISI, JENIS DAN PERMASALAHANNYA <i>Oleh : Rismutia Hayu Deswati dan Budi Wardono</i>	57 - 72
 PERUBAHAN MATA PENCAHARIAN DARI PETANI KE NELAYAN PERIKANAN TANGKAP LAUT DI DESA KANIGORO KECAMATAN SAPTOSARI, KABUPATEN GUNUNGKIDUL <i>Oleh : Budi Wardono</i>	73 - 80
 PRINSIP-PRINSIP PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI WILAYAH PESISIR UTARA JAWA TENGAH <i>Oleh : Arif Sofianto</i>	81 - 91
 PREFERENSI MASYARAKAT DI SEKITAR WADUK KEDUNG OMBO TERHADAP JENIS IKAN PENEBARAN <i>Oleh : Aisyah dan Retno Widiastuti</i>	93 - 102

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa ijin dan biaya

**DAMPAK EKONOMI PEMBERLAKUAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NO. 2
TAHUN 2015 TERHADAP AKTIVITAS USAHA NELAYAN CANTRANG DI KOTA PROBOLINGGO, JAWA TIMUR**

*Economic Impact of Enforcement of Regulation of The Minister of Marine and Fisheries No. 2 2015
Operating Activities Against Fishermen in Probolinggo Cantrang, East Java*

Siti Hajar Suryawati dan Radityo Pramoda

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak ekonomi pemberlakuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 2015 terhadap aktivitas usaha nelayan cantrang di Kota Probolinggo, yang meliputi aspek pendapatan, kerugian asset usaha, modal usaha serta mekanisme pemasaran. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan *Regulatory Impact Assessment* (RIA). Data yang digunakan adalah data primer yang diambil pada bulan Mei 2015 dengan teknik wawancara, pencatatan, dan observasi di TPI Mayangan, Kota Probolinggo. Sampel responden diambil secara *snowball sampling* terhadap pemilik kapal, nakhoda, Anak Buah Kapal (ABK), pedagang, juru timbang, dan kuli angkut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nelayan cantrang merupakan kelompok masyarakat yang paling banyak merasakan dampak pemberlakuan Permen KP No. 2 Tahun 2015. Mereka mengalami penurunan pendapatan, kerugian aset usaha yang sudah diinvestasikan, dan kredit macet ke bank. Penelitian dampak ekonomis dari pemberlakuan Permen KP No 2 Tahun 2015, diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan implementasi permen tersebut sehingga nelayan cantrang juga tidak menanggung risiko terlalu besar..

Kata Kunci: permen KP No 2 tahun 2015, nelayan, cantrang, Kota Probolinggo

ABSTRACT

The research aims to determine economic impact of implementation of the regulation of Minister of Marine and Fisheries No. 2 of 2015 in Probolinggo City, including revenue aspect, business assets losses aspect, capital aspect, and marketing mechanism. Method of analysis was descriptive analysis and regulatory impact assessments. The research collects primary data during May 2015 by interview techniques, recording and observation in TPI Mayangan, Probolinggo City. Research sample were vessel owners, skippers, crews, traders, interpreter stations, and porters. They taken by snowball sampling method. Results show that cantrang fishermen were group society that feel many impact of implementation of the regulation of Minister of Marine and Fisheries No. 2 of 2015. They experienced a decline in revenues, asset Losses effort is well invested, less credit to the bank. It can be expected as the fundamental basis for the Implementation of the regulation that the risk of fishermen not too big..

Keywords: regulation of Minister of Marine and Fisheries No. 2 of 2015, fisherman, trawl, Probolinggo City

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa ijin dan biaya

**SERTIFIKAT MUTU SEBAGAI SALAH SATU JENIS HAMBATAN
NON TARIF PERDAGANGAN TUNA DAN UDANG: DEFINISI, JENIS DAN PERMASALAHANNYA**

*Certificate of Quality as One of The Non-Tariff Barriers to Tuna and Shrimp Trade:
Definition, Type and Problem*

Rismutia Hayu Deswati dan Budi Wardono

ABSTRAK

Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor tuna dan udang tertinggi dengan negara tujuan USA, UE dan Jepang. Setiap tahunnya, volume ekspor tuna dan udang mengalami peningkatan dengan pasar yang semakin luas. Pada dunia perdagangan internasional, dikenal dua jenis hambatan ekspor yaitu hambatan tarif dan non tarif. Penghapusan hambatan tarif tidak serta merta membuat hambatan perdagangan internasional berkurang, justru hambatan non tarif semakin bertambah. Salah satu jenis hambatan non tarif yang sedang menjadi topik hangat adalah mengenai sertifikat mutu ikan yang terdiri atas berbagai jenis. Tujuan dari penelitian ini untuk memaparkan definisi, jenis dan permasalahan sertifikasi mutu sebagai hambatan non tarif pada ekspor komoditas tuna dan udang Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai jenis sertifikat mutu yang harus dilengkapi eksportir diantaranya SKP, HACCP, BRC, BAP, MSC, ASC dan ISO 22000. Setiap sertifikat membutuhkan biaya yang mahal dengan jangka waktu berlakunya berkisar 1-2 tahun. Permasalahan terkait pengurusan sertifikasi mutu jika tidak dibantu oleh pemerintah pusat ke depannya akan menjadi hambatan non tarif yang mengancam keberlanjutan usaha pengolahan tuna dan udang yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, butuh peran serta dan sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan eksportir yang konkrit dengan membentuk lembaga sertifikasi untuk mengakomodir pelayanan berbagai sertifikasi ekspor yang bersifat satu pintu.

Kata Kunci: hambatan non tarif, ekspor perikanan, sertifikat mutu

ABSTRACT

Indonesia is one of the highest exporter of tuna and shrimp products with destination markets such as USA, EU and Japan. Each year, the tuna and shrimp export volume increased by an expand broad market. There are two types of export barriers in international trade, tariff and non tariff barriers. Elimination of tariff barriers did not necessarily make reduced international trade barriers, non-tariff barriers actually increased. One of non-tariff barriers is the quality certificates of fish consisting of various types. The purpose of this study to describe the types of voluntary quality certificate can be equipped to expand market opportunities for the export of tuna and shrimp. The result showed that there are different types of quality certificate exporters must have, such as : SKP, HACCP, BRC, BAP, MSC, ASC and ISO 22000. Each certificate is highly cost and only have a validity period of 1-2 years. Problems related to the maintenance of quality certification if it is not helped by the central government in the future, will become non-tariff barriers that threaten the sustainability of tuna and shrimp processing business in Indonesia. Therefore, need the participation and synergy between the central government and exporter to form a certification body to accommodate a wide range of export certification services.

Keywords: non tariff barriers, fisheries export, quality certificate

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa ijin dan biaya

**PERUBAHAN MATA PENCAHARIAN DARI PETANI KE NELAYAN PERIKANAN TANGKAP LAUT DI DESA
KANIGORO KECAMATAN SAPTOSARI, KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Transformation livelihood: From Farmers To Fishermen on The Southern Coast, Gunungkidul Regency

Budi Wardono

ABSTRAK

Mata pencaharian masyarakat di Desa Kanigoro, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul mengalami perubahan. Semula, sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, namun kemudian, sejak tahun 1980-an mulai beralih mata pencaharian sebagai nelayan perikanan tangkap laut. Perubahan mata pencaharian tersebut terjadi sejak masyarakat mendapat pelatihan usaha perikanan tangkap laut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perubahan mata pencaharian dari petani menjadi nelayan perikanan tangkap laut. Penelitian dilakukan pada bulan Februari sampai dengan Mei 2014, di Desa Kanigoro, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul. Responden terdiri dari nelayan, Anak Buah Kapal (ABK), pedagang, penyedia bahan bakar minyak (BBM) dan jasa modal usaha (*juragan*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mata pencaharian sebagai nelayan perikanan tangkap laut memberikan kontribusi utama sebagai sumber pendapatan keluarga. Namun demikian nelayan tidak meninggalkan kegiatan pertanian dengan alasan untuk memanfaatkan waktu luang setelah bekerja sebagai nelayan pada saat cuaca buruk. Kegiatan ini merupakan sumber tabungan yang akan digunakan untuk biaya pendidikan atau sebagai tabungan untuk sumber permodalan dan untuk penambahan investasi baru yaitu memperbaiki/membeli perahu, membeli mesin dan alat tangkap.

Kata Kunci: mata pencaharian utama, alih profesi, kontribusi, transformasi, nelayan

ABSTRACT

Have been changes in the livelihoods of communities along the southern coast of Gunungkidul Regency. Originally, mostly subsistence farmers, but since the 1980s began to change their profession as a fisherman. The job changes have occurred since the community received training fishermen in TPI Baron. Purpose of research to transform the work of farmers become fishermen, and the role of capture fisheries as the main source of livelihood. Research conducted from February to May 2014, in Desa Kanigoro, Kanigoro, District Saptosari, Gunungkidul Regency. Respondents consisted of fishermen and crew, traders, fuel providers, venture capital services (middlemen). The analysis showed that fishermen work in the location of current research provides a major contribution as a source of family income. However, the fishermen did not leave the farm. Agricultural activities are still carried out by fishermen to use their spare time after work so fishermen and during bad weather. Farming activities, serve as a source of savings that will be used for education or as a source of savings for capital. Revenue from livestock used for new investments is to improve/buy a boat, buy machinery and fishing gear.

Keywords: *main livelihood, over the profession, contributions, transformation, fishers*

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa ijin dan biaya

PRINSIP-PRINSIP PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI WILAYAH PESISIR UTARA JAWA TENGAH

Need For Poverty Reduction In North Coastal Areas In Central Java

Arif Sofianto

ABSTRAK

Masyarakat pesisir merupakan salahsatu kelompok termiskin. Kebijakan-kebijakan yang telah dilaksanakan di kawasan pesisir sering mengakibatkan beberapa kondisi berupa perusakan ekologi, kesenjangan dan kemiskinan nelayan tradisional, serta ketergantungan masyarakat terhadap pemodal. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kebutuhan penanggulangan kemiskinan pada wilayah pesisir sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kecamatan Juwana dan Margoyoso di Kabupaten Pati, serta Kecamatan Ulujami di Kabupaten Pemalang. Informan penelitian ini berjumlah 100 orang terdiri dari unsur pemerintah daerah, lembaga masyarakat, koperasi, nelayan, petambak, pengolah hasil perikanan dan petani. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, FGD dan Observasi. Teknik analisis data menggunakan model yang dikembangkan oleh Spradley, yang merupakan kesatuan proses linear yang dimulai dari analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial dan analisis tema budaya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah model penanggulangan kemiskinan pada masyarakat pesisir utara Jawa Tengah berupa konsep pemberdayaan yang mengutamakan prinsip a). Komitmen pada keyakinan, nilai, adat kebiasaan, kepentingan bersama, b). Menciptakan keterbukaan, kejujuran, solidaritas dan pelibatan masyarakat.

Kata Kunci: kemiskinan, masyarakat pesisir, Jawa Tengah

ABSTRACT

The coastal communities is one of the main groups of the poorest. The policies that have been implemented in coastal areas often result in some circumstances as ecological destruction, poverty gap and traditional fishing, as well as public dependence on financiers. This study aims to understand the need to reduce poverty in coastal areas according to the characteristics and needs of the community. This type of research is qualitative descriptive. The location of research in the Juwana and Margoyoso sub district in Pati Regency, and the Ulujami Subdistrict in Pemalang Regency. The informants of 100 people consisting of representatives from local government, community organizations, cooperatives, fishermen, farmers, fishpond farmers, and fish processors. The technique of collecting data using interviews, focus group discussions and observation. Data were analyzed using a model developed by Spradley, which is the unity of a linear process that starts from domain analysis, taxonomic analysis, componential analysis and analysis of cultural themes. The conclusion of this study is a model of addressing poverty in the north coast of Central Java community a concept that promotes empowerment principle a). Commitment to the beliefs, values, customs, common interests, b). Create transparency, honesty, solidarity and community involvement.

Keywords: poverty, coastal communities, Central Java

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa ijin dan biaya

PREFERENSI MASYARAKAT DI SEKITAR WADUK KEDUNG OMBO TERHADAP JENIS IKAN PENEBARAN
Community Preferences Around The Reservoir of Kedung Ombo to Type of Fish Stocking

Aisyah dan Retno Widiastuti

ABSTRAK

Waduk Kedung Ombo terletak di Propinsi Jawa Tengah memiliki daerah genangan air yang meliputi tiga wilayah administrasi yaitu Kabupaten Grobogan, Boyolali dan Sragen. Introduksi ikan patin siam atau *striped catfish* (*Pangasionodon hypophthalmus*, Sauvage, 1878) sejumlah 7470 ekor di Waduk Kedung Ombo dilakukan melalui Iptek Penebaran Berbasis Budidaya (*Culture Based Fisheries*, CBF) pada tahun 2013. Penelitian dilakukan pada tahun 2016 bersamaan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi. Pengumpulan data primer terkait preferensi masyarakat terhadap jenis ikan yang akan dan yang sudah ditebar dilakukan dengan wawancara langsung dengan responden menggunakan kuisioner terhadap empat komunitas masyarakat yang berkaitan langsung dengan waduk, yaitu nelayan tangkap, pengumpul ikan, penjual ikan olahan dan masyarakat yang mengkonsumsi ikan. Hasil penelitian menunjukan bahwa sebanyak 36% menyukai jenis patin yang ditebar. Dengan analisis terpisah, jenis lain yang diharapkan ditebar antara lain nila sebanyak 57%, sisanya betutu dan karper.

Kata Kunci: penebaran, jenis ikan tebaran, patin

ABSTRACT

*Kedung Ombo Reservoir is located in Central Java, covered 3 administrative area include Grobogan District, Boyolali and Sragen. 7470 individu of Striped catfish (*Pangasionodon hypophthalmus*, Sauvage, 1878) was introduced through culture based fisheries in 2013. Monitoring and evaluation of those introduced activity has done in 2016 by direct observation. Primary data that was collected from this research are community preferences that come from 4 community structure in Kedung Ombo Reservoir, they are fisherman, Pengumpul, Processed fish sellers, people who eat fish (buyer or tourist). The result show that 36% of Striped catfish introduction. Separated analysis between Striped catfish and others fish, Nile, Marble Goby, Common Carp are the other fish choosen by community for stocking in Kedung Ombo Reservoir.*

Keywords: stocking, stocking fish, striped catfish

**DAMPAK EKONOMI PEMBERLAKUAN PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NO. 2 TAHUN 2015
TERHADAP AKTIVITAS USAHA NELAYAN CANTRANG
DI KOTA PROBOLINGGO, JAWA TIMUR**

***Economic Impact of Enforcement of Regulation of
The Minister of Marine and Fisheries No. 2 2015 Operating
Activities Against Fishermen in Probolinggo Cantrang, East Java***

***Siti Hajar Suryawati dan Radityo Pramoda**

Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Gedung Balitbang KP I Lt. 4

Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara

Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924r 2015

*e-mail: siti_suryawati@yahoo.com

Diterima 12 April 2014- Disetujui 25 Mei 2015

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak ekonomi pemberlakuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 2015 terhadap aktivitas usaha nelayan cantrang di Kota Probolinggo, yang meliputi aspek pendapatan, kerugian aset usaha, modal usaha serta mekanisme pemasaran. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan *Regulatory Impact Assessment* (RIA). Data yang digunakan adalah data primer yang diambil pada bulan Mei 2015 dengan teknik wawancara, pencatatan, dan observasi di TPI Mayangan, Kota Probolinggo. Sampel responden diambil secara *snowball sampling* terhadap pemilik kapal, nakhoda, Anak Buah Kapal (ABK), pedagang, juru timbang, dan kuli angkut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nelayan cantrang merupakan kelompok masyarakat yang paling banyak merasakan dampak pemberlakuan Permen KP No. 2 Tahun 2015. Mereka mengalami penurunan pendapatan, kerugian aset usaha yang sudah diinvestasikan, dan kredit macet ke bank. Penelitian dampak ekonomis dari pemberlakuan Permen KP No 2 Tahun 2015, diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan implementasi permen tersebut sehingga nelayan cantrang juga tidak menanggung risiko terlalu besar.

Kata Kunci: permen KP No 2 tahun 2015, nelayan, cantrang, Kota Probolinggo

ABSTRACT

The research aims to determine economic impact of implementation of the regulation of Minister of Marine and Fisheries No. 2 of 2015 in Probolinggo City, including revenue aspect, business assets losses aspect, capital aspect, and marketing mechanism. Method of analysis was descriptive analysis and regulatory impact assessments. The research collects primary data during May 2015 by interview techniques, recording and observation in TPI Mayangan, Probolinggo City. Research sample were vessel owners, skippers, crews, traders, interpreter stations, and porters. They taken by snowball sampling method. Results show that cantrang fishermen were group society that feel many impact of implementation of the regulation of Minister of Marine and Fisheries No. 2 of 2015. They experienced a decline in revenues, asset Losses effort is well invested, less credit to the bank. It can be expected as the fundamental basis for the Implementation of the regulation that the risk of fishermen not too big.

Keywords: regulation of Minister of Marine and Fisheries No. 2 of 2015, fisherman, trawl, Probolinggo City

PENDAHULUAN

Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1980, tentang Penghapusan Jaring *Trawl* (Pukat Harimau) di Perairan Jawa, Sumatera, dan Bali, dibentuk dalam rangka menjaga kesehatan habitat serta produktivitas penangkapan nelayan tradisional.

Alat penangkapan ikan jenis *trawl* yang berkembang di masyarakat, banyak ditemukan dalam bentuk serta nama yang beragam (sifat penangkapannya tidak ramah lingkungan). Hal ini dikarenakan bersifat mengeruk dasar perairan dan menggunakan mata jaring yang kecil, sehingga sumber daya ikan yang masih anakan ikut tertangkap. Praktek penggunaan *trawl* di beberapa negara di dunia mengalami akibat buruk. Kondisi tersebut mengakibatkan FAO mengeluarkan aturan main, yang mengatur agar sumber daya ikan tetap terjaga melalui *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF) (FAO, 1995).

Hasil modifikasi alat tangkap yang memiliki produktivitas tinggi dan cukup efektif dalam menangkap ikan dasar seperti *trawl*, salah satunya adalah cantrang. Cantrang merupakan alat tangkap yang memiliki tiga bagian utama, yaitu sayap, badan, dan kantong. Cantrang dioperasikan dengan cara ditarik di atas kapal yang tidak bergerak atau sedang berlabuh di perairan. Selain itu, dasar perairan daerah pengoperasian harus datar dan berlumpur atau berpasir (Bambang, 2006). Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 45 Tahun 2011, tentang Estimasi Potensi Sumberdaya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa status eksploitasi sumber daya ikan demersal sudah mencapai status eksploitasi lebih (*fully exploited*) (salah satunya disebabkan oleh Pukat Hela) seperti cantrang dan potensi sumber daya udang dalam status tangkap lebih (*overfishing*).

Upaya pemerintah memulihkan kembali daya dukung lingkungan tersebut adalah dengan mengesahkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015, tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine*

Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Permen KP No. 2/2015). Permen KP No. 2/2015, diberlakukan untuk mengatur penggunaan alat tangkap Pukat Hela dan Pukat Tarik, yang sudah menyebabkan menurunnya sumber daya ikan dan mengancam kelestarian lingkungan. Implikasi berlakunya Permen KP No. 2/2015, menyebabkan puluhan ribu nelayan tidak dapat melaut dan menangkap ikan karena menggunakan alat tangkap yang dilarang. Respon masyarakat nelayan terhadap pemberlakuan peraturan ini beragam. Di satu sisi, nelayan yang menggunakan alat tangkap yang dilarang menjadi resah dan melakukan penolakan. Pada sisi lain, nelayan yang tidak terkena pelarangan sangat mendukung kebijakan pemerintah ini. Kondisi ini sebagaimana yang digambarkan oleh (Bailey, 1988) dimana mereka memperebutkan ikan dari sumber yang sama, bahkan *fishing ground* yang sama.

Kota Probolinggo merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Timur yang sebagian nelayannya menggunakan alat tangkap cantrang. Nelayan cantrang di Kota Probolinggo sangat menolak pemberlakuan Permen KP No. 2/2015. Dasar penolakannya, karena mereka akan kehilangan sumber mata pencaharian. Untuk itu, kajian ini bertujuan untuk memberikan sumbangan pemikiran mengenai dampak pemberlakuan Permen KP No. 2/2015, terhadap aktivitas usaha nelayan yang menggunakan alat tangkap cantrang.

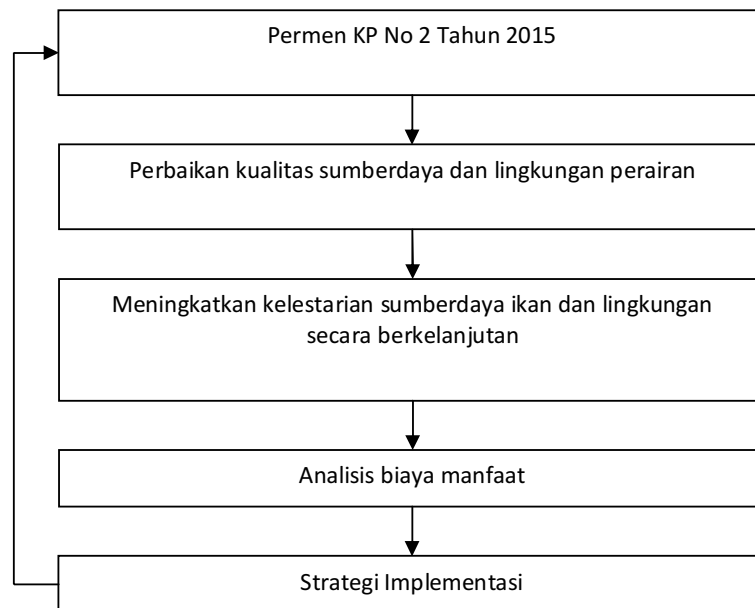
METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian dilakukan pada bulan Mei 2015 di Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur (Gambar 1). Kota Probolinggo dipilih, karena merupakan salah satu wilayah yang sebagian besar nelayannya terkena dampak pemberlakuan Permen KP No. 2/2015.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder. Menurut Marzuki (2002), data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumbernya. Data sekunder adalah data



Gambar 2. Kerangka Pendekatan Penelitian Dampak Ekonomi Pemberlakuan Permen KP No. 2/2015 pada Nelayan Cantrang di Kota Probolinggo

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Kota Probolinggo adalah salah satu kota yang terletak di Propinsi Jawa Timur diantara 38 Kabupaten/Kota lainnya. Letak Kota Probolinggo berada pada 7°43'41"–7°49'04" Lintang Selatan dan 113°10'–113°15' Bujur Timur, dengan rata-rata ketinggian 10 meter di atas permukaan laut. Batas wilayah utara Kota Probolinggo, berbatasan dengan Selat Madura dan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Dringu wilayah Kabupaten Probolinggo. Batas wilayah selatan berbatasan dengan Kecamatan Leces, Kecamatan Wonomerto, Kecamatan Bantaran dan Kecamatan Sumberasih (ketiganya masuk wilayah Kabupaten Probolinggo). Batas wilayah barat berbatasan dengan Kecamatan

Sumberasih wilayah Kabupaten Probolinggo. Luas Wilayah Kota Probolinggo 56,667 Km², terbagi menjadi 5 kecamatan dan 29 kelurahan (BPS, 2016).

Nelayan Kota Probolinggo yang paling banyak adalah nelayan tetap, selebihnya merupakan nelayan sambilan, andon dan kadang-kadang (Tabel 1). Produksi dan nilai produksi perikanan tangkap laut Kota Probolinggo pada tahun 2010 sampai 2014 cukup fluktuatif (Tabel 2).

Produktivitas perikanan tangkap perlu mendapat dukungan sarana dan prasarana penangkapan, termasuk motorisasi kapal penangkapan. Jumlah kapal motor di Kota Probolinggo tahun 2010-2014, dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 1. Jumlah Nelayan di Kota Probolinggo, Tahun 2010 – 2014.

No	Tahun	Jumlah Nelayan (orang)/Number of Fishermen (person)			
		Tetap	Sambilan	Andon	Kadang-Kadang
1	2010	2.844	412	277	67
2	2011	1.850	185	193	52
3	2012	2.200	125	120	40
4	2013	2.200	245	130	40
5	2014	2.130	351	-	50

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Probolinggo (2010; 2011; 2012; 2013; 2014)

Tabel 2. Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Laut di Kota Probolinggo, Tahun 2010 -2014

No	Tahun	Jumlah (ton)	Nilai Produksi (Rp)
1	2010	36.087,80	400.731.035.000
2	2011	18.352,20	222.010.221.500
3	2012	10.200,89	155.918.443.000
4	2013	13.200,89	177.031.262.000
5	2014	15.989,33	319.463.134.200

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Probolinggo (2010; 2011; 2012; 2013; 2014)

Tabel 3. Jumlah Kapal Motor di Kota Probolinggo, Tahun 2010–2014

No	Ukuran Kapal (GT)	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Motor tempel	27	27	27	27	-
2	0 – 5	-	-	108	90	90
3	5 – 10	126	72	40	40	34
4	10 – 20	13	67	42	54	67
5	20 – 30	26	37	41	69	83
6	> 30	154	104	132	156	178
Jumlah		346	307	390	436	452

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Probolinggo (2010; 2011; 2012; 2013; 2014)

Alat Tangkap menurut Permen KP No. 2/2015

Permen KP No. 2/2015, diberlakukan dengan pertimbangan bahwa penggunaan alat penangkapan ikan Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*seine nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia telah mengakibatkan penurunan dan mengancam kelestarian lingkungan sumber daya ikan. Kondisi ini salah satunya dapat dilakukan dengan melarang penggunaan alat penangkapan ikan *trawls* dan *seine nets*. Menurut Pasal 3, Permen KP No. 2/2015, alat penangkapan ikan *trawls* terdiri:

- (1) Pukat Hela (*trawls*) terdiri dari:
 - a. Pukat Hela dasar (*bottom trawls*);
 - b. Pukat Hela pertengahan (*midwater trawls*);
 - c. Pukat Hela kembar berpapan (*otter twin trawls*); dan
 - d. Pukat dorong.
- (2) Pukat hela dasar (*bottom trawls*) terdiri dari:
 - a. Pukat Hela dasar berpalang (*beam trawls*);
 - b. Pukat Hela dasar berpapan (*otter trawls*);
 - c. Pukat Hela dasar dua kapal (*pair trawls*);
 - d. *Nephrops trawls*; dan
 - e. Pukat Hela dasar udang (*shrimp trawls*), berupa pukat udang.
- (3) Pukat Hela pertengahan (*midwater trawls*) terdiri dari:

- a. Pukat Hela pertengahan berpapan (*otter trawls*), berupa pukat ikan;
- b. Pukat Hela pertengahan dua kapal (*pair trawls*); dan
- c. Pukat Hela pertengahan udang (*shrimp trawls*).

Penangkapan ikan Pukat Tarik (*seine nets*) menurut Pasal 4, Permen KP No. 2/2015:

- (1) Alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) yang terdiri dari:
 - a. Pukat Tarik pantai (*beach seines*); dan
 - b. Pukat Tarik berkapal (*boat or vessel seines*).
- (2) Pukat tarik berkapal (*boat or vessel seines*) terdiri dari:
 - a. dogol (*danish seines*);
 - b. *Scottish Seines*;
 - c. *Pair Seines*;
 - d. Payang;
 - e. Cantrang; dan
 - f. Lampara dasar.

Permasalahan Penggunaan Alat Tangkap Cantrang di Kota Probolinggo

Aktivitas usaha penangkapan ikan dengan alat tangkap cantrang mencakup berbagai komponen. Komponen tersebut meliputi: aktivitas input produksi, distribusi dan pasca produksi, serta konsumsi. Aktivitas input produksi terdiri

dari pengadaan operasional penangkapan seperti: alat tangkap, es, bahan bakar, keranjang, dan perbekalan. Aktivitas distribusi kegiatan penangkapan alat tangkap cantrang melibatkan tukang angkut, juru timbang, pedagang (eceran dan industri), serta konsumen. Aktivitas pascaproduksi adalah kegiatan pengolahan ikan hasil tangkapan (pengasinan dan industri surimi). Mekanisme aliran penangkapan ikan dengan alat tangkap cantrang, dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3 menunjukkan bahwa aliran penangkapan ikan merupakan jalur pemasaran hasil tangkapan nelayan cantrang yang melibatkan suplai operasional sebelum kegiatan penangkapan dilakukan, tukang angkut dari kapal ke TPI, serta juru timbang.

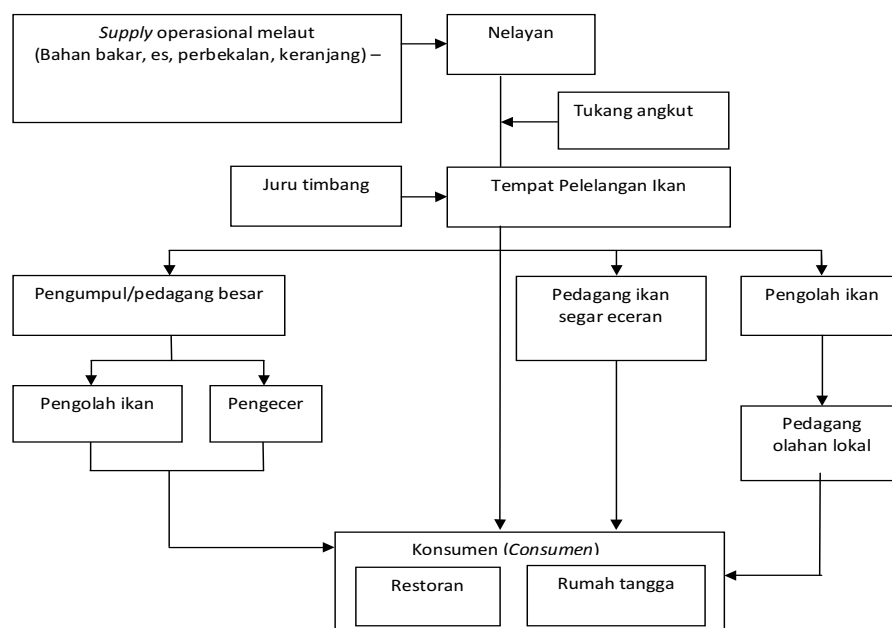
Mengacu pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2016, tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam disebutkan bahwa nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Selanjutnya ikan hasil produksi nelayan tersebut masuk ke pasar yang melibatkan pedagang pengumpul, pedagang besar dan pedagang pengecer sebagai lembaga-lembaga pemasarannya untuk sampai ke konsumen (Mubyarto, 1994; Hanafiah dan Saefuddin, 1983). Pemberlakuan Permen KP No. 2/2015, diduga akan mengakibatkan

penurunan produktivitas hasil tangkapan. Identifikasi permasalahan penggunaan alat tangkap cantrang di Kota Probolinggo secara lengkap, dapat dilihat pada Gambar 4.

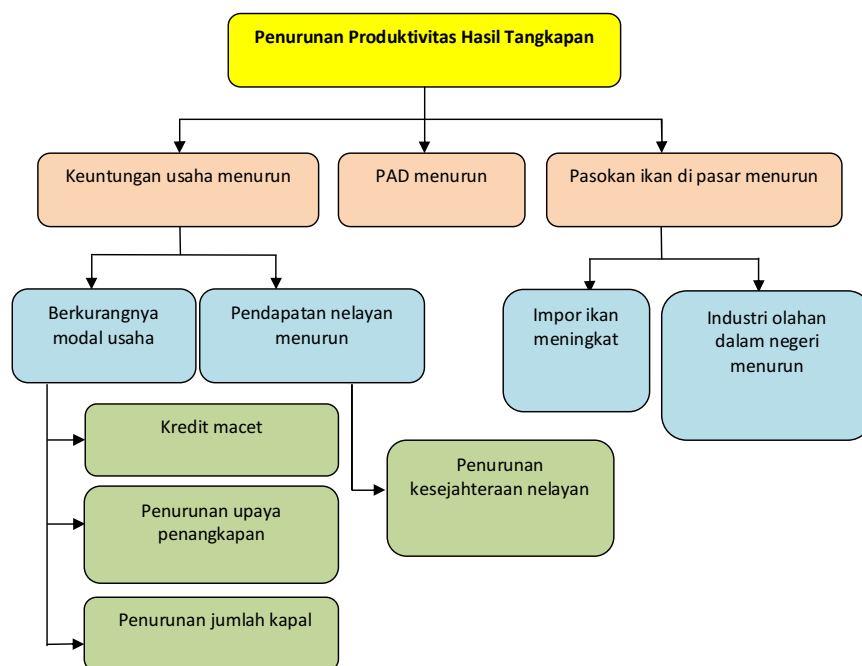
Analisis Biaya Manfaat Dampak Pemberlakuan Permen KP No. 2/2015

Pemberlakuan Permen KP No. 2/2015, memberikan arti bahwa pemerintah tidak melakukan tindakan apapun untuk mengatasi masalah yang terjadi, maka sejumlah kondisi *baseline* yang berhasil diidentifikasi ditunjukkan pada Tabel 4 dan Tabel 5. Konflik yang sering terjadi saat ini, bersentuhan dengan nelayan tradisional yang tidak menggunakan alat tangkap cantrang. Kusnadi (2002), menyatakan bahwa salah satu penyebab terjadinya konflik dalam masyarakat nelayan tradisional dengan nelayan modern, disebabkan juga oleh adanya perebutan sumber daya ikan. Hal ini dipertegas oleh pernyataan Kinseng (2007) bahwa konflik sosial antara sesama nelayan seringkali terjadi antara nelayan dengan tingkat kemajuan teknologi yang berbeda.

Berdasarkan Tabel 5, diketahui bahwa hasil identifikasi yang dilakukan menggambarkan nelayan sebagai kelompok yang menanggung risiko paling besar dengan adanya pemberlakuan kebijakan tersebut. Masyarakat nelayan merupakan salah satu golongan masyarakat



Gambar 3. Mekanisme Aliran Penangkapan Ikan Dengan Alat Tangkap Cantrang



Gambar 4. Struktur Permasalahan Penggunaan Alat Tangkap Cantrang di Kota Probolinggo

Tabel 4. Analisis Biaya Dampak Permen KP No. 2/2015 Tetap Diberlakukan di Kota Probolinggo.

No.	Pelaku	Indikator	Jumlah Kerugian	Keterangan
1.	Pemerintah	Sosialisasi peraturan dan pembuatan petunjuk pelaksana	Rp. 52.460.300,-/tahun	Data Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Probolinggo
		Penegakan hukum	Rp. 105.917.100,-/tahun	Data Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Probolinggo
		Resiko politik (demo)	Rp. 0	Aksi damai dilakukan di kantor DPRD (Februari 2015) dan biaya demo bersumber dari swadaya nelayan cantrang
		Berkurangnya PAD	Rp. 30.000.000,-/tahun	Berdasarkan Hasil wawancara berkurangnya PAD yang disumbangkan oleh Nelayan cantrang tidak terlalu signifikan
2.	Nelayan (juragan)	Penurunan pendapatan	Rp. 3.140.000.000,-/bulan	Rata-rata pendapatan untuk setiap kapal cantrang: Rp. 20.000.000/bulan dan total jumlah total kapal 157
		Kehilangan mata pencaharian	80 orang	-
		Hilangnya nilai aset produksi	Rp.78.500.000.000,-	Jumlah kapal cantrang: 157 (nilai kapal cantrang lengkap = Rp. 500.000.000)
		Berkurangnya tenaga kerja	orang	Jumlah total ABK+tenaga pengangkut+pedagang+ juru timbang
		Banyaknya juragan bangkrut	80 orang	Data Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Probolinggo
ABK		Penurunan pendapatan	Rp. 2.198.000.000,-/bulan	1 kapal cantrang: 10 ABK
		Kehilangan mata pencaharian	1.570 orang	Data Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Probolinggo

Lanjutan Tabel 4

No.	Pelaku	Indikator	Jumlah Kerugian	Keterangan
	Pedagang (Trader)	Penurunan pendapatan Kehilangan mata pencaharian	Rp. 1.600.000.000,-/bulan 200 orang	Hasil wawancara Data Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Probolinggo
	Juru timbang (Interpreter of weight)	Penurunan pendapatan Kehilangan mata pencaharian	Rp. 208.000.000,-/bulan 80 orang	Hasil wawancara 20 grup (setiap grup 4 orang)
	Tenaga angkut (Porter)	Penurunan pendapatan Kehilangan mata pencaharian	Rp. 78.000.000,-/bulan 60 orang	Hasil wawancara 10 grup (setiap grup 6 orang)
3.	Perbankan (Bank)	Resiko kredit macet dari nelayan cantrang	Rp. 13.056.000.000,-/tahun	Pinjaman dari Bank BNI 46 & Bank Jatim
4.	Pelaku industri (Industry)	Keuntungan usaha menurun karena kurangnya pasokan bahan baku dalam jangka pendek	Rp. 180.000.000/bulan	Hasil wawancara
5.	Lingkungan (Environment)	-	-	-

Sumber: Data Primer, 2015 (diolah)

Tabel 5. Analisis Manfaat Dampak Permen KP No. 2/2015 tetap diberlakukan di Kota Probolinggo.

No.	Pelaku	Indikator	Jumlah Manfaat	Keterangan
1.	Pemerintah	Meningkatnya PAD	Rp. 0	Data Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Probolinggo
		Ketersediaan pangan	28 kg/tahun	Data Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Probolinggo tahun 2014
2.	Nelayan (juragan)	Minimalisir konflik	Tidak berkurang	Adanya kecemburuan sosial dan pelanggaran wilayah kewenangan penangkapan wilayah kota dan kabupaten
		Meningkatnya perekonomian nelayan kecil (non cantrang)	Tidak terjadi	Hal ini dikarenakan perbedaan produktivitas penggunaan alat tangkap
	ABK	Minimalisir konflik	Tidak terjadi	Hampir tidak pernah terjadi konflik antar ABK
		Meningkatnya perekonomian ABK	Tergantung hasil tangkapan	Pendapatan ABK sesuai dengan hasil tangkapan yang diperoleh
	Pedagang	Minimalisir konflik	Tidak terjadi	Tidak pernah terjadi konflik antar pedagang
		Meningkatnya perekonomian pedagang	Tergantung jumlah ikan yang dapat dibeli pedagang	Pendapatan tergantung daya beli pedagang & hasil ikan yang didaratkan
	Juru Timbang	Minimalisir konflik	Tidak terjadi	Tidak pernah terjadi konflik antar juru timbang
		Meningkatnya perekonomian juru timbang	Tergantung jumlah ikan yang ditimbang	Pendapatan tergantung jumlah ikan yang ditimbang
	Tenaga Angkut	Minimalisir konflik	Tidak terjadi	Tidak pernah terjadi konflik antar tenaga angkut
		Meningkatnya perekonomian juru timbang	Tergantung jumlah ikan yang diangkut	Pendapatan tergantung kepada jumlah ikan yang diangkut dan kapal cantrang langganan yang mendaratkan ikan
3.	Perbankan	-	-	-

Lanjutan Tabel 5

No.	Pelaku	Indikator	Jumlah Manfaat	Keterangan
3.	Perbankan	-	-	-
4.	Pelaku industri	Meningkatnya pasokan bahan baku	Rp. 180.000.000/bulan	Bahan baku tergantung kepada musim ikan (bahan baku untuk industri yang tidak hanya diambil dari hasil tangkapan nelayan Kota Probolinggo) dan hanya mengambil ikan sesuai dengan standar yang ditetapkan perusahaan
5.	Lingkungan	Meningkatnya sumber daya ikan	Meningkat dalam waktu yang tidak singkat	Perbaikan kerusakan yang terjadi membutuhkan waktu yang tidak sebentar (Hasil wawancara dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota/ Kabupaten Probolinggo)
		Terjaganya kelestarian lingkungan sumber daya	Sudah ada upaya untuk mengembalikan lingkungan sumber daya	Upaya ini belum dirasakan maksimal, mengingat kerusakan yang diakibatkan nelayan cantrang sudah besar

Sumber: Data Primer, 2015 (diolah)

yang dianggap miskin secara absolut, bahkan paling miskin diantara penduduk miskin (*the poorest of the poor*) (Mukflihati, 2010). Berbagai studi menunjukkan bahwa kondisi nelayan, khususnya nelayan perikanan skala kecil di Indonesia berada pada tingkat marjinal (Kusnadi, 2000; Semedi, 2002; Budi, 2008).

Implementasi Pelarangan Alat Tangkap Cantrang di Kabupaten Probolinggo

Berdasarkan hasil kajian, diketahui bahwa opsi kebijakan untuk tetap memberlakukan kebijakan strategi yang tepat. Hal ini dikarenakan untuk menghindari pemborosan anggaran pembuatan peraturan dan menjaga kredibilitas pemerintah dalam membuat kebijakan. Disahkannya Permen KP No. 2/2015, mempunyai tujuan baik untuk melestarikan lingkungan ekosistem laut dan pesisir, serta meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional. Penerapan Permen KP No. 2/2015, dalam jangka panjang akan memberikan pemulihan ekosistem yang sudah rusak dan memberikan pemerataan pendapatan para nelayan Kota Probolinggo.

Paradigma ekonomi dalam angka yang dijadikan dasar mengelola sumber daya ikan selama ini, harus segera diseimbangkan dengan menekan berbagai kemungkinan dampak negatif. Paradigma ini dapat dihindari apabila permen

KP No. 2/2015, dilanjutkan pemberlakukannya. Menurut Supriatna (2008), pengelolaan sumber daya harus lestari dan berkelanjutan, sehingga manfaatnya dapat dinikmati generasi penerus. Pada konteks ini, pelaksanaannya perlu ditegaskan kembali dengan penambahan pasal terkait penerapan penghapusan penggunaan alat tangkap yang dilarang dan bentuk penerapan sanksi secara tegas.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kesimpulan

Strategi kebijakan yang dapat direkomendasi adalah tetap memberlakukan Permen KP No. 2/2015, dengan melakukan tindak lanjut:

- Penambahan pasal:
 1. Tata cara penerapan penghapusan penggunaan alat tangkap pukat tarik (*seine nets*)/cantrang dilakukan secara bertahap.
 2. Bentuk penerapan sanksi tegas kepada pelaku yang melanggar kebijakan Permen KP No. 2/2015.
- Mensosialisasikan dan menyelenggarakan pelatihan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan (apabila sudah ada alternatif alat tangkap pengganti);

- Membentuk tim khusus (KKP) yang bekerja sama dengan otoritas daerah untuk melakukan pendekatan secara sosiologis kepada nelayan yang terkena implikasi Permen KP No. 2/2015;
- Berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait, perguruan tinggi, organisasi nelayan, dan tokoh masyarakat, untuk melakukan simulasi serta pemantauan lapangan (kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui: operasional alat tangkap Permen KP No. 2/2015 apakah memiliki status merusak atau tidak merusaknya). Hasil simulasi yang dilakukan nantinya harus dapat diterima oleh semua pihak;
- Membuat skema pembiayaan untuk membantu nelayan peralihan ke alat tangkap ramah lingkungan melalui organisasi nelayan atau kelembagaan koperasi nelayan;
- Berkoordinasi dengan pihak terkait (Kementerian Perhubungan/Syahbandar) untuk melakukan pengukuran ulang akte ukuran kapal ikan dan memfasilitasi penerbitan surat izin baru;
- Membuat petunjuk pelaksana yang jelas dan terarah terhadap pengaturan operasional alat penangkap *trawls* dan *seine nets*;
- Membuat sistem manajemen pengawasan yang ketat dan terpadu terhadap pelaksanaan Permen KP No. 2/2015, terutama terhadap perlindungan wilayah penangkapan bagi nelayan tradisional (bekerja sama dengan organisasi nelayan, institusi penegak hukum. Hal ini untuk menghindari konflik alat tangkap pada setiap provinsi/kabupaten/kota pesisir.

Implikasi Kebijakan

Implikasi dari pelaksanaan pemilihan kebijakan tersebut diantaranya adalah dilakukannya revisi terhadap kebijakan yang sudah diberlakukan. Pengembangan usaha alternatif serta manajemen konflik yang baik perlu dilakukan. Hal ini sejalan dengan tujuan UU No. 7 Tahun 2016 pada pasal 3 poin a dan b yaitu: a) memberikan prasarana dan sarana yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha; dan b) memberikan kepastian usaha yang

berkelanjutan. Selanjutnya kemandirian dan kesejahteraan nelayan di Kota Probolinggo dan daerah lain yang terkena dampak pemberlakuan Permen KP No. 2 Tahun 2015 dapat ditingkatkan.

UCAPAN TERIKA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada tim penelitian yang terkait dengan topik kajian ini khususnya di lingkup Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Balitbang KP-KKP yang telah memberi dukungan *financial* terhadap penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional. 2011. Kajian Ringkas Pengembangan dan Implementasi Metode *Regulatory Impact Analysis (RIA)* untuk Menilai Kebijakan (Peraturan dan Non Peraturan) di Kementerian PPN/Bappenas. Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas - Bappenas. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo. 2013. Kota Prbolinggo Dalam Angka 2013. Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo. Kota Probolinggo
- _____. 2014. Kota Prbolinggo Dalam Angka 2014. Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo. Kota Probolinggo
- _____. 2015. Kota Prbolinggo Dalam Angka 2015. Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo. Kota Probolinggo
- _____. 2016. Kota Prbolinggo Dalam Angka 2016. Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo. Kota Probolinggo
- Bailey, C. 1988. The Political Economy of Marine Fisheries Development in Indonesia. Indonesia No. 46 (Oct). Cornell Southeast Asia Program
- Bambang, N. 2006. *Petunjuk Pembuatan dan Pengoperasian Cantrang dan Rawai Dasar Pantai Utara Jawa Tengah*. Balai Besar Pengembangan Penangkapan Ikan. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Departemen Kelautan dan Perikanan. Semarang
- Budi, S. 2008. Kemiskinan dan Perlawanan Kaum Nelayan. Laskbang Mediatama. Malang
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Probolinggo. 2010. Informasi Data Statistik Perikanan Kota Probolinggo 2010. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Probolinggo. Kota Probolinggo

- _____. 2011. Informasi Data Statistik Perikanan Kota Probolinggo 2011. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Probolinggo. Kota Probolinggo
- _____. 2012. Informasi Data Statistik Perikanan Kota Probolinggo 2012. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Probolinggo. Kota Probolinggo
- _____. 2013. Informasi Data Statistik Perikanan Kota Probolinggo 2013. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Probolinggo. Kota Probolinggo
- _____. 2014. Informasi Data Statistik Perikanan Kota Probolinggo 2014. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Probolinggo. Kota Probolinggo
- FAO. 1995. Code of Conduct for Responsible Fisheries. FAO. Rome
- Hanafiah A.M dan A.M. Saefuddin. 1983. Tata Niaga Hasil Perikanan. UI Press. Jakarta
- Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 39 Tahun 1980, tentang Penghapusan Jaring *Trawl* (Pukat Harimau) di Perairan Jawa, Sumatera dan Bali. Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 1 Juli 1980
- Keputusan Menteri (Kepmen) Kelautan dan Perikanan No. 45 Tahun 2011 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 3 Agustus 2011
- Kinseng, R. 2007. Konflik Sumberdaya di Kalangan Nelayan di Indonesia. *Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi Manusia*. Vol. 01 No. 01. ISSN: 1978-4333. Hal 87 - 104
- Kusnadi. 2000. Nelayan: Strategi Adaptasi dan Jaringan Sosial. Humaniora Utama Press. Bandung
- _____. 2002. Konflik Sosial Nelayan. Kemiskinan dan Perebutan Sumberdaya Perikanan. LKIS, Yogyakarta
- Marzuki. 2002. *Metodologi Riset*. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta
- Mubyarto. 1994. Pengantar Ekonomi Pertanian. Pustaka LP3ES. Jakarta
- Muflikhati, I. 2010. Kondisi Sosial Ekonomi dan Tingkat Kesejahteraan Keluarga: Kasus di Wilayah Pasisir Jawa Barat. *Jurnal Ilmu Keluarga* (2-10)
- Peraturan Menteri KP Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 31
- Semedi, P. 2002. *Close to the stone, far from the throne: The story of a Javanese community 1820s–1990s*. Benang Merah. Yogyakarta
- Supriatna, J. 2008. Melestarikan Alam Indonesia. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2016, tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Disahkan di Jakarta pada tanggal 14 April 2016

SERTIFIKAT MUTU SEBAGAI SALAH SATU JENIS HAMBATAN NON TARIF PERDAGANGAN TUNA DAN UDANG: DEFINISI, JENIS DAN PERMASALAHANNYA

Certificate of Quality as One of The Non-Tariff Barriers to Tuna and Shrimp Trade: Definition, Type and Problem

***Rismutia Hayu Deswati, Tajerin dan Budi Wardono**

Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Gedung Balitbang KP I Lt. 4

Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara

Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924r 2015

*e-mail: rismutia.hd@gmail.com

Diterima 12 April 2014- Disetujui 25 Mei 2015

ABSTRAK

Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor tuna dan udang tertinggi dengan negara tujuan USA, UE dan Jepang. Setiap tahunnya, volume ekspor tuna dan udang mengalami peningkatan dengan pasar yang semakin luas. Pada dunia perdagangan internasional, dikenal dua jenis hambatan ekspor yaitu hambatan tarif dan non tarif. Penghapusan hambatan tarif tidak serta merta membuat hambatan perdagangan internasional berkurang, justru hambatan non tarif semakin bertambah. Salah satu jenis hambatan non tarif yang sedang menjadi topik hangat adalah mengenai sertifikat mutu ikan yang terdiri atas berbagai jenis. Tujuan dari penelitian ini untuk memaparkan definisi, jenis dan permasalahan sertifikasi mutu sebagai hambatan non tarif pada ekspor komoditas tuna dan udang Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai jenis sertifikat mutu yang harus dilengkapi eksportir diantaranya SKP, HACCP, BRC, BAP, MSC, ASC dan ISO 22000. Setiap sertifikat membutuhkan biaya yang mahal dengan jangka waktu berlakunya berkisar 1-2 tahun. Permasalahan terkait pengurusan sertifikasi mutu jika tidak dibantu oleh pemerintah pusat ke depannya akan menjadi hambatan non tarif yang mengancam keberlanjutan usaha pengolahan tuna dan udang yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, butuh peran serta dan sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan eksportir yang konkrit dengan membentuk lembaga sertifikasi untuk mengakomodir pelayanan berbagai sertifikasi ekspor yang bersifat satu pintu.

Kata Kunci: hambatan non tarif, ekspor perikanan, sertifikat mutu

ABSTRACT

Indonesia is one of the highest exporter of tuna and shrimp products with destination markets such as USA, EU and Japan. Each year, the tuna and shrimp export volume increased by an expand broad market. There are two types of export barriers in international trade, tariff and non tariff barriers. Elimination of tariff barriers did not necessarily make reduced international trade barriers, non-tariff barriers actually increased. One of non-tariff barriers is the quality certificates of fish consisting of various types. The purpose of this study to describe the types of voluntary quality certificate can be equipped to expand market opportunities for the export of tuna and shrimp. The result showed that there are different types of quality certificate exporters must have, such as : SKP, HACCP, BRC, BAP, MSC, ASC and ISO 22000. Each certificate is highly cost and only have a validity period of 1-2 years. Problems related to the maintenance of quality certification if it is not helped by the central government in the future, will become non-tariff barriers that threaten the sustainability of tuna and shrimp processing business in Indonesia. Therefore, need the participation and synergy between the central government and exporter to form a certification body to accommodate a wide range of export certification services.

Keywords: non tariff barriers, fisheries export, quality certificate

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipelagic state*) terluas di dunia dengan jumlah pulau sebanyak 17.504 buah dan panjang garis pantai mencapai 104.000 km. Keadaan tersebut menjadikan sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu sektor riil yang potensial di Indonesia. Sebagai satu sektor ekonomi yang memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, sektor kelautan dan perikanan pada tahun 2015 memberikan kontribusi pada PDB nasional (harga konstan) sebesar 2,30 % dari PDB total (BPS, diolah 2016).

Kegiatan ekspor dan impor merupakan bentuk dari kegiatan perdagangan bebas yang terjadi antar negara karena dengan adanya perdagangan bebas tersebut akan memberikan manfaat (*gain from trade*) bagi negara-negara yang terlibat perdagangan serta terjadi peningkatan kesejahteraan yang lebih besar bila dibandingkan jika tidak adanya perdagangan (Kindleberger dan Lindert, 1978). Hadi (2004) menyatakan bahwa perdagangan bebas juga akan meningkatkan kuantitas perdagangan dunia dan meningkatkan efisiensi ekonomi. Selain itu, Stephenson (1994) mengidentifikasi bahwa perdagangan bebas akan meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya domestik dan meningkatkan akses pasar ke negara lain. Menurut Koo dan Kennedy (2005) menyatakan bahwa hambatan non tarif (*Non Tariff Barrier/NTB*) digunakan oleh beberapa negara untuk melindungi industri yang tidak efisien. Menurut Hoekman (2012), hambatan perdagangan di negara-negara maju pada bidang manufaktur cenderung menurun sedangkan bidang pertanian masih menunjukkan peningkatan yang pada umumnya terjadi di negara-negara berkembang.

Pembangunan perikanan Indonesia merupakan suatu kegiatan ekonomi yang memiliki prospek yang semakin baik, terutama dalam meningkatkan penerimaan devisa negara melalui ekspor hasil perikanan. Komoditas perikanan yang penting yang banyak menghasilkan devisa negara adalah udang dan tuna karena banyak diekspor ke luar negeri. Setiap tahun jumlah

kuota penangkapan ikan tuna sebesar 613.000 ton atau sebesar 11% dari potensi produksi ikan tuna dunia. Data ekspor ikan tuna Indonesia ke berbagai negara pada 2009 hingga 2013 terus meningkat. Tahun 2009 ekspor tuna mencapai 132 ribu ton dengan nilai ekspor mencapai US\$ 352 juta. Pada tahun 2013 ekspor tuna mencapai 209 ribu ton dengan nilai ekspor mencapai US\$ 765 juta. Dengan kata lain ekspor tuna meningkat sebesar 13,67%/tahun dan nilai ekspornya meningkat sebesar 22,82%/tahun (BPS, 2014).

Sementara itu, volume ekspor udang pada tahun 2009-2013 juga menunjukkan tren yang positif. Artinya peningkatan volume produksi udang sejalan dengan peningkatan volume ekspor. Pada tahun 2009 ekspor udang Indonesia sebesar 151 ribu ton dengan nilai ekspor sebesar US\$ 1 Milyar dan pada tahun 2013 ekspor udang sebanyak 162 ribu ton dengan nilai ekspor sebesar US\$ 1,68 Milyar. Peningkatan ekspor udang sebesar 1,94%/tahun dan nilai ekspornya sebesar 14,39%/tahun (BPS, 2014).

Perdagangan bebas tidaklah selalu lancar namun suatu saat dapat mengalami hambatan yang disebabkan oleh kepentingan suatu negara. Salah satu hambatan yang sering dialami oleh negara berkembang adalah adanya hambatan non tarif (NTB). Adanya hambatan ini sering menyulitkan bagi negara eksportir untuk memasukkan produk dagangannya ke negara importir yang *notabene* merupakan negara maju dengan persyaratan yang begitu ketat. Dikemukakan oleh Nugroho (2007) dalam kaitannya dengan preferensi pasar global, ada masalah dalam pasar global dalam memenuhi standar internasional, yaitu permasalahan yang berkaitan dengan *Sanitary and Phytosanitary* (SPS), *technical barrier to trade* (TBT), serta tarif dan harga. Hal inilah yang dialami Indonesia dalam memenuhi permintaan impor komoditas udang oleh pasar Uni Eropa sebagai negara tujuan ekspor. Oleh sebab itu, para eksportir, dalam hal ini pengusaha perikanan Indonesia berkewajiban mempelajari dengan seksama setiap kendala atau hambatan-hambatan yang diadakan oleh Uni Eropa untuk setiap komoditas yang diimpor negara tersebut. Hambatan non tarif

sering terjadi pada komoditas ekspor perikanan Indonesia termasuk udang dan tuna. Pada tahun 2007 dan 2008 terjadi beberapa kasus penolakan terhadap komoditas tuna dan udang Indonesia karena tuna mengandung histamin sedangkan udang mengandung nitrofurantoin, nitrofurazone dan chloramphenicol. Kasus penolakan ekspor perikanan pada tahun 2014 terjadi di sembilan negara dengan 15 Kasus. Di Kanada ada empat kasus dengan komoditas tuna dan udang, Jerman ada tiga kasus dengan komoditas sardin, Korea Selatan ada dua kasus dengan komoditas kepiting, Belgia ada satu kasus dengan komoditas *swordfish*, Italia ada satu kasus dengan komoditas kakap, Prancis terjadi satu kasus dengan komoditas hiu, Inggris ada satu kasus dengan komoditas Prawn, Slovenia ada satu dengan komoditas sardin dan Spanyol ada satu kasus dengan komoditas *swordfish* (KKP, 2014).

Beranjak dari permasalahan diatas, tampak bahwa semakin banyaknya hambatan non tarif terutama dalam bentuk sertifikat ekspor dan aturan-aturan. Untuk itu, penelitian ini bertujuan memaparkan sertifikat mutu ikan yang terdiri atas berbagai jenis. Tujuan dari penelitian ini untuk memaparkan definisi, jenis dan permasalahan sertifikasi mutu sebagai hambatan non tarif pada ekspor komoditas tuna dan udang Indonesia.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di empat lokasi terpilih yaitu Jakarta, Surabaya, Lampung dan Bali. Alasan pemilihan lokasi karena lokasi-lokasi tersebut merupakan lokasi dengan jumlah ekspor yang tinggi dan merupakan pintu pelabuhan ekspor terutama untuk tuna dan udang. Penelitian dilakukan pada Maret-Oktober 2016.

Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data

Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan, atau suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode, dan lain-lain (Hasan, 2004). Penelitian ini lebih banyak

menggunakan data sekunder, namun pengumpulan data primer juga dilakukan untuk memperkaya hasil laporan terutama mengenai kasus ekspor di lapangan yang dialami oleh *stakeholder*. Data sekunder yang dikumpulkan diantaranya adalah data-data mengenai ekspor dan impor Indonesia secara time series, data statistik perikanan di lokasi penelitian dan data hambatan non tarif yang diberlakukan kepada Indonesia dari negara pengimpor. Sedangkan data primer mencakup data penolakan ekspor yang pernah dialami oleh *stakeholder* dan bagaimana cara penanganannya.

Data-data tersebut diperoleh melalui informasi dan laporan tertulis bersumber dari beberapa instansi terkait objek penelitian seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), Badan Standarisasi Nasional (BSN), Food and Agriculture Organization (FAO) dan World Trade Organization (WTO). Sedangkan untuk data primer diperoleh melalui hasil observasi dan wawancara dengan eksportir terkait persyaratan dan permasalahan ekspor yang pernah dialami.

Metode Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 1988). Metode deskriptif bertujuan untuk: (1) Mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada; (2) Mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku; (3) Membuat perbandingan atau evaluasi, dan; (4) Menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang. Pada penelitian ini analisis deskriptif digunakan untuk memaparkan kebijakan hambatan non tarif perdagangan tuna dan udang, narasi dari tabel dan grafik serta memaparkan lebih dalam mengenai kebijakan sertifikasi mutu produk perikanan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Hambatan Non Tarif Perdagangan Internasional dan Gambaran Pada Komoditas Tuna dan Udang.

Definisi Hambatan Non Tarif Perdagangan Internasional

Dalam kegiatan perdagangan internasional selain dikenal hambatan tarif terdapat juga hambatan non tarif yang dirasa lebih memberatkan bagi negara pengekspor. Hal ini karena hambatan non tarif menggunakan metode terselubung untuk memproteksi produk dalam negeri. Terdapat beberapa cara menerapkan hambatan non tarif yang dilakukan oleh suatu negara yaitu:

1. Standardisasi kualitas produk atau jasa ;
2. Pembatasan kuota impor ;
3. Prosedur atau peraturan khusus ;
4. Struktur pasar ;
5. Kondisi politik, ekonomi dan sosial budaya ;

Hambatan non tarif pada awalnya muncul akibat semakin meningkatnya kekhawatiran negara maju menghadapi persaingan dengan negara industri baru (NIC's/ *Newly Industrialized Country's*) seperti Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. NIC's berhasil menjual produk dan komoditas yang berkualitas sama dengan yang dihasilkan oleh negara maju, tetapi dengan harga yang relatif lebih murah. Faktor penyebabnya adalah upah buruh yang murah, tingkat pajak yang rendah, serta keuntungan kompetitif lainnya. Kondisi ini berdampak terhadap barang-barang dari negara maju yang kalah bersaing di pasar internasional (Muhajir, 2007).

Terdapat beberapa pendapat mengenai persyaratan atau ketentuan yang menjadi hambatan non tarif dalam perdagangan internasional. Menurut Diphayana (2014), jenis-jenis hambatan non tarif meliputi :

1. Subsidi dan tindakan balasan atas subsidi (*Subsidy and Countervailing Duties*)

Subsidi adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada pihak produsen di

dalam negeri. Bentuk bantuan bisa berupa pemberian bahan baku, penetapan harga bahan baku yang lebih rendah dari harga pasar, dan lain-lain. Subsidi menyebabkan produsen dapat menjual barang yang diproduksinya dengan harga yang lebih rendah dari yang seharusnya/tanpa subsidi (dapat menimbulkan distorsi pada pasar). Berdasarkan hal itu, banyak negara yang melakukan berbagai bentuk proteksi terhadap produk impor yang disubsidi.

2. Hambatan teknis

Agreement on Technical Barriers to Trade atau lebih dikenal dengan *standard code*, merupakan materi yang dibahas dalam *Tokyo Round*. *Standard code* merupakan ketentuan dalam rangka melindungi kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, maupun perlindungan kesehatan dan lingkungan hidup dengan membentuk sebuah sertifikasi/prosedur pengujian mutu produk, tidak dilarang dijadikan penghambat arus perdagangan. Hambatan teknis ini dipakai oleh negara maju, karena berhubungan erat dengan penguasaan teknologi dan tingginya standar hidup. Negara maju bisa menentukan satu standar dengan spesifikasi terhadap produk tertentu, dimana teknologi atau pengelolaannya belum dikuasai negara berkembang yang menghasilkan produk sejenis.

3. Hambatan Administratif

Hambatan administratif adalah kendala di kepabeanan, yang menyangkut penilaian produk impor yang masuk. Penilaian ini harus sesuai dengan kenyataan praktek dunia perdagangan dan melarang cara penentuan penilaian yang arbitrer/semena-mena dan fiktif (*custom valuation*). Penilaian yang cukup lama mengakibatkan adanya kerugian pihak importir, karena harus mengeluarkan biaya lebih atas keterlambatan waktu tertahannya barang mereka. Harga jual dari produk pun dengan adanya keterlambatan tersebut dapat berubah. Penilaian di pabean ini penting untuk menentukan tingkat bea masuk barang.

4....*Government Procurement* (Pembelian Negara)

Code on Government Procurement yang dihasilkan dalam *Tokyo Round*, dimaksudkan membuka kompetisi internasional dalam pembelian yang dilakukan suatu negara untuk pembangunan infrastruktur seperti: waduk; jalan maupun jembatan dan lain-lain; ataupun keperluan pelayanan publik. Hal tersebut dikarenakan dapat dijadikan alat mendiskriminasi produk dan pemasok dari luar negeri, serta memproteksi industri dalam negeri. Pandangan negara maju terhadap keterbukaan tender berbeda dengan negara berkembang. Negara berkembang memiliki kepentingan mempersempit masuknya tender pihak asing, karena dapat dijadikan stimulus industri dalam negeri untuk mendapatkan keuntungan.

5. Dumping dan bea masuk anti dumping

Dumping merupakan praktek sebuah perusahaan yang menjual produk ekspornya dengan harga lebih rendah, dibandingkan jika dijual di negara asalnya. Terminologi dumping yang disepakati dalam *Uruguay Round*, adalah praktek yang dilakukan perusahaan yang menjual produk ekspornya pada harga yang lebih rendah daripada harga normal produk itu. Dumping merupakan hambatan non tarif yang dapat mengganggu perdagangan internasional.

Sedangkan menurut Helwani (2002), menyatakan bahwa hambatan non tarif merupakan hambatan birokrasi yang merupakan bagian dari fungsi pemerintah mengenakan "tarif bayangan" (*shadow tariff*) pada pembelian sektor publik. Hambatan nontarif menurutnya meliputi:

1. *Customs Clearance*

Bentuk *clearance* yang harus disetujui oleh pegawai pabean dari isian formulir yang ada dengan barang yang diimpor. Pihak pabean dapat menghambat masuknya barang, dengan mempersulit proses persetujuan dan dengan tidak menunjukkan sikap keinginan bekerjasama. Pengisian formulir yang terlalu banyak dan berbelit-belit, merupakan salah satu bentuk menghambat kelancaran arus impor.

2. *Customs Valuation*

Penilaian atas barang yang diimpor, dimana aparat bea dan cukai tidak selalu mempercayai harga yang tercantum pada *invoice*. Apabila *check price* lebih tinggi daripada harga pada *invoice*, maka aparat akan mengacu pada *check price*. Apabila harga pada *invoice* lebih tinggi daripada *check price*, maka harga yang tercantum dalam *invoice* yang dipakai. Penilaian harga yang lebih tinggi ini menyebabkan pajak yang dikenakan menjadi besar.

3. *Customs Classification*

Rincian klasifikasi untuk beberapa jenis barang yang diimpor. Jenis hambatan nontarif ini, sering menimbulkan peluang untuk melakukan interpretasi klasifikasi yang berbeda-beda dan menempatkan barang pada klasifikasi yang lebih tinggi daripada yang seharusnya. Praktek tersebut dilakukan sebagai sarana membebaskan pajak yang lebih tinggi, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian.

4. *Import Licensing*

Izin istimewa yang diberikan pada importir tertentu (jumlah kasusnya tidak banyak). *Import licensing*, meniadakan adanya persaingan yang wajar dan sistem kerja yang efisien.

5. *Packaging and Labelling Regulations*

Bentuk hambatan dalam kesempurnaan pengemasan dan pemenuhan peraturan pengenaan tanda (label), bahwa barang yang diimpor atau yang diekspor telah sesuai dengan standar negara pengimpor atau standar internasional.

6. *Foreign Exchange Control*

Salah satu bentuk kontrol lalulintas devisa bagi setiap transaksi impor ekspor (ke dalam dan ke luar negeri).

7. *Consular Formalities*

Hambatan yang mengharuskan importir menunjukkan adanya surat dari konsuler dari negara, dimana barang tersebut diimpor.

Gambaran Hambatan Non Tarif Perdagangan Tuna dan Udang di Indonesia

Udang segar atau beku merupakan komoditas ekspor utama yang semakin meningkat setiap tahunnya. Data tahun 2014 menunjukkan ekspor udang dari Indonesia mencapai 191.139 ton. Komoditas ini memiliki pasar tujuan yang luas diantaranya Jepang, USA dan Uni Eropa. Dikemukakan oleh Nugroho (2007) dalam kaitannya dengan preferensi pasar global, ada masalah dalam pasar global dalam memenuhi standar internasional, yaitu permasalahan yang berkaitan dengan *Sanitary and Phytosanitary* (SPS), *technical barrier to trade* (TBT), serta tarif dan harga. Hal inilah yang dialami Indonesia dalam memenuhi permintaan impor komoditas udang oleh pasar Uni Eropa sebagai negara tujuan ekspor.

Hambatan non tarif yang dianggap cukup mempengaruhi kinerja perdagangan internasional terkait dengan TBT *agreement* yang meliputi tiga area kebijakan yaitu regulasi teknis yang bersifat wajib (*mandatory technical regulation*), standar yang bersifat sukarela (*voluntary standards*), dan kajian keselarasan (*conformance assesment*) kemudian SPS *agreement* yang menguraikan disiplin dan batas-batas tindakan yang perlu dilakukan untuk melindungi kesehatan dan kehidupan manusia, binatang, dan tumbuhan dari wabah penyakit, dan kontaminan dari negara asing (Nugroho, 2007). TBT dan SPS *agreement* ini berlaku untuk produk pangan, yang di dalamnya termasuk kategorial komoditas dan produk perikanan (udang). Hambatan non tarif yang sering dialami Indonesia pada saat melakukan ekspor ke Jepang dan USA terdiri dari 16 jenis hambatan.

Dari keenam belas jenis hambatan non tarif yang mayoritas sering dialami oleh eksportir Indonesia adalah persyaratan pengujian. Hal ini karena Jepang dan USA memang sangat menjaga kualitas makanan yang masuk dan akan dikonsumsi oleh masyarakatnya. Selain itu persyaratan sertifikasi dan label yang mendukung keberlanjutan (*ecolabeling*) juga kini menjadi isu hangat yang dilemparkan negara-negara tersebut. Untuk pengujian

dari bakteri dan sejenisnya produk Indonesia memang sudah dilakukan namun terkadang bakteri tersebut (*Salmonella*) muncul pada saat perjalanan dari Indonesia menuju negara tujuan yang disebabkan antara lain oleh *packaging* yang kurang sempurna ataupun perubahan suhu. Sedangkan hambatan non tarif yang biasa dialami oleh Indonesia dalam mengekspor komoditas udang dan tuna.

Sejak tahun 2006 dengan berorientasi pada perlindungan bagi konsumen Uni Eropa menerapkan persyaratan yang lebih banyak dan ketat bagi produk Indonesia yang masuk melalui penerbitan *Council Decision* (CD) 2006/236. Isi dari CD tersebut mewajibkan semua produk perikanan Indonesia yang masuk Uni Eropa diuji kandungan logam berat dan histamin (untuk spesies tertentu). Namun dengan diterbitkannya CD tersebut menjadi langkah awal bagi Indonesia untuk memperbaiki mutu produk perikanan yang diekspor dalam hal ini komoditas udang dan tuna.

Untuk memperlancar dan meningkatkan ekspor produk perikanan, Ditjen Perikanan Tangkap-Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengembangkan suatu Sistem Nasional Jaminan Mutu dan Keamanan Produk Perikanan secara mantap, yang mengacu kepada *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF) dan *Technical Guideline on Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP). Sistem ini telah mencapai suatu tingkat standar internasional, oleh karena sistem ini telah mendapat banyak pengakuan dari negara lain, seperti Uni Eropa (UE) yang dituangkan dalam CD 94/394/EC dengan perubahan terakhir melalui CD 2001/254/EC.

Isu yang saat ini mulai menjadi jenis hambatan non tarif baru bagi produk Indonesia yaitu persyaratan *ecolabeling*, yaitu label yang menjamin bahwa produk tersebut tidak mengganggu keberlanjutan sumber daya dan terjamin mutunya sejak dari hulu. Hal ini kemudian yang dirasa berat karena di Indonesia belum ada peraturan atau kebijakan untuk mengakomodir permasalahan ini. Selain itu untuk mendapatkan pengakuan ekolabel ini eksportir harus mengeluarkan biaya yang tidak

sedikit yang justru bisa merugikan perusahaan tersebut. Selain itu, jenis hambatan non tarif yang tercatat oleh Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Kementerian Kelautan dan Perikanan (BKIPM-KKP) menunjukkan beberapa hasil seperti ditunjukkan pada Tabel 1.

hambatan non tarif yang dialami eksportir Indonesia diakibatkan oleh kontaminasi berbagai jenis bakteri atau zat tertentu. Sedangkan untuk komoditas tuna mayoritas penyebab penolakan ekspor karena kandungan bahan metal berbahaya dan histamin.

Pada Tabel 1 terlihat bahwa secara series

Penolakan tersebut bisa dilakukan

Tabel 1. Hambatan Non Tarif Ekspor Produk Perikanan Indonesia Tahun 2011-2016.

No	Alasan Penolakan	Tahun					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Carbon Monoxide	Frozen swordfish	Frozen tuna	-	-	-	-
		Frozen Yellowfin Tuna	-	-	-	-	-
2	Zoonoses Gnathostoma	Belut	-	-	-	-	-
		Fresh grouper	-	-	-	-	-
3	Crystal Violet	Fresh Yellowfin Tuna	-	-	-	-	-
		Frozen swordfish	Frozen Moonfish	Frozen swordfish	Frozen swordfish	Frozen swordfish	Frozen swordfish
4	Heavy Metal	Frozen Fish	Frozen swordfish		Frozen Red Snapper	Frozen Big Tuna	Frozen Octopus
		Fish Fillet			Frozen blue shark	Frozen Oilfish	
		Shark fillet & Butterfish Fillet	-	-	Cooked Tiger Shrimp	-	-
5	Sodium Acid Pyrophosphate	-	-	-	-	Chilled Crabmeat	-
		-	Dried Tuna	Dried Tuna	-	-	-
6	Benzopyrene	-	-	Dried Smoked Fish	-	-	-
7	Nitrofurantol Metabolites	-	-	-	Frozen Swimming Crab	-	-
		-	-	Frozen Cobia	Sardine in Soja Oil	-	-
8	Histamine	-	-	Frozen Yellowfin Tuna	Yellowfin Tuna	-	-
		-	-	Canned Tuna	Frozen Tuna Steak	-	-
9	Antibiotik		Frozen catfish				
		Octopus	Frozen Octopus	Frozen Escolar Fillet			
10	Mikrobiologi	Fish Fillet	Squid	Frozen Octopus			
			Cuttlefish Mollusks				

Lanjutan Tabel 1

No	Alasan Penolakan	Tahun					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
11	Organoleptik	Frozen Precooked Skipjack Tuna Loin					
12	Peningkatan suhu		Frozen Tuna Loin Skipjack loins	Frozen Tuna		Canned Crab	
13	Irradiasi Decomposed			Frozen Skinless Sea Frozen Raw Baby Octopus Frozen Tuna Frozen kingfish Baby clams in water			
14	Lain-lain	Frozen escollar			Frozen shrimp	Pasterized crabmeat Frozen Octopus	

Sumber: BKIPM, 2016

dengan beberapa cara diantaranya dengan pengembalian langsung produk tersebut ke Indonesia atau penahanan sementara untuk dilakukan pengujian lebih lanjut di negara importir. Untuk kasus-kasus penolakan saat ini yang dilaporkan ke Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) adalah penolakan yang terjadi di negara mitra yaitu Uni Eropa, Korea, Cina, Kanada, Vietnam dan Rusia. Sedangkan USA dan Jepang hingga saat ini belum menjadi negara mitra sehingga biasanya penyelesaian kasus penolakan tersebut dilakukan antara perusahaan dengan pembeli tanpa campur tangan pemerintah.

Selain kasus-kasus diatas, biasanya negara tujuan ekspor mengembangkan prosedur monitoring, pengujian dan pemeriksaan yang digunakan untuk menjamin produk yang masuk telah memenuhi standar yang ditetapkan.

Apabila produk telah memenuhi persyaratan standar maka akan diberikan

sertifikat. Disamping persyaratan teknis yang wajib dipenuhi (regulasi teknis) ditetapkan pula persyaratan tambahan dari masing-masing negara yang bersifat sukarela atau *voluntary*. Sertifikat-sertifikat tambahan inilah yang menjadi salah satu hambatan non tarif yang paling berpengaruh terhadap keberlanjutan ekspor. Hal tersebut disebabkan karena biaya dan upaya yang dikeluarkan untuk memenuhi persyaratan tersebut tidak murah sehingga bisa mengganggu arus kas yang ada di perusahaan.

Jenis-jenis Sertifikat Ekspor Produk Udang dan Tuna

Terdapat banyak sekali sertifikat yang harus dimiliki sebuah produk ikan jika ingin dipasarkan di pasar internasional. Sertifikat yang dimiliki mulai dari hulu (nelayan atau pembudidaya) hingga hilir (pengolah ikan). Pasar yang sangat ketat mengenai dokumen sertifikasi adalah negara-negara Uni Eropa dan USA. Alasan yang digunakan bahwa pemerintah negara importir ingin masyarakatnya bisa

mengonsumsi makanan yang aman, namun justru banyak persyaratan dokumen ini dirasa menjadi salah satu hambatan non tarif bagi eksportir Indonesia. Sertifikat-sertifikat tersebut diantaranya adalah :

1). Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI)

Sertifikat Hasil Tangkapan (*Catch Certificate*) adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Pelabuhan Perikanan yang ditunjuk oleh Otoritas Kompeten yang menyatakan bahwa hasil tangkapan ikan bukan dari kegiatan *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing)*. Ketentuan dan tata cara mengenai Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) ini diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 28 Tahun 2009. Dalam penerbitan SHTI ini Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap merupakan *Authority Kompeten* yang ditunjuk oleh Menteri Kelautan dan Perikanan yang kemudian didelegasikan kepada Kepala Pelabuhan UPT Pusat dan UPT Daerah.

SHTI terdiri dari 3 (tiga) jenis:

- a. Lembar Awal Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan.
- b. Lembar Turunan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan.
- c. Lembar Turunan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan Yang Disederhanakan.

SHTI diterbitkan apabila terdapat permohonan dari pemilik kapal, eksportir atau Unit Pengolah Ikan (UPI). Syarat dan tata cara pengurusan serta penerbitan SHTI diantaranya yaitu :

1. Nakhoda, pemilik kapal, atau yang ditunjuk oleh pemilik kapal untuk mendapatkan SHTI-Lembar Awal, mengajukan permohonan kepada Otoritas Kompeten Lokal dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. draft SHTI-Lembar Awal;
 - b. fotokopi Identitas Pemohon;
 - c. fotokopi Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal;
 - d. fotokopi Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);

- e. laporan hasil verifikasi pendaratan ikan;
- f. SKPI (Surat Keterangan Pendaratan Ikan) bagi kapal penangkap ikan yang mendaratkan ikan hasil tangkapan pada pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum yang tidak ditetapkan sebagai Otoritas Kompeten Lokal :

2. Laporan hasil verifikasi pendaratan ikan sebagaimana diterbitkan oleh Pengawas Perikanan paling lama 2 (dua) hari setelah dilakukan verifikasi terhadap: (a). nama kapal; (b). nomor dan masa berlaku SIPI; (c). jenis alat penangkapan ikan; (d). tanggal dan daerah penangkapan; (e). pelabuhan pangkalan, dan (f). jenis dan berat ikan
3. SKPI diterbitkan oleh Kepala pelabuhan perikanan/pelabuhan umum atau pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) hari setelah dilakukan verifikasi terhadap: (a). fotokopi identitas Nakhoda, pemilik kapal, atau yang ditunjuk oleh pemilik kapal; (b). SIPI/surat pendaftaran kapal bagi kapal yang dioperasikan oleh nelayan kecil; (c). *Log book* penangkapan ikan, dan; (d). Surat Persetujuan Berlayar (SPB).
4. Otoritas Kompeten Lokal melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kesesuaian persyaratan paling lama 2 (dua) hari sejak permohonan diterima secara lengkap, dengan memperhatikan: a. hasil pengawasan kapal penangkap ikan; dan b. daftar kapal pada RFMOs bagi kapal yang beroperasi di laut lepas. Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud berupa persetujuan atau penolakan penerbitan SHTI-Lembar Awal.
5. Penanggung jawab UPI, eksportir atau yang ditunjuk untuk mendapatkan SHTI-Lembar Turunan, mengajukan permohonan kepada Otoritas Kompeten Lokal dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut: (a). fotokopi SHTI-Lembar Awal; (b). draft SHTI-Lembar Turunan; (c). fotokopi Identitas Pemohon; d. bukti pembelian ikan; (e). *packing list invoice* dari perusahaan, dan; (f). surat jalan pengiriman barang dari perusahaan.
6. Berdasarkan permohonan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Otoritas Kompeten Lokal melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kesesuaian persyaratan, paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan penerbitan SHTI-lembar turunan yang disederhanakan.

2). Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)

Sertifikat kelayakan pengolahan diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) dengan nomor PER.09/DJ-P2HP/2010. Sertifikat ini dipersyaratkan bagi para UPI (Unit Pengolahan Ikan) untuk mendukung pemasaran ikan olahannya baik di dalam maupun luar negeri. Sertifikat ini juga mendukung peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) adalah sertifikat yang diberikan kepada UPI yang telah menerapkan Cara Pengolahan Yang Baik (*Good Manufacturing Practices/ GMP*) dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Sanitasi Standar (*Standard Sanitation Operating Procedure/ SSOP*).

Persyaratan bagi setiap UPI baik perorangan maupun perusahaan untuk memperoleh SKP diatur dalam peraturan Dirjen tersebut. Persyaratannya diantaranya adalah :

- a. SKP meliputi tempat pengolahan, pengemasan dan atau penyimpanan
- b. SKP dalam satu unit manajemen dibedakan berdasarkan jenis olahan dan atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda
- c. Mempekerjakan minimal 1 (satu) orang penanggung jawab mutu yang mempunyai Sertifikat Pengolah Ikan (SPI) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal
- d. UPI harus memiliki Ijin Usaha Perikanan (IUP) yang diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan atau Gubernur atau Bupati, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan akta notaris pendirian perusahaan di bidang pengolahan
- e. Memiliki dan menerapkan Program

Persyaratan Dasar seperti Prosedur Operasional Standard Sanitasi (POSS) dan Cara Pengolahan Yang Baik (CPB)

- f. Melakukan proses produksi secara aktif, minimal 12 hari kerja dalam satu bulan.

Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) berlaku selama dua tahun dan selambat-lambatnya setelah 14 hari kerja dilakukan kunjungan lapang untuk memperbaharui SKP atau membekukan SKP apabila dari hasil kunjungan lapang tidak memenuhi persyaratan. Biaya penerbitan SKP tidak dibebankan kepada UPI atau pemohon karena sudah masuk anggaran Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

3). Sertifikat HACCP

Layanan Sertifikat HACCP adalah layanan sebagai pelaksanaan dari ketentuan mengenai sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP01./MEN/2007 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi.

Health certificate bisa diperoleh UPI jika sudah menerapkan prinsip Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) yang diterbitkan oleh Pusat Sertifikasi Mutu BKIPM, Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta yang didasari oleh PER.03/BKIPM/2011 mengenai tata cara dan persyaratan penerbitan HACCP. Sertifikat HACCP ini berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang setiap tahunnya.

Sertifikat Penerapan HACCP diklasifikasi dalam tiga tingkatan, yaitu;

- a. Tingkat A : Temuan ketidaksesuaian adalah: Kritis (Kr)=0, Serius=0 Mayor (My)=maksimal 5 dan minor (Mn)=maksimal 6
- b. Tingkat B : Temuan ketidaksesuaian adalah:Kritis (Kr)=0, Serius =maksimal 2, Mayor (My) = maksimal 10 dan Minor (Mn) = maksimal 7 (jumlah Mayor dan Serius tidak

lebih dari 10)

- c. Tingkat C : Temuan ketidaksesuaian adalah: Kritis (Kr) =0, Serius = maksimal 4, Mayor (My) = maksimal 11 dan Minor (Mn) =>7

Alur proses pengajuan Sertifikat Penerapan HACCP secara garis besar adalah :

- UPI mengajukan permohonan Sertifikasi kepada BKIPM,
- BKIPM menugaskan Inspektur Mutu untuk melakukan inspeksi ke UPI,
- UPI membuat laporan tindakan perbaikan hasil temuan ke inspektur mutu untuk di verifikasi,
- Laporan hasil verifikasi disampaikan ke BKIPM,
- BKIPM melakukan proses Sertifikasi Penerapan HACCP hingga terbit, dan menyampaikan Sertifikat tersebut secara langsung kepada pihak UPI.

4). *Health Certificate (HC)*

Sertifikat Kesehatan (*Health Certificate*) Hasil Perikanan adalah layanan sebagai pelaksanaan dari ketentuan mengenai sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP01./MEN/2007 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi. Untuk penerbitan sertifikat ini tidak dikenakan biaya karena masuk anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan masa berlaku selama 2 tahun dan setelah itu bisa dilakukan perpanjangan kembali.

Persyaratan untuk mendapatkan sertifikat kesehatan ini diantaranya adalah :

- Setiap produk perikanan yang dipasarkan untuk konsumsi manusia wajib disertai dengan sertifikat kesehatan yang diterbitkan berdasarkan hasil inspeksi dan hasil pengujian selama proses produksi atau *In-Process Inspection* (IPI);

- Sertifikat Kesehatan sebagaimana dimaksud huruf (a) hanya dapat diterbitkan terhadap hasil perikanan yang berasal dari UPI yang telah mendapatkan Sertifikat Penerapan HACCP dan atau Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang baik di Kapal;
- Sertifikat Kesehatan dimaksud huruf (b) harus sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten;
- Sertifikat Kesehatan ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan dengan dibubuhi stempel BKIPM
- Sertifikat Kesehatan harus memuat data dan informasi yang sesuai dengan produk yang disertifikasi;
- Sertifikat Kesehatan harus diterbitkan sebelum hasil perikanan didistribusikan.

Selain dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dari dalam negeri, UPI atau eksportir juga dihadapkan oleh dokumen yang diminta oleh negara importir. Dokumen—dokumen tersebut diantaranya adalah :

1). *British Retail Consortium (BRC)*

Menurut Undang-undang Keamanan Pangan Inggris tahun 1990, pedagang atau distributor, seperti halnya semua pihak yang terlibat dalam rantai pasokan pangan, memiliki hak untuk melakukan pencegahan yang tepat atas kesalahan dalam pengembangan, produksi, distribusi, promosi dan penjualan produk pangan ke konsumen. BRC adalah suatu organisasi perdagangan Inggris yang didirikan atas prakarsa pemilik usaha supermarket atau swalayan di Inggris. Organisasi ini menetapkan berbagai persyaratan bagi produsen atau pemasok produk pangan yang ingin menjual produknya di supermarket Inggris (BRC, 2005). Persyaratan harus dipenuhi oleh produsen dalam negeri, produsen luar negeri atau eksportir. Meskipun standar BRC bukanlah peraturan yang dibuat oleh pemerintah Inggris, sertifikat standar BRC tetap menjadi salah satu persyaratan kelengkapan izin resmi pengiriman produk pangan ekspor (BRC, 2001).

Standar BRC ditetapkan untuk proses penyimpanan dan distribusi, standar produk pangan, standar produk non pangan dan standar

bahan pengemas. Standar produk non pangan dapat diterapkan untuk peralatan rumah tangga, produk elektronik audio dan visual, produk kesehatan dan produk yang tersedia hanya pada musim tertentu. Aspek yang dinilai dalam standar proses penyimpanan dan distribusi mencakup pemeriksaan atau seleksi produk, pengemasan, inspeksi pengendalian kualitas dan proses pembekuan. Kriteria yang wajib dipenuhi dalam standar produk non pangan berupa sistem manajemen kualitas, standar lingkungan pabrik, pengendalian produk, pengendalian proses, sumber daya manusia, prosedur evaluasi, penilaian produk dan laporan evaluasi.

Kriteria dalam standar pengemas berupa cakupan atau lingkup, jenis organisasi, sistem manajemen bahaya dan resiko, sistem manajemen teknis, standar pabrik, pengendalian kontaminasi, sumber daya manusia, penentuan kategori resiko dan prosedur evaluasi (BRC, 2006). Kriteria yang harus dipenuhi dalam standar pangan adalah deteksi logam, penarikan produk dari distributor, validasi proses pengolahan untuk produk berkadar asam rendah, validasi proses pasteurisasi, pengendalian hama, audit internal, *traceability*, penilaian kualitas, penanganan atas keluhan konsumen dan penentuan umur simpan (BRC, 2006).

Keuntungan implementasi standar BRC bagi industri pangan adalah:

- a. BRC merupakan standar tunggal yang mengizinkan evaluasi sertifikasi dilakukan oleh pihak atau badan sertifikasi dan dapat diakreditasi menjadi standar internasional panduan ISO/IEC 65
- b. Menunjukkan komitmen organisasi untuk menghasilkan produk yang aman.
- c. Mendapat pengakuan dari komunitas pedagang Inggris.
- d. Mengurangi jumlah audit pemasok.
- e. Standar bersifat komprehensif dan mencakup semua hal yang berkaitan dengan aspek kualitas, sanitasi dan keamanan produk di industri pangan.
- f. Industri atau pemasok dapat menerapkan sistem verifikasi tunggal. Verifikasi tunggal adalah sistem evaluasi yang telah disetujui

oleh industri maupun supplier, yang memungkinkan pihak industri maupun supplier untuk melaporkan status mereka kepada pihak pedagang produk pangan.

- g. Standar juga dapat digunakan oleh industri pangan untuk memastikan bahwa pemasok bahan baku telah menerapkan teknik higiene yang baik.
- h. Tindakan koreksi atas ketidaksesuaian yang ada dapat melatih industri untuk mengembangkan sistem keamanan produk, kualitas dan higiene oleh perusahaan itu sendiri.

Masa berlaku sertifikat BRC selama 1 tahun dan bisa diperpanjang setiap tahunnya. Biaya untuk penerbitan sertifikat tersebut sebesar Rp 35.000.000 namun itu diluar biaya-biaya lainnya, seperti biaya pengujian RP 9.000.000 dan biaya pengiriman sampel untuk pengujian sebesar \$ 5.000 per container.

2). Aquaculture Stewardess Council (ASC)

ASC atau Dewan Pengurus Budidaya Perikanan didirikan oleh WWF dan IDH (*Dutch Sustainable Trade Initiative*) pada tahun 2010. Peran utama ASC, yaitu mengatur standar umum untuk budidaya perikanan yang dikembangkan oleh Forum Budidaya Perikanan WWF. Tujuan ASC adalah mentransformasi industri budidaya perikanan ke standarisasi yang lebih tinggi, melalui serangkaian program sertifikasi yang komprehensif (bertumpu pada keberlanjutan lingkungan dan sosial budidaya perikanan). Standar yang dikembangkan dan diimplementasikan berdasarkan panduan dan fitur ISEAL, yang tersertifikasi pada aspek lingkungan dan sosial.

Visi ASC menjadikan perikanan sebagai penyedia dan penyalur utama makanan umat manusia, dengan tetap meminimalisir dampak negatifnya terhadap lingkungan. Misi ASC adalah mentransformasi budidaya perikanan terhadap keberlangsungan lingkungan dan tanggung jawab sosial. Misi ini dicapai menggunakan mekanisme pasar yang efektif, serta menciptakan nilai tambah pada rantai makanan. Upaya mencapai visi dan misi ASC dilakukan dengan mempromosikan patokan atau standard menjaga keberlangsungan lingkungan, tanggung jawab

sosial, dan penghargaan terhadap budidaya terbaik melalui sertifikasi. Biaya sertifikasi untuk ASC diperkirakan mencapai \$ 10.000 dengan proses yang cukup lama kurang lebih 1 tahun.

3). **Marine Stewardess Council (MSC)*

MSC didirikan pada tahun 1997, diinisiasi oleh 2 organisasi global yakni WWF dan *Unilever*. Visi yang dianut oleh MSC yaitu meningkatkan keberlanjutan dunia perikanan. Rentang tahun 1997-1999, MSC sudah memberikan konsultasi kepada 200 peneliti, ahli lingkungan dan pemangku jabatan, dalam rangka penciptaan sistem sertifikasi global perikanan ramah lingkungan. Sertifikasi ecolabel MSC pertama kali diperkenalkan pada tahun 1999. Metodenya secara luas diterima sebagai sistem sertifikasi yang sesuai dengan panduan ecolabeling dan CCRF (*Code of Conduct for Responsible Fisheries*) dari FAO. Mayoritas *retailer* besar dengan jaringan terluas di benua Eropa dan Amerika berkomitmen, bahwa mulai 2012 hanya menerima produk yang berada dalam tahapan perbaikan menuju sertifikasi MSC.

4). *Best Aquaculture Practices (BAP)*

Sertifikasi BAP merupakan bagian dari *Global Aquaculture Alliance (GAA)*, menetapkan standar sukarela untuk fasilitas budidaya perairan yang terkait dengan : 1) tanggung jawab sosial dan lingkungan, 2).kesejahteraan satwa, 3).keselamatan makanan, dan 4). ketertelusuran. Skema ini berlaku untuk udang kecil dan udang biasa air tawar di samping ikan hasil budidaya.

Pada sertifikat BAP tercantum jumlah

bintang yang mengindikasikan tingkatan penilaian bagi perusahaan yang disebut dalam sertifikat. Tingkatan penilaian pada sertifikat BAP:

Pembiayaan dalam pengurusan sertifikat BAP hingga terbit membutuhkan biaya yang sangat banyak sebesar Rp 87.000.000 diluar biaya pengujian sebesar Rp 9.000.000. Masa berlaku yang sangat singkat hanya selama 1 tahun sementara prosesnya memakan waktu hingga 4 – 6 bulan. Hal inilah yang dirasa sangat menyulitkan dan menjadi hambatan tersendiri bagi UPI di Indonesia.

5). ISO 22000

Kata "ISO" bukanlah singkatan atau akronim. Dalam bahasa Yunani, "iso" berarti sama atau *equal* (Newslow, 2001). ISO adalah International Organization for Standardization atau organisasi standar internasional yang secara sukarela berperan dalam pengembangan standar internasional. Organisasi ini didirikan tahun 1946 dan berpusat di Genewa, Swiss. ISO memiliki anggota sebanyak 146 negara dan 110 negara diantaranya adalah negara berkembang. Salah satu tujuan ISO 33 adalah memberikan kesempatan bagi negara berkembang untuk mempelajari dan menerapkan berbagai teknologi yang sudah diterapkan oleh negara maju, sehingga industri dapat bersaing dalam perdagangan global (ISO, 2004).

ISO 22000 adalah standar internasional yang dikeluarkan oleh komite teknis organisasi standar internasional (ISO). Standar ini merupakan standar penunjuk yang menggambarkan

Tabel 2. Tingkatan Nilai pada Sertifikat *Best Aquaculture Practices (BAP)*.

No	Tingkat Nilai	Keterangan
1	4 bintang (****)	dalam prosesnya mulai dari tambak tempat bahan baku, tempat penyimpanan benih, pakan yang digunakan dan semua yang terkait dalam proses pengolahan sudah mendapatkan sertifikat BAP
2	3 bintang (***)	dari keempat point penilaian diatas terdapat salah satu yang masih gagal atau belum diterapkan
3	2 bintang (**)	dalam proses produksi hanya tempat pengolahan dan tambaknya yang sudah bersertifikat
4	1 bintang (*)	dalam proses produksi hanya tempat pengolahannya saja yang sudah tersertifikasi

persyaratan sebuah sistem manajemen keamanan pangan. Standar ini bertujuan:

- a. mengharmoniskan persyaratan sistem manajemen keamanan pangan untuk usaha yang terkait dalam rantai pangan.
- b. memudahkan kerja badan usaha karena hanya menggunakan satu standar, sekaligus memudahkan tugas badan sertifikasi.
- c. memastikan standar dapat diperoleh dengan mudah di seluruh dunia, tanpa adanya monopoli oleh satu badan sertifikasi khusus.

Komitmen yang terjalin dari pihak industri dan lembaga atau asosiasi terkait diharapkan dapat membuat ISO 22000 menggantikan standar BRC dan International Food Standar (IFS) dalam kurun waktu lima tahun. Saat ini, standar BRC dan IFS sangat berpengaruh terhadap perdagangan di negara Prancis, Denmark dan Inggris (Dietz, 2006). Keuntungan penerapan ISO 22000 bagi perdagangan dunia adalah :

- a. Semua organisasi yang telah memenuhi ISO 22000 memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing satu sama lain di kancah perdagangan bebas maupun perdagangan regional.
- b. Adanya standar nasional maupun regional yang beragam dapat menciptakan batasan teknis terhadap perdagangan, meskipun selalu ada persetujuan politik untuk menangani kuota import.
- c. Standar internasional memiliki arti teknis yang penting dimana persetujuan perdagangan politis dapat dipraktikkan.

Keuntungan penerapan ISO 22000 secara keseluruhan:

- a. Berlaku di dunia internasional
- b. Harmonisasi standar nasional
- c. Menyediakan referensi bagi keseluruhan rantai pangan
- d. Menjadi standar yang dapat diaudit dan memiliki persyaratan yang jelas
- e. Mengisi senggang yang timbul antara penerapan ISO 9001 dan HACCP.

Permasalahan dalam Proses Sertifikasi

Ekspor

Untuk mendapatkan sertifikat-sertifikat tersebut tidak mudah dan tidak murah dikarenakan banyaknya ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan masing-masing sertifikat. Bahkan para eksportir pun tidak sedikit yang menolak untuk mengurus sertifikat tersebut karena tidak mendapatkan jaminan bahwa pemilik sertifikasi bisa mendapatkan harga yang lebih tinggi. Namun di sisi lain, jika sertifikat-sertifikat sukarela tersebut tidak dimiliki maka menutup peluang perusahaan untuk mengirim barang ke negara pengimpor. Permasalahan tersebut merupakan sebagian dari banyaknya permasalahan yang dialami pengusaha saat ingin mengurus sertifikat eksportnya. Permasalahan tersebut diantaranya adalah :

1. Birokrasi yang masih berbelit-belit untuk mengurus satu sertifikat sehingga membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan berakibat pada jadwal ikan yang semakin lama untuk dikirim sehingga kualitas ikan sudah berubah.
2. Biaya pengurusan sertifikat yang mahal dan semua harus ditanggung stakeholder tanpa ada bantuan atau subsidi dari Pemerintah.
3. Informasi yang kurang lengkap mengenai prosedur dan persyaratan terkait kegiatan sertifikasi produk olahan.
4. Tidak ada jaminan baik dari negara pengimpor maupun Pemerintah bahwa eksportir yang memiliki sertifikasi lengkap bisa memperoleh harga premium namun tetap saja sama dengan harga yang ada .

Dari sembilan sertifikat yang dibahas pada sub bab sebelumnya ada empat sertifikat yang sebenarnya menjadi persyaratan wajib bagi para eksportir yaitu SHTI, HC, SKP dan HACCP. Setiap eksportir yang ingin mengirim produk olahannya ke luar negeri wajib memiliki sertifikat-sertifikat tersebut. Namun untuk mengikuti perkembangan dunia perdagangan internasional, para eksportir sudah mulai memiliki satu persatu sertifikat-sertifikat agar produk mereka bisa masuk ke negara pengimpor. Sertifikat pendukung tersebut diantaranya Best Aquaculture Practices (BAP), MSC, ASC, BRC dan ISO 22000. Bahkan sejak dua tahun terakhir beberapa sertifikat pendukung

seperti Aquaculture Stewardess Council (ASC) dan Marine Aquaculture Stewardess (MSC) menjadi keuntungan lebih bagi para eksportir pemiliknya untuk mendapatkan peluang pasar yang lebih banyak dan luas. Namun sayang keinginan para eksportir untuk mengurus berbagai macam sertifikat tersebut kurang didukung oleh Pemerintah bahkan terkesan membiarkan dan tutup mata.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kesimpulan

Hambatan non tarif menjadi salah satu permasalahan yang menggelayuti eksportir tuna dan udang yang ada di Indonesia. Hambatan non tarif ini terdiri atas berbagai bentuk biasanya berupa ketentuan, perjanjian atau persyaratan. Salah satu jenis hambatan non tarif yang sedang menjadi topik bahasan panjang adalah sertifikat mutu. Sertifikat mutu adalah dokumen sertifikat yang menjamin kualitas ikan yang diekspor bebas dari bakteri, penyakit dan hal buruk lainnya. Di beberapa negara pengimpor seperti USA dan UE sudah menerapkan berbagai macam sertifikat mutu dengan alasan untuk menjamin keamanan pangan bagi masyarakat di negaranya.

Di Indonesia, sebenarnya dokumen sertifikat yang wajib dimiliki oleh para pengolah dan eksportir hanya ada 4 (empat) yaitu Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP), HC, SHTI dan HACCP. Namun untuk mengikuti perkembangan dunia perdagangan internasional, para eksportir sudah mulai memiliki satu persatu sertifikat-sertifikat agar produk mereka bisa masuk ke negara pengimpor. Sertifikat pendukung tersebut diantaranya Best Aquaculture Practices (BAP), MSC, ASC, BRC dan ISO 22000. Namun sayang keinginan para eksportir untuk mengurus berbagai macam sertifikat tersebut kurang didukung oleh Pemerintah bahkan terkesan membiarkan.

Padahal banyaknya dokumen sertifikat mutu yang harus dilengkapi menghabiskan biaya dan waktu yang tidak sedikit. Tingginya biaya dan lamanya waktu disertai kurangnya bantuan atau perhatian pemerintah akan hal ini membuat para eksportir mengalami kesulitan yang sangat

mengancam. Jenis hambatan non tarif ini bila dibiarkan dan tidak disertai dengan perjanjian lebih lanjut bisa menjadi hambatan yang mengancam keberlanjutan usaha pengolahan di Indonesia ke depannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tulisan ini merupakan bagian dari kegiatan penelitian Dampak Hambatan Non Tarif yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Penanggung Jawab Pelaksana Output dan rekan-rekan peneliti kegiatan tersebut. Tidak lupa ucapan terima kasih juga disampaikan kepada rekan-rekan Astuin yang telah banyak membantu penyusunan tulisan ini hingga selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM). 2016. Rencana Strategis 2015-2019. Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. KKP. Jakarta
- Bristish Retail Consortium (BRC). 2001. Definitions about British Retail Consortium. www.brc.org.uk.
- Dietz, M. 2006. The New Management Systems for Food Safety. www.Procert.com.
- Diphayana, W. 2014. Hambatan Non Tarif Dalam Perdagangan. <http://wahonodiphayana.blogspot.co.id/2014/12/hambatan-non-tarif-dalam-perdagangan.html>. Tanggal diunduh: 1 November 2016
- Hady, H. 2004. Teori dan Kebijakan Perdagangan Internasional Buku Kesatu. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hasan, I. 2004. Analisis Penelitian Kualitatif. Jakarta : Erlangga.
- Helwani, R. H. 2002. Ekonomi Internasional & Globalisasi Ekonomi. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hoekman, B. and A. Mattoo. *Service Trade and Growth*. International Journal of Services Technology and Management volume 17 Issues 2-4 pp 232.250.
- Kindleberger, C. P. and P. H. Lindert. 1978. *International Economics*. Six Edition, Richard D. Irwin, Inc, Homewood, Illinois.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). 2015.

- Analisis Data Pokok Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pusat Data Statistik dan Informasi KKP. Jakarta.
- Koo, W. W., P. L. Kennedy. 2005. International Trade and Agriculture. United Kingdom: Blackwell Publishing.
- Muhajir, M. 2007. Non tarif Barreiers dalam Perdagangan Internasional. <http://kataloghukum.blogspot.co.id/2007/12/non-tarif-barriers-dalam-perdagangan.html>. Tanggal diunduh: 15 November 2016
- Nazir, M. 1988. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Newslow, D. L. 2001. The ISO 9000 Quality System: Applications in Food and Technology.
- Nugroho, A. 2007. Peran dan Kedudukan Indonesia dalam Peta DiplomasiPemasaran Produk Ekspor Hasil Perikanan Indonesia di Pasar Global.Jakarta: Departemen Perikanan dan Kelautan.
- Stephenson, S. M. 1994. ASEAN and The Multilateral Trading System. Law and Policy of International Business.
- Undang-Undang, Peraturan dan Keputusan
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.28/MEN/2009, tentang Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.19/MEN/2010, tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.01/MEN/2007, tentang Persyaratan Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi.
- Peraturan Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Nomor 09/DJ-P2HP/2010, tentang Persyaratan, Tata Penerbitan Bentuk dan Format SKP.
- Peraturan Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomo PER.03/BKIPM/2011, tentang Tata cara dan persyaratan penerbitan HACCP.

**PERUBAHAN MATA PENCAHARIAN DARI PETANI KE NELAYAN
PERIKANAN TANGKAP LAUT DI DESA KANIGORO
KECAMATAN SAPTOSARI, KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

***Transformation livelihood: From Farmers To Fishermen on
The Southern Coast, Gunungkidul Regency***

Budi Wardono

Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Gedung Balitbang KP I Lt. 4

Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara

Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924r 2015

*e-mail: budi_ward@yahoo.com

Diterima 12 April 2014- Disetujui 25 Mei 2015

ABSTRAK

Mata pencaharian masyarakat di Desa Kanigoro, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul mengalami perubahan. Semula, sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, namun kemudian, sejak tahun 1980-an mulai beralih sebagai nelayan perikanan tangkap laut. Perubahan tersebut terjadi sejak masyarakat mendapat pelatihan usaha perikanan tangkap laut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perubahan mata pencaharian dari petani menjadi nelayan perikanan tangkap laut. Penelitian dilakukan pada bulan Februari sampai dengan Mei 2014, di Desa Kanigoro, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul. Responden terdiri dari nelayan, Anak Buah Kapal (ABK), pedagang, penyedia bahan bakar minyak (BBM) dan jasa modal usaha (*juragan*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mata pencaharian sebagai nelayan perikanan tangkap laut memberikan kontribusi utama sebagai sumber pendapatan keluarga. Namun demikian nelayan tidak meninggalkan kegiatan pertanian dengan alasan untuk memanfaatkan waktu luang setelah bekerja sebagai nelayan pada saat cuaca buruk. Perubahan mata pencaharian dari petani menjadi nelayan membawa konsekuensi perubahan pola kehidupan masyarakat pelaku usaha yang mempunyai pengaruh positif dan negatif. Untuk itu, pemerintah perlu memperhatikan aspek perubahan mata pencaharian tersebut dalam perumusan kebijakn terkait dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan kecil yang telah mengalami perubahan mata pencaharian (dari petani ke nelayan perikanan tangkap).

Kata Kunci: mata pencaharian utama, alih profesi, kontribusi, transformasi, nelayan

ABSTRACT

Have been changes in the livelihoods of communities along the southern coast of Gunungkidul Regency. Originally, mostly subsistence farmers, but since the 1980s began to change their profession as a fisherman. The job changes have occurred since the community received training fishermen in TPI Baron. Purpose of research to transform the work of farmers become fishermen, and the role of capture fisheries as the main source of livelihood. Research conducted from February to May 2014, in Desa Kanigoro, Kanigoro, District Saptosari, Gunungkidul Regency. Respondents consisted of fishermen and crew, traders, fuel providers, venture capital services (middlemen). The analysis showed that fishermen work in the location of current research provides a major contribution as a source of family income. However, the fishermen did not leave the farm. Agricultural activities are still carried out by fishermen to use their spare time after work so fishermen and during bad weather. Farming activities, serve as a source of savings that will be used for education or as a source of savings for capital. Revenue from livestock used for new investments is to improve / buy a boat, buy machinery and fishing gear.

Keywords: main livelihood, over the profession, contributions, transformation, fishers

PENDAHULUAN

Masyarakat merupakan suatu sistem yang senantiasa mengalami perubahan seiring dengan berjalannya waktu. Salah satu perubahan tersebut adalah terkait dengan mata pencaharian yang dimiliki Masyarakat desa, seperti dari mata pencaharian petani ke nelayan perikanan tangkap laut.

Masyarakat Desa Kanigoro, Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul merupakan masyarakat yang telah mengalami perubahan mata pencaharian dari petani ke nelayan. Perubahan mata pencaharian di desa ini dimulai sekitar tahun 80-an, bermula dari nelayan yang mendapat pelatihan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Baron. Sejak saat itu, masyarakat desa tersebut mulai menangkap ikan dengan menggunakan perahu kayu, baru kemudian beralih dengan menggunakan perahu fiber yang berasal dari Kebumen. Kehidupan sebagai nelayan di Desa Kanigoro sudah dilakukan oleh masyarakat setempat, semula kegiatan nelayan belum menjadi mata pencaharian utama, khususnya yang dilakukan dengan menggunakan unit penangkapan skala kecil (nelayan kecil).

Usaha perikanan tangkap skala kecil, pada umumnya memiliki karakteristik unik yang berbeda dengan usaha di sektor lain. Kegiatan perikanan tangkap skala kecil penuh dengan tantangan serta dihadapkan pada risiko dan ketidakpastian, di lain pihak kontribusi perikanan skala kecil dalam pembangunan nasional kurang diperhitungkan. Secara umum permasalahan klasik nelayan kecil yaitu terbatasnya armada dan alat tangkap, kurangnya modal, manajemen usaha, terbatasnya akses informasi dan pasar (NCAP, 2004). Untuk itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauhmana perubahan mata pencaharian dari petani menjadi nelayan perikanan tangkap laut.

METODE PENELITIAN

Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada bulan Februari sampai dengan Mei 2014. Lokasi penelitian di

TPI Ngrenehan, Desa Kanigoro, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul. Kelompok nelayan yang menjadi responden adalah nelayan pemilik, dan ABK, pedagang, penyedia BBM, penyedia jasa modal usaha (*juragan*).

Jenis dan Sumber Data

Responden dalam penelitian ini adalah para nelayan yang menggunakan TPI Ngrenehan sebagai tempat untuk pendaratan ikan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer didukung dengan data sekunder yang terkait dengan usaha perikanan di lokasi penelitian. Data primer dikumpulkan dari responden yaitu nelayan yang dibagi nelayan penuh dan nelayan sambilan, dan ABK, pedagang, penyedia BBM, penyedia jasa modal usaha (*juragan*).

Data yang dikumpulkan adalah informasi perkembangan usaha dan sejarah perubahan usaha dari pertanian ke usaha penangkapan. Data tentang usaha penangkapan dari sarana dan prasarana yang digunakan, biaya operasional dan pendapatan bagi hasil usaha penangkapan. Data primer diperoleh dari pengamatan langsung dan wawancara mendalam, sedangkan data skunder diperoleh dari berbagai literatur, atau hasil dokumentasi seperti data, gambar-gambar dan foto-foto.

Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk memberikan gambaran mengenai kehidupan masyarakat petani-nelayan di TPI Ngrenehan, Desa Kanigoro, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul. Informasi diperoleh dari petani-nelayan dan beberapa individu yang terlibat dalam usaha penangkapan ikan, seperti juragan kapal, pengelola TPI, dan pemilik warung. Analisis diskriptif meliputi analisis mata pencaharian masyarakat pesisir yang menganalisis pola-pola kehidupan dan mata pencaharian masyarakat pesisir dan sejarah perubahan mata pencaharian. Analisis kuantitatif dilakukan untuk mengetahui skema bagi hasil usaha penangkapan ikan, saluran dan analisis usaha penangkapan nelayan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mata Pencaharian Masyarakat Pesisir

Kehidupan sebagai nelayan Desa Kanigoro, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul telah dilakukan oleh masyarakat setempat, semula kegiatan nelayan belum menjadi mata pencaharian utama. Berdasarkan hasil survey dan observasi lapang diketahui bahwa alternatif mata pencaharian masyarakat di Desa Kanigoro, Kecamatan Saptosari, menggambarkan daerah cukup variatif antara lain sebagai nelayan, petani tanaman pangan, peternakan, pedagang, buruh bangunan dan lain sebagainya. Mata pencaharian pertanian dan peternakan merupakan mata pencaharian utama masyarakat setempat sebelum tahun 2002. Namun sejak tahun 2002 hingga sekarang proporsi mata pencaharian sebagai nelayan lebih besar dan merupakan mata pencaharian utama. Sementara untuk pertanian dan peternakan sebagai pekerjaan sampingan untuk tabungan nelayan. Sampai saat ini ada sebanyak 60-70 perahu nelayan dengan jumlah nelayan total sebanyak 210 orang dengan kategori sebagai nelayan perikanan tangkap skala kecil. Jumlah Kapal nelayan di Desa Kanigoro sebanyak 70 unit berupa kapal motor katinting dengan alat tangkap yang teridentifikasi digunakan oleh nelayan Desa Kanigoro antara lain: pancing rawai, jaring bawal, jaring tongkol, jaring lobster, dan jaring millennium. Jenis ikan yang tertangkap antara lain bawal, tongkol, sidat, kakap, layur. Alat tangkap yang digunakan oleh nelayan dalam melaut disesuaikan dengan musim. Nelayan pada awal tahun biasanya menggunakan jaring lobster, kemudian pada bulan Juni dan Juli menggunakan jaring tongkol, dan jaring bawal.

Sesuai dengan pandangan *Food Agricultural Organization* (FAO) tentang perikanan skala kecil. Perikanan skala kecil dapat secara luas dicirikan sebagai sektor dinamis dan berkembang yang mempekerjakan tenaga kerja secara intensif, pengolahan dan distribusi teknologi untuk mengeksploitasi sumber daya perikanan. Perikanan skala kecil sebagai sumber pendapatan bagi jutaan orang di seluruh dunia, namun perikanan tangkap skala kecil umumnya kurang didokumentasikan

dan dampaknya tidak dipahami dengan baik. Peningkatan dokumentasi perikanan tangkap skala kecil diperlukan untuk mengukur *trend* global, mengidentifikasi ancaman terhadap keberlanjutan usaha, dan menilai pilihan manajemen (Lunn and Dearden, 2006).

Nelayan-nelayan tersebut tergabung dalam kelompok “Ngupayo Mina”. Jenis perahu yang digunakan adalah Perahu Motor Tempel (PMT) Jukung, dengan spesifikasi panjang 9 meter, lebar 1,5 meter, menggunakan mesin tempel dan peralatan tangkap menggunakan jaring insang hanyut. Daerah penangkapan nelayan Ngrenehan masih berkisar sekitar pantai sampai sejauh 1–6 mil dari bibir pantai. Nelayan Ngrenehan menangkap ikan dari malam dan kembali ke pangkalan ikan pagi atau siang hari. Berbagai jenis ikan yang ditangkap adalah ikan layur, ikan tongkol dan beberapa jenis ikan dasar. Desa Kanigoro memiliki sebuah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dengan nama Ngrenehan. TPI ini berdiri tahun 2005 dengan kapasitas lelang per hari kurang lebih sebanyak 350 Kg ikan atau kurang lebih 10,7 ton per bulan. Ketersediaan tenaga listrik di Desa Kanigoro dengan dua sumber; satu dengan tenaga surya tetapi sudah rusak dan yang ke dua dengan Genset 2000 watt. Untuk air bersih dirasa cukup dengan sumber air dari PDAM. Untuk penyimpanan ikan Desa Kanigoro memiliki 3 *Coolbox* dengan spesifikasi 1 unit kapasitas 8 kwintal dan yang 2 unit kapasitas 2 kwintal liter.

Masyarakat nelayandi Desa Kanigoro memiliki ragam jenis mata pencaharian yang didominasi oleh mata pencaharian sebagai nelayan tetap dan tambahan. Secara rinci, hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.

Selain kelompok nelayan di Desa Kanigoro juga terdapat kelompok pengolah dan pedagang Ikan. Kelompok Pengolah dan Pedagang Ikan “Mino Lestari” memiliki 60 anggota. Komoditas yang dihasilkan antara lain ikan asin dengan kapasitas produksi 4kg/hari, *Crispy* 10 kg/hari dan agar-agar tepung. Usaha lain yang dimiliki Kelompok Usaha Bersama (KUB) Mino Lestari adalah dibidang pemasaran dan kuliner/warung.

Tabel 1. Jenis Pekerjaan dan Jumlah Nelayan di Desa Kanigoro, Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul.

No.	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah (orang)
1	Nelayan Tetap	195
2	Nelayan Sambilan Utama	175
3	Nelayan Sambilan Tambahan	122
4	Nelayan Andon	50
5	Pengolahan	7
6	Pemasaran	9
7	Bakul/pedagang	12

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Gunungkidul, 2014

Aktivitas penangkapan yang dilakukan oleh nelayan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat setempat. Ikan hasil tangkapan nelayan sebagian di perdagangkan oleh para pedagang setempat dan sebagian di jual ke pedagang pengumpul, yang selanjutnya dijual ke pedagang luar kota. Perikanan tangkap skala kecil di Desa Kanigoro mempunyai arti penting bagi perekonomian lokal, tidak hanya mencakup tenaga kerja yang diciptakan dalam sektor itu sendiri, tetapi juga terhadap sektor lain yang diciptakan di sektor-sektor terkait lainnya. Hal ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bene (2006) bahwa perikanan skala kecil mampu memberikan kontribusi pada jenis-jenis mata pencaharian lainnya yang memiliki keterkaitan erat.

Salah satu permasalahan untuk memperhitungkan peranan perikanan skala kecil adalah terkait pencatatan yang masih belum memenuhi standar. Hasil tersebut sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Zeller *et al.* (2007) bahwa perikanan tangkap skala kecil dan perikanan non-komersial hasil tangkapannya jarang diperhitungkan dalam statistik resmi. Lebih lanjut Zeller *et al.* (2007) menjelaskan bahwa jeleknya masalah pencatatan tersebut menyebabkan kontribusi perikanan skala kecil terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sering tidak dipertimbangkan. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi perikanan skala kecil terhadap PDB memainkan peran yang lebih signifikan dalam statistik nasional sebagai kontributor terhadap PDB dari pada yang diasumsikan. Hasil ini memberikan tantangan bagaimana perikanan tangkap skala kecil kembali mendapat prioritas dalam pembangunan perikanan.

Nelayan skala kecil di Desa Kanigoro mirip dengan karakteristik nelayan kecil yang dikemukakan oleh Guyader *et al.* (2013), yang bercirikan: (a) kapal-kapal kecil yang daya jelajahnya hanya di wilayah pesisir; (b) memiliki awak kapal (ABK) lebih sedikit (tetapi secara total besar); (c) sebagian besar menggunakan alat tangkap sederhana; (d) menggunakan pendekatan multi-tujuan; (e) memiliki produktifitas yang lebih rendah; (f) memiliki jumlah investasi, modal, omset dan biaya yang lebih rendah (termasuk hak-hak nelayan); (g) memiliki konsumsi bahan bakar yang lebih rendah, dan; (h) ketergantungan pada subsidi lebih rendah. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian di Malaysia menunjukkan, bahwa hasil tangkapan perikanan skala kecil *undervalued* hingga 225% sejak awal 1990-an, nilai perikanan tangkap skala kecil terhitung mungkin tiga kali lipat kontribusinya perikanan terhadap PDB (Teh and Sumaila, 2011).

Perubahan Mata Pencaharian dari Petani ke Nelayan

Perubahan struktur usaha yang terjadi pada masyarakat Desa Kanigoro pada umumnya dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi yaitu keinginan mempunyai kondisi ekonomi yang lebih baik. Pekerjaan sektor pertanian tidak mampu lagi memberikan pendapatan yang memadai untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Faktor eksternal yang dominan adalah masuknya introduksi teknologi penangkapan yang diterima oleh masyarakat pesisir dari nelayan luar daerah. Kedua faktor tersebut merupakan faktor utama mengapa masyarakat Ngrenahan bertransformasi menjadi

nelayan. Hubungan dengan berbagai pihak di luar daerah menyebabkan terjadinya perubahan orientasi masyarakat. Tuntutan perubahan tersebut menyebabkan perubahan paradigma hubungan masyarakat setempat.

Proses perubahan sosial termasuk yang terjadi dalam hal mata pencaharian dapat dikatakan menghasilkan kemajuan fisik dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Namun pada saat yang hampir bersamaan melahirkan polarisasi yaitu orang yang kaya berjumlah sedikit di satu sisi, dan orang yang melarat berjumlah banyak di sisi lain (Wertheim dalam Pranadji dan Hastuti, 2004). Hal tersebut merujuk tingkat penghasilan pemilik kapal yang sebagian merangkap sebagai tengkulak. Menurut Pranadji dan Hastuti (2004), dalam arti luas perubahan sosial mempunyai arti mencakup bukan saja perubahan pada bentuk luar, namun juga pada hakikat atau sifat dasar, fungsi, dan struktur atau karakteristik perekonomian suatu masyarakat.

Perubahan mata pencaharian didorong oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Perubahan tersebut pada prosesnya akan menyebabkan terjadinya perubahan pada berbagai sendi kehidupan masyarakat. Masyarakat petani yang biasanya lebih tertutup kemudian berubah menjadi masyarakat nelayan yang banyak bersentuhan dengan budaya luar karena perubahan teknologi dan budaya.

Faktor internal dalam masyarakat meliputi, kepemilikan tanah semakin sempit, tekanan ekonomi, serta rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat. Sementara faktor eksternal disebabkan oleh adanya pengaruh-pengaruh dari luar melalui *agent of change*. Kondisi geografis Desa Kanigoro merupakan daerah kering yang berbukit-bukit karang berada di tepi pantai. Di samping itu, kepemilikan lahan yang semakin sempit menyebabkan lahan tegalan yang tersedia hanya bisa ditanami setahun sekali, sehingga hasilnya hanya mampu memenuhi kebutuhan subsistensi saja. Perubahan mata pencaharian menjadi nelayan didorong oleh letak daerahnya yang berada di tepi pantai, dan kedatangan nelayan dari luar daerah untuk memberikan pelatihan kenelayanan. Faktor

tersebut merupakan faktor pendorong sebagian masyarakat berprofesi menjadi nelayan.

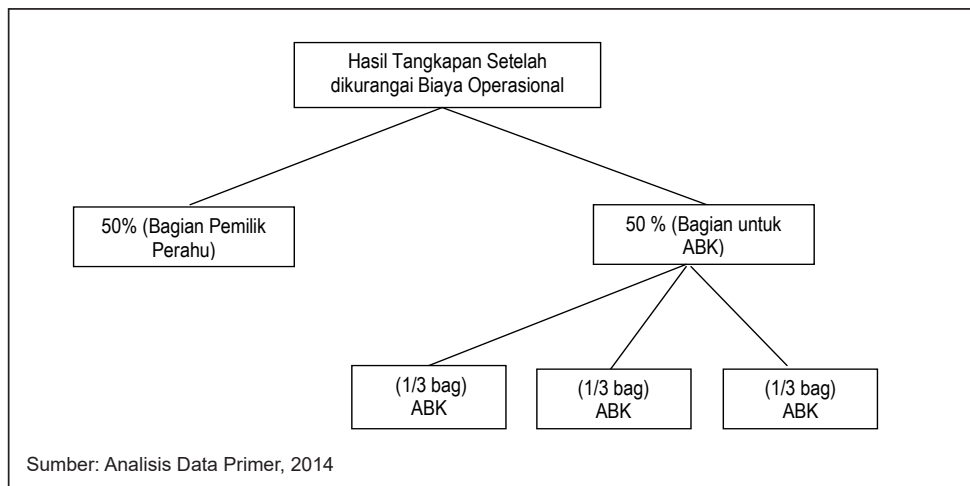
Perubahan mata pencaharian dari petani ke nelayan berdampak terhadap kehidupan ekonomi dan sosial-budaya nelayan. Setelah menjadi nelayan, pendapatannya semakin meningkat. Pola-pola kehidupan sosial-budaya juga banyak mengalami perubahan. Walaupun demikian, tidak semua nelayan melakukan hal sama. Dalam rumah tangga nelayan terdapat mekanisme internal tentang "pengendalian diri" dalam bentuk menyisihkan sebagian pendapatan nelayan untuk ditabung dan menginvestasikan-nya dalam bentuk barang.

Usaha penangkapan oleh nelayan di Desa Kanigoro biasanya dilakukan dengan tiga orang satu orang sebagai tekong (pemilik kapal sekaligus sebagai nahkoda) dan 2 orang sebagai ABK. Nelayan berangkat pada malam hari dan mendarat kembali pada pagi hari. Sistem penangkapan *one day fishing* ini merupakan model penangkapan dengan menyesuaikan jenis dan ukuran kapal yang digunakan. Nelayan biasanya menggunakan alat tangkap sesuai dengan jenis ikan sasaran yang akan ditangkap. Ada beberapa alat tangkap yang digunakan yaitu pancing atau jaring insang.

Sistem bagi hasil nelayan menggunakan skema pembagian sesuai dengan jumlah ABK dan pemilik kapal. Penjualan hasil tangkapan kemudian dikurangi dengan biaya operasional yaitu BBM dan perbekalan, sisanya dibagi menjadi 3 bagian (Gambar 1.)

Hasil tangkapan nelayan didistribusikan ke Desa Kanigoro, retribusi yang dibayar nelayan sebesar 5% (2% untuk TPI dan 3% akan kembali ke nelayan yang diberikan akhir tahun) Sementara pengepul membayar retribusi ke TPI sebesar 3%. Ikan yang telah masuk ke TPI didistribusikan ke pengepul dan bakul.

Pengepul ikan biasanya akan mendistribusikan ikan ke pedagang dari Cilacap, Jakarta dan Semarang. Sementara dari bakul, ikan didistribusikan ke pasar-pasar ikan lokal. Sistem pembayaran dilakukan secara tunai.



Gambar 1. Skema Bagi Hasil Tangkapan Ikan di Desa Kanigoro, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul.

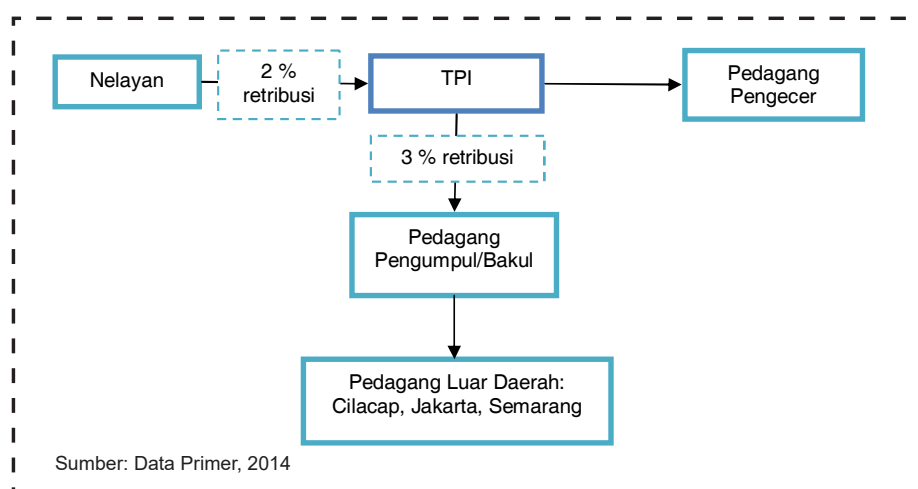
Harga ikan biasanya ditentukan oleh musim, dimana peranan bakul dalam menentukan harga lebih dominan. Harga ikan akan berfluktuasi sesuai dengan volume ikan hasil tangkapan.

Sistem distribusi ikan dapat dilihat seperti pada Gambar 2. Bagan pada Gambar 2 menunjukkan bagaimana sistem perdagangan ikan hasil tangkapan nelayan di Desa Kanigoro.

Usaha perikanan skala kecil selain untuk memenuhi kebutuhan sendiri juga diperdagangkan sebagai sumber pendapatan nelayan. Perikanan skala kecil juga dilihat dari kapasitas teknologi (alat tangkap dan armada), biasanya untuk pemenuhan sendiri (*subsisten*) yang sering disebut sebagai

peasant fisher, yaitu karena alokasi hasil tangkapan lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dari pada yang diinvestasikan kembali untuk pengembangan usaha (Satria, 2009).

Usaha penangkapan oleh nelayan dilakukan dengan ABK sebanyak 3 orang. Cara bagi hasil mengikuti skema seperti Gambar 1. Pada kondisi normal pendapat rata-rata nelayan cukup tinggi Rp. 129.167/hari, namun pendapatan ini tidak selalu stabil. Dinamika pendapatan yang fluktuatif menuntut nelayan untuk dapat menyisihkan sebagian pendapatannya untuk digunakan pada saat kondisi cuaca buruk yang menyebabkan nelayan tidak dapat melaut.



Gambar 2. Bagan Alir Distribusi Ikan Hasil Tangkapan Nelayan di Desa Kanigoro, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul.

Tabel 2. Analisis Usaha Penangkapan Ikan Nelayan Desa Kanigoro.

Biaya Investasi				
Uraian	Volume	Satuan	Harga (Rp)	Total (Rp)
1. Perahu/ Jukung	1	unit	14,000,000	14.000.000
2. Alat Tangkap:				
- Jaring Bawal	25	pase	145,000	3.625.000
- Jaring jaring tongkol	35	pase	185,000	6.475.000
- Jaring jaring lobster	50	pase	185,000	9.250.000
3. Mesin	1	unit	20,000,000	20.000.000
				Biaya Operasional
BBM (Bensin campur oli)	20	liter	8,000	160.000
Perbekalan	3	pak	10,000	30.000
Retribusi		2 persen	35,000	35.000
Total biaya operasional				225.000
Hasil Produksi				
Rata 2 Pendapatan perhari	50	Kg	20,000	1.000.000
Keuntungan Per hari (kondisi Normal)				775.000
Pembagian: 50 : 50 %	Pemilik mendapat 50 % dan ABK (3 orang) 50%			387.500
ABK 3	Dibagi 3 bagian setiap ABK mendapat bagian			129.167

Sumber: Data Primer, 2014

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kesimpulan

Perubahan mata pencaharian masyarakat desa di lokasi hasil penelitian adalah merupakan perubahan dari masyarakat pertanian yang lebih tertutup menjadi masyarakat nelayan yang lebih terbuka membawa konsekuensi terhadap perubahan kehidupan ekonomi dan sosial nelayan. Perubahan mata pencaharian meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan, di sisi lain terjadi pengaruh negatif terhadap perubahan perilaku nelayan. Namun pengaruh negatif tersebut dapat diminimalisir sebagai akibat masih adanya pengaruh sistem usaha pertanian. Pekerjaan sebagai nelayan bisa menjadi sumber pendapatan utama keluarga, disamping pendapatan tambahan lainnya dari kegiatan pertanian, beternak dan berkebun. Pendapatan dari beternak dan berkebun biasanya dijadikan sumber investasi untuk menyekolahkan anak atau untuk investasi baru/tambahan sebagai nelayan.

Implikasi Kebijakan

Perubahan mata pencaharian dari petani menjadi nelayan membawa konsekuensi perubahan pola kehidupan masyarakat pelaku usaha yang mempunyai pengaruh positif dan negatif. Kebijakan pembangunan perikanan

memerlukan perhatian yang lebih besar dari pengambil kebijakan terkait dengan program-program pengembangan usaha perikanan tangkap skala kecil terutama untuk daerah-daerah yang masih relatif baru mengenal budaya nelayan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak atas keterlibatan dan bantuan baik secara material maupun non material sehingga karya tulis ini dapat diselesaikan dengan baik. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada (1). Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dan staf dilokasi penelitian atas kerjasamanya sehingga penelitian dapat berjalan dengan lancar. (2). Masyarakat pelaku usaha lokasi penelitian yang telah banyak membantu terlaksananya penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhumami, A. 2005. Evolusi Pemikiran Pembangunan. <http://bappenas.go.id/id/data-dan-informasi-utama/makalah/artikel-majalah-perencanaan/april-tahun-2005/evolusi-pemikiran-pembangunan-oleh-amich-alhumami/>. Diakses, tanggal 22 Oktober 2016.
- Barnes-Mauthe, M., K. L. Oleson and B. Zafin-drasilivonona. 2013. The total economic value of small-scale fisheries with a characterization

of post-landing trends: An application in Madagascar with global relevance. *Fisheries Research* 147:175-85

- Bene, C. 2006. *Small-Scale Fisheries: Assessing their Contribution to Rural Livelihoods in Developing Countries*. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, Italy.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul. 2014. *Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan*. Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Gunungkidul
- Guyader, O., P. Berthou, C. Koutsikopoulos, F. Alban, S. Demanèche, M.B. Gaspar, R. Eschbaum, E. Fahy, O. Tully, L. Reynal, O. Curtil, K. Frangoudes, and F. Maynou. 2013. *Small Scale Fisheries In Europe: A Comparative Analysis Based On A Selection Of Case Studies*, *Fisheries Research*. 140: 1–13
- Lunn, K. E. and P. Dearden. 2006. Monitoring small-scale marine fisheries: An example from Thailand's Ko Chang archipelago. *Fisheries Research*. 77(1): 60–71
- NCAP. 2004. *Strategies and Options For Increasing And Sustaining Fisheries And Aquaculture Production To Benefit Poor Households In India*. National Centre For Agricultural Economics And Policy Research (NCAP), New Delhi, India, and World Fish Centre, Penang, Malaysia.
- Pranadji, T. dan E. L. Hastuti. 2004. *Transformasi Sosio-Budaya dalam Pembangunan Pedesaan*. AKP 1. 2(1): 77 – 92.
- Satria, A. 2009. *Ekologi Politik Nelayan*. PT. LKIS Printing Cemerlang, Bantul, Yogyakarta
- Susmanto, D. 2012. *Transformasi Pertanian dan Pembangunan Pedesaan*. <http://daryosusmanto.blogspot.co.id/2012/07/transformasi-pertanian-dan-pembangunan.html>. Diakses 22 Oktober 2016.
- Teh, L.S.L., L.C.L. Teh., and U. R. Sumaila. 2011. Quantifying The Overlooked Socio-Economic Contribution Of Small-Scale Fisheries In Sabah, Malaysia: *Fisheries Research* 110(3):450–458
- Todaro, M. P. 2008. *Pembangunan Ekonomi, Edisi ke sembilan* Penerbit Erlangga. Surabaya
- Zeller, D., S. Booth and D. Pauly. 2006. Fisheries contributions to GDP: Underestimating small-scale fisheries in the Pacific. *Marine Resource Economics* 4(4): 355-374.

PRINSIP-PRINSIP PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI WILAYAH PESISIR UTARA JAWA TENGAH

Need For Poverty Reduction In North Coastal Areas In Central Java

Arif Sofianto

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah
Jl. Pemuda 127-133 Semarang, Telp. 024 3515591
*e-mail: areef_sofiant@yahoo.com

Diterima 12 April 2014- Disetujui 25 Mei 2015

ABSTRAK

Masyarakat pesisir merupakan salah satu kelompok termiskin. Kebijakan-kebijakan yang telah dilaksanakan di kawasan pesisir sering mengakibatkan beberapa kondisi berupa kerusakan ekologi, kesenjangan dan kemiskinan nelayan tradisional, serta ketergantungan masyarakat terhadap pemodal. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kebutuhan penanggulangan kemiskinan pada wilayah pesisir sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kecamatan Juwana dan Margoyoso di Kabupaten Pati, serta Kecamatan Ulujami di Kabupaten Pemalang. Informan penelitian ini berjumlah 100 orang terdiri dari unsur pemerintah daerah, lembaga masyarakat, koperasi, nelayan, petambak, pengolah hasil perikanan dan petani. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, FGD dan Observasi. Teknik analisis data menggunakan model yang dikembangkan oleh Spradley, yang merupakan kesatuan proses linear yang dimulai dari analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial dan analisis tema budaya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah model penanggulangan kemiskinan pada masyarakat pesisir utara Jawa Tengah berupa konsep pemberdayaan yang mengutamakan prinsip a). Komitmen pada keyakinan, nilai, adat kebiasaan, kepentingan bersama, b). Menciptakan keterbukaan, kejujuran, solidaritas dan pelibatan masyarakat.

Kata Kunci: kemiskinan, masyarakat pesisir, Jawa Tengah

ABSTRACT

The coastal communities is one of the main groups of the poorest. The policies that have been implemented in coastal areas often result in some circumstances as ecological destruction, poverty gap and traditional fishing, as well as public dependence on financiers. This study aims to understand the need to reduce poverty in coastal areas according to the characteristics and needs of the community. This type of research is qualitative descriptive. The location of research in the Juwana and Margoyoso sub district in Pati Regency, and the Ulujami Subdistrict in Pemalang Regency. The informants of 100 people consisting of representatives from local government, community organizations, cooperatives, fishermen, farmers, fishpond farmers, and fish processors. The technique of collecting data using interviews, focus group discussions and observation. Data were analyzed using a model developed by Spradley, which is the unity of a linear process that starts from domain analysis, taxonomic analysis, componential analysis and analysis of cultural themes. The conclusion of this study is a model of addressing poverty in the north coast of Central Java community a concept that promotes empowerment principle a). Commitment to the beliefs, values, customs, common interests, b). Create transparency, honesty, solidarity and community involvement.

Keywords: poverty, coastal communities, Central Java

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan permasalahan global yang selalu menarik untuk dibicarakan dari berbagai sudut pandang teori, sudut pandang kewilayahan, dan memiliki beberapa varian penanggulangan. Kemiskinan memiliki dimensi yang luas, baik struktural maupun kultural, individu maupun sosial, relatif maupun absolut, maupun dampak lain seperti masalah kewilayahan, sosial dan politik. Setiap individu maupun kelompok memiliki ciri khas tersendiri.

Masyarakat pesisir, terutama nelayan lekat dengan kemiskinan bahkan disebut kelompok miskin diantara yang miskin (Sipahelut, 2010). Menurut Kusumaningrum (2013) dalam studinya tentang kemiskinan masyarakat pesisir di Kabupaten Purworejo, bahwa kemiskinan nelayan terkait dengan masalah kompleks baik secara struktural, kultural maupun natural. Menurut Kusnadi *dalam* Sipahelut (2010) penyebab kemiskinan masyarakat nelayan dapat dikelompokkan menjadi internal dan eksternal. Sebab internal mencakup: (1) keterbatasan kualitas sumber daya manusia (SDM), (2) keterbatasan modal dan teknologi, (3) hubungan kerja kurang menguntungkan, (4) kesulitan diversifikasi usaha, (5) ketergantungan terhadap okupasi melaut, dan (6) gaya hidup boros. Adapun sebab eksternal meliputi: (1) kebijakan yang berorientasi produktivitas dan parsial, (2) sistem pemasaran yang merugikan, (3) kerusakan ekosistem, (4) peralatan tangkap yang tidak ramah lingkungan, (5) penegakan hukum yang lemah, (6) terbatasnya teknologi pengolahan, (7) terbatasnya peluang-peluang kerja non perikanan, (8) kondisi alam dan musim, dan (9) isolasi geografis.

Ketimpangan juga merupakan salah satu permasalahan penyebab kemiskinan. Hal ini, terutama berkaitan dengan keuntungan ekonomi dari pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut baru dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu seperti juragan kapal dan pengusaha perikanan, namun belum oleh masyarakat pesisir dan nelayan. Selain kesenjangan dalam pendapatan, kesenjangan dalam kepemilikan justru menjadi permasalahan yang lebih serius (Syarief, 2001). Akumulasi sumberdaya pada

pihak-pihak tertentu mengarah pada deaksesasi oleh masyarakat. Misalnya saja dalam hal penangkapan, hanya yang memiliki kapal lebih besar dan teknologi yang lebih maju yang dapat menguasai sumberdaya laut. Menurut hasil penelitian Widodo (2011) tentang faktor penyebab kemiskinan masyarakat pesisir di Kwanyar Barat, Kabupaten Bangkalan adalah rendahnya akses terhadap modal terutama modal finansial sehingga menyebabkan nelayan tidak mampu mengakses modal fisik berupa teknologi penangkapan yang lebih modern.

Desa-desa pesisir yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan, petambak, atau pembudidaya perairan, kebudayaan nelayan berpengaruh besar terhadap terbentuknya identitas kebudayaan masyarakat pesisir secara keseluruhan (Ginkel, *dalam* Kusnadi, 2010). Menurut Wahyudin (2003), karaktersistik masyarakat pesisir dapat diidentifikasi berupa tergantung pada lingkungan, tergantung pada musim, tergantung pasar. Masyarakat nelayan/pesisir juga dikenal dengan perilaku: mengeksploitasi terus-menerus tanpa memahami batas-batasnya disertai dengan merusak ekosistem.

Di sisi lain terdapat juga yang mengeksploitasi dengan tindakan konservasi, seperti pelestarian terumbu karang, hutan bakau, dan mengoperasikan jaring yang ramah lingkungan (Kusnadi, 2010). Perilaku merusak dianut oleh sebagian besar nelayan untuk sumberdaya yang sifatnya terbuka, dan perilaku konservasi ditunjukkan oleh komunitas-komunitas adat atau komunitas lokal yang mengelola sumber daya perikanan untuk memperkuat kepentingan ekonomi kolektif (Kusnadi, 2010).

Kerentanan perubahan secara ekologis juga berpengaruh secara signifikan terhadap usaha perekonomian yang ada di wilayah tersebut, karena ketergantungan yang tinggi dari aktivitas ekonomi masyarakat dengan sumberdaya ekologis tersebut. Salahsatu contoh pertambahan jumlah penduduk yang tinggal di kawasan pesisir menyebabkan tekanan terhadap ekosistem *mangrove* yang ada (Auliyani *et al.*, 2014). Ada tarik menarik

antara yang mengeksploitasi alam dan yang memerlukan kelangsungan nafkah dari alam.

Temuan lainnya dari hasil penelitian Manumono (2008) bahwa abrasi tambak dan rob mengalami menyebabkan penurunan pendapatan petani tambak dan nelayan sehingga mereka mengalami perubahan perilaku yang bersifat negatif yaitu apriori, apatis dan mengalami gangguan jiwa. Sebagian petani dan nelayan yang hilang tambaknya beralih menjadi buruh serabutan, nelayan seser ataupun nelayan tangkap (sampan dan jaring), yang sebelumnya juragan berubah menjadi petani penggarap.

Berdasarkan hasil penelitian Primyastanto *et al.* (2010) bahwa faktor timbulnya perusakan lingkungan wilayah pesisir tersebut karena tingkat pendidikan yang rendah dan kurangnya pengetahuan penduduk tentang pentingnya menjaga lingkungan. Masalah yang terjadi di pesisir tersebut salahsatunya adalah kurangnya pemberdayaan masyarakat dan pengguna sumberdaya pesisir dan lautan. LSM dapat memainkan peran kunci dalam pengorganisasian sosial dengan bertindak sebagai fasilitator, katalisator, pelopor kepemimpinan dan pemasok kepemimpinan peralihan (Pieter, 2001). Sedangkan Hiariy (2013) menemukan bahwa strategi meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir adalah dengan pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat (*co-management*). Dalam strategi tersebut, masyarakat memiliki kewenangan cukup dalam pengelolaan dan terakomodasinya kepentingan masyarakat dalam proses pengelolaan. Sebagaimana disampaikan Ticoalu *et al.* (2013) bahwa keberhasilan program karena masyarakat, pemerintah dan pengusaha memiliki kontribusi yang relatif sama terhadap moral, ditinjau dari pemberdayaan masyarakat pesisir.

Faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan suatu program pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir adalah kebijakan pemerintah. Sesuai hasil penelitian Syarieff (2001) bahwa kebijakan pembangunan kelautan selama ini, cenderung mengarah kepada "produktivitas" memaksimalkan *eksploitasi* tanpa ada pengendalian. Kebijakan tersebut

mengakibatkan beberapa kondisi berupa: a). *overfishing*, *perusakan* ekologi laut dan pantai, b). kesenjangan dan kemiskinan nelayan tradisional, c). ketergantungan masyarakat nelayan kecil/tradisional terhadap pemodal besar/modern, antara nelayan dan pedagang, antara *pherphery* terdapat center, antara masyarakat dengan pemerintah. Menurut Tulungen (2001), pendekatan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir yang dapat menjadi rujukan adalah berbasis pemberdayaan masyarakat. Konsep ini telah menjadi pendekatan utama dalam pengelolaan sumberdaya pesisir di Indonesia sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang desentralistik.

Menurut hasil penelitian Fitriansah (2012), keberhasilan pemberdayaan di pesisir berhasil dengan adanya penyadaran kepada masyarakat bahwa program yang mereka jalankan bukan semata-mata program dari pemerintah, tetapi juga menjadi program mereka sendiri. Terdapat tiga aktor yang memainkan perannya dengan sempurna yakni: pemerintah daerah sebagai pembina dan pengarah program, masyarakat lokal sebagai pelaksana utama seluruh kegiatan dan kelompok yang memfasilitasi hubungan kedua aktor secara transparansi dan terbuka.

Selanjutnya hasil penelitian Mardjoeki (2012) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat pesisir perlu adanya kerja sama yang simultan dan lintas sektoral, pendekatan yang paling sesuai dengan kondisi tersebut adalah dengan cara pendekatan partisipatif yaitu suatu pendekatan yang melibatkan kerja sama antara masyarakat setempat dan pemerintah.

Demikian juga dengan Arviyanthi *et al.* (2014) bahwa faktor pendukung pemberdayaan adanya komitmen, lingkungan politik yang stabil, perda yang tidak memberatkan, masyarakat yang ingin berubah, ada kelompok yang peduli lingkungan, keterpaduan dengan visi dan misi dinas. Hasil penelitian Indarti *et al.* (2013) juga menyatakan bahwa penguatan kelembagaan koperasi nelayan sebaiknya diawali dengan mengorganisir nelayan yang mempunyai kepentingan ekonomi dan komitmen yang sama untuk bergabung dalam organisasi koperasi.

Oleh sebab itu, penanggulangan permasalahan kemiskinan di wilayah pesisir tidak mengabaikan aspek pemberdayaan, seperti aspek sosial budaya dan kebutuhan riil masyarakat. Menurut Kusnadi (2010) masyarakat nelayan (pesisir) memiliki ciri-ciri perilaku sosial yang dipengaruhi oleh karakteristik kondisi geografis dan mata pencaharian penduduknya, yaitu: (1) Etos kerja tinggi untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kemakmuran; (2) Kompetitif dan mengandalkan kemampuan diri untuk mencapai keberhasilan; (3) Apresiasi terhadap prestasi seseorang dan menghargai keahlian; (4) Terbuka dan ekspresif, sehingga cenderung "kasar"; (5) Solidaritas sosial yang kuat dalam menghadapi ancaman bersama atau membantu sesama ketika menghadapi musibah; (6). Kemampuan adaptasi dan bertahan hidup yang tinggi; (7) Bergaya hidup "konsumtif"; (8). Demonstratif dalam harta-benda (emas, perabotan rumah, kendaraan, bangunan rumah, dan sebagainya) sebagai manifestasi "keberhasilan hidup"; (9). "Agamis", dengan sentimen keagamaan yang tinggi, dan; (10). "Temperamental", khususnya jika terkait dengan "harga diri".

Provinsi Jawa Tengah memiliki wilayah yang disebut Pantura (Pantai Utara) yang erat dengan permasalahan kemiskinan dan karakter masyarakat sebagaimana dikemukakan di atas. Para sejarawan umumnya mengkategorikan pesisir pulau Jawa dibagi ke dalam dua kategori utama yaitu Pesisiran Barat meliputi Demak, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Wirodesa, Tegal, dan Brebes, serta Pesisiran Timur meliputi Cengkal Sewu, Surabaya, Gresik, Sedayu, Tuban, Lasem, Juwana, Pati, Kudus, dan Jepara (Itha, 2013).

Masyarakat di Kabupaten Pati merupakan stereotip Pantura Jawa Tengah bagian timur dan Kabupaten Pemalang dapat mewakili karakter masyarakat Pantura Jawa Tengah bagian barat yang dapat dianggap sebagai contoh tersebut di atas. Oleh sebab itu, penelitian ini diperlukan dalam rangka mengupas berbagai karakter kemiskinan masyarakat pesisir untuk dalam memahami penanggulangan kemiskinan yang

dibutuhkan dalam di wilayah pesisir utara Jawa Tengah.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Pesisir Pantai Utara Jawa Tengah, khususnya Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Pati. Di Kabupaten Pemalang penelitian difokuskan di Kecamatan Ulujami meliputi Desa Mojo, Pesantren, dan Limbangan. Di Kabupaten Pati difokuskan di Kecamatan Juwana, Desa Bakaran Kulon dan Desa Bajomulyo.

Responden Penelitian

Responden penelitian ini berjumlah 100 orang tersebar di Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Pati. Kemudian diambil sebanyak satu-dua Kecamatan, dan setiap Kecamatan diambil sebanyak dua-tiga desa. Responden terdiri dari masyarakat dari berbagai kelompok profesi dan sosial ekonomi. Di tiap desa yang menjadi unit penelitian, terdiri dari nelayan tangkap sebanyak tiga orang, pembudidaya tambak sebanyak tiga orang, pengolah hasil perikanan/laut sebanyak dua orang, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berbasis perikanan sebanyak dua orang, Perwakilan HNSI sebanyak dua orang, Pengurus KUD sebanyak satu orang, Pengelola TPI sebanyak satu orang, Camat, Kepala Desa, Aparat Bappeda sebanyak satu orang, Aparat Dinas Kelautan sebanyak satu orang, Aparat Bapermades sebanyak satu orang, Aparat Dinas Pariwisata sebanyak satu orang, Tokoh Budaya sebanyak satu orang, Perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) (pemberdayaan nelayan, lingkungan pantai, UMKM) sebanyak satu orang

Jenis dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini data primer dari hasil wawancara dan data lapangan. Sedangkan data sekunder berupa peraturan-peraturan, buku-buku yang berkaitan dengan masyarakat pesisir dari dinas instansi terkait serta hasil-hasil penelitian dari lembaga penelitian maupun perguruan tinggi yang sudah ada tentang masalah dan lokasi penelitian.

Metode Pengumpulan Data

Beberapa metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah:

- Teknik wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan dan wawancara secara mendalam/ *in-depth interview* dengan responden. Sedangkan daftar pertanyaan (angket) yang digunakan secara terbuka.
- *Focussed Group Discussion* (FGD) dilakukan untuk memperdalam penggalian data dari masyarakat.
- Observasi. Teknik ini untuk mengamati hasil program pemberdayaan yang sudah dilakukan, kelembagaan masyarakat serta relasi sosial budaya masyarakat.

Metode Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yang dikembangkan oleh Spradley seperti yang dikutip Iskandar (2008) dan Sugiyono (2009), yang terdiri dari Analisis Domain, Analisis Taksonomi, Analisis Komponensial, dan Analisis Tema Budaya

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat pesisir dikenal lebih keras dalam berusaha, fokus pada pekerjaan yang cepat menghasilkan pendapatan, namun juga lebih mudah membelanjakan pendapatan yang mereka terima. Dalam pemilihan pekerjaan, mayoritas masyarakat pesisir lebih memilih pekerjaan yang cepat menghasilkan uang. Sebagian besar responden menyatakan bahwa dalam memilih jenis pekerjaan pertimbangannya adalah cepat menghasilkan uang.

Di Kabupaten Pati untuk menghasilkan uang langsung menjual hasil tangkapan kepada bakul tidak diolah menjadi hasil olahan yang langsung bisa dikonsumsi. Di Kabupaten Pemalang cepat menghasilkan uang dengan berusaha berdagang masakan/lauk-pauk, mancing kepiting, ngarad, berjualan ikan segar dan sejenisnya. Sebagian mereka berusaha karena ingin cepat menjadi kaya

Pekerjaan sampingan merupakan salah satu upaya masyarakat pesisir untuk mencukupi kebutuhan mereka. Pada saat paceklik, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh masyarakat pesisir, sebagian memilih mencari pekerjaan tambahan, sebagian lainnya berhutang, sebagian berhemat dan sebagian lagi yang pasrah dengan kondisi tersebut. Alternatif paling banyak saat paceklik adalah mencari pekerjaan lain, sementara sebagian lagi berhutang dengan harapan ketika musim panen akan dapat terbayar. Para nelayan mengaku mereka terpaksa memilih pekerjaan sebagai nelayan karena merasa cepat menghasilkan.

Tidak semua masyarakat pesisir mengusahakan pekerjaan sampingan, sebagian mereka tidak memiliki pekerjaan sampingan karena berbagai keterbatasan dan alasan personal. Separuh lebih responden menyatakan masyarakat pesisir memiliki pekerjaan lain selain di sektor utama (tambak, tambak, pengolahan, UMKM). Pekerjaan sampingan menjadi penting ketika musim paceklik. Sementara sebagian lainnya tidak memiliki pekerjaan sampingan karena merasa pekerjaan utama sudah mampu mencukupi kebutuhannya, atau karena tiadanya kesempatan dan kemampuan menciptakan pekerjaan lain.

Dalam sektor pengolahan perikanan, jenis ikan/olahan yang paling banyak dibudidayakan dan diolah adalah ikan bandeng karena modal tidak terlalu besar, mudah diperoleh, dan pasar luas. Meskipun paling banyak diolah di wilayah penelitian, namun jumlah bandeng yang diolah hanya sebagian kecil dibanding jumlah panen mereka, sebagian besar justru diolah diluar kota.

Di pesisir Kabupaten Pemalang, selain nelayan dan bertambak, sebagian masyarakat juga bertani hortikultura baik sayur maupun buah-buahan serta bunga melati. Kendala yang dialami menurut Wasjud (petani di Ulujami) bahwa:

"selama ini kendala petani adalah harga jual produk jauh dari biaya produksi, misalnya harga tomat hanya 200 / kg. Para petani membentuk kelompok, tetapi perlu bimbingan pasar, menyelaraskan

dengan pasar industri. Petani juga kalah teknologi dengan daerah lain (Jatim) sehingga perlu studi banding dan pelatihan"

Pada tingkat penghasilan, masyarakat pesisir cenderung dipengaruhi oleh musim. Pada saat tidak musim, pendapatan mengalami penurunan yang cukup besar, hampir separuhnya (42%). Hal ini menunjukkan ketergantungan besar terhadap musim.

Terkait dengan gaya hidup, masyarakat pesisir dinilai cenderung boros atau "konsumtif". Mereka dianggap sering mempertontonkan keberhasilan ekonomi mereka. Mereka juga lebih mudah membelanjakan uang mereka, terutama saat musim panen. Menurut responden di Kabupaten Pemalang, masyarakat pesisir karena merasa mudah menghasilkan uang, dalam gaya hidup berbusana, pola makan, tidak memikirkan alokasi untuk menabung. Dari uang yang dihasilkan sebagian besar dibelanjakan. Adapun sebagian lagi tidak demikian, pengeluaran agak banyak jika ada pendapatan lebih saja.

Baik di Kabupaten Pati maupun Kabupaten Pemalang, kecenderungan masyarakat pesisir terhadap kegiatan hiburan sangat tinggi. Sebagaimana diungkapkan oleh Pri (nelayan Bajulmulyo, Juwana) bahwa setiap tahun warga desa menyelenggarakan acara sedekah laut yang diiringi dengan hiburan yang paling tidak menghabiskan dana sampai 450 juta rupiah.

Selain kondisi sosial dan ekonomi di atas, ada beberapa kendala dan halangan fisik/ infrastruktur serta lingkungan. Kendala minimnya infrastruktur serta kerusakan lingkungan mewarnai kondisi masyarakat pesisir. Minimnya akses jalan dan jembatan, telekomunikasi, dan energi kerap mewarnai kondisi mereka. Sebagai contoh jalan menuju tambak bandeng di Bakaran Kulon, Juwana masih kurang lancar dan mengganggu rantai dingin penjualan ikan mereka. Isu lingkungan lainnya berupa abrasi di tepi pantai serta pengendapan lumpur di saluran tambak. Isu lainnya terkait keamanan lingkungan serta produk olahan pangan hasil produksi masyarakat pesisir.

Dengan kehidupan yang keras, masyarakat pesisir memiliki semangat kerja tinggi untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kemakmuran. Sebagian besar menyatakan bahwa masyarakat pesisir relatif memiliki semangat kerja yang tinggi. Di Kabupaten Pati, semangat kerja tinggi terlihat dari banyak yang meninggalkan keluarga untuk mencari ikan di laut, bekerja keras walaupun cuaca ekstrem mereka tetap mencari ikan. Bagi petambak penyewa bisa merangkap pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di Kabupaten Pemalang, ada masyarakat yang memiliki semangat tinggi, belajar, kerja keras, kreatif membuat peralatan, pengolahan dan budidaya. Di sisi lain masih adanya masyarakat yang mengharapkan bantuan dari pemerintah, mengharapkan bantuan dari pihak lain.

Sikap mental lainnya adalah kompetitif, mencapai keberhasilan atas kemampuan sendiri. Masyarakat pesisir memiliki etos kerja yang mandiri dan berani mengambil tantangan. Namun ada sebagian yang tidak kompetitif dan lebih memilih kompromi. Di Kabupaten Pati, orang berani berupaya untuk maju, tidak takut gagal, jika berhasil akan menikmati, tetapi bila tidak berhasil sudah merasa biasa hidup susah. Mereka sering tukar pengalaman, bekerja keras, berani berusaha keras. Di sisi lain sebagian merasa hidup nyaman apa adanya, berusaha semampunya untuk menghidupi keluarga. Di Kabupaten Pemalang masyarakat kebanyakan memiliki pekerjaan lebih dari satu macam, yang penting bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Mereka juga merantau ke luar kota untuk mencari penghasilan tambahan.

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat pesisir lebih berani mengambil resiko dalam berusaha. Mereka berani mengambil resiko seperti berhutang, berganti komoditas, dan sebagainya untuk keberhasilan usaha. Di Kabupaten Pati banyak yang mengambil hutang bank untuk menambah permodalan sampai miliaran rupiah, mereka berani berspekulasi dalam usaha. Rata-rata memiliki usaha dengan modal besar seperti kapal dan tambak. Mereka juga berani mencoba suatu hal yang baru yang lebih mendatangkan untung. Di Kabupaten Pemalang berani ambil resiko contoh budidaya

udang vaname dengan modal pinjaman dari bank atau koperasi, tidak mempedulikan berhasil tidaknya usaha. Selama masih ada pihak yang memberikan hutang, tetap berani berhutang untuk usaha. Para nelayan biarpun cuaca kurang mendukung tetap berani melaut.

Dalam berusaha, persaingan antarmasyarakat cenderung lebih rendah, hanya terjadi dalam kasus-kasus tertentu saja, selebihnya bekerjasama. Menuurut penuturan responden baik di Kabupaten pemaalang maupun Kabupaten Pati, persaingan tidak terlalu tinggi. Di Kabupaten Pati persaingan terjadi pada warga yang berlomba-lomba dalam meningkatkan hasil produksi. Selain itu ada yang bersaing dalam harga sewa lahan tambak. Tetapi mereka menyatakan melakukan persaingan dengan sehat. Sebagian menyatakan bahwa tidak terjadi persaingan karena kesenjangan ekonomi tidak menyolok, bahkan para nelayan dalam mencari ikan mereka saling berkomunikasi dengan memakai alat komunikasi SSB (*Single Side Band Modulation*). Di tambak mereka bahkan bersama untuk mencari kebutuhan air tambak. Pada umumnya banyak yang bekerja secara kelompok sehingga lebih membutuhkan kerjasama daripada pesaingnya.

Kemudian Kabupaten Pemalang hampir sama, ada persaingan dalam meningkatkan kesejahteraan, mereka menunjukkan kekayaan dan keberhasilan, melakukan pembelian barang-barang. Masyarakat juga cenderung bersaing dalam meningkatkan produksi pertanian baik petani sawah maupun tambak. Namun mereka menyatakan bersaing secara sehat. Di sisi lain ketika menghadapi kesulitan ada upaya kerjasama.

Masyarakat pesisir cenderung saling bersaing menunjukkan keberhasilan. Ketika panen mereka membelanjakan untuk berbagai barang, kendaraan dan lainnya, sehingga rasa saling menunjukkan keberhasilan (dengan kepemilikan) beriringan dengan rasa saling membantu saat kesulitan. Meskipun demikian, solidaritas masih tetap tinggi, ada bantuan berupa pinjaman dari tetangga, tetapi hanya untuk mereka yang dipercaya. Hanya 36 persen yang menyatakan mendapatkan bantuan dari

tetangga saat paceklik.

Sesuai dengan hasil penelitian di atas, ada beberapa karakteristik yang bisa menjadi potensi dalam penanggulangan kemiskinan yang dilakukan dengan konsep pemberdayaan. Ciri umum masyarakat pesisir adalah komitmen pada nilai adat dan tradisi yang mereka yakini cukup kuat. Mereka rela berkorban demi terjaganya nilai dan adat tersebut. Acara sedekah laut, ruwatan, sedekah bumi mislanya, selalu dilaksanakan setiap tahun. Sumberdaya dana, tenaga waktu yang dibutuhkan cukup besar, namun masyarakat sukarela mendukungnya. Acara sedekah laut yang kemudian diiringi dengan hiburan dananya mencapai ratusan juta rupiah, namun dengan mudah bisa didapatkan melalui iuran warga. Dana didapat dari iuran tiap musim panen baik dalam bentuk ikan maupun uang. Dari peristiwa tersebut nampak bahwa adanya swadaya, kepedulian, sukarela tercipta dari komitmen terhadap nilai dan adat.

Karakter lainnya adalah keterbukaan, kejujuran, solidaritas dan pelibatan masyarakat. Dari beberapa contoh keberhasilan pengelolaan program dana perguliran, sifat-sifat tersebut menjadi pendorongnya. Sebuah program haruslah memuat kejelasan sasaran, prioritas dan pengelolaan. Dengan adanya kredibilitas tersebut maka program akan mendapatkan dukungan dari masyarakat.

Secara spesifik lokasi, berdasarkan tanggapan responden dan hasil pengumpulan data di lapangan, ada beberapa karakter yang menonjol pada masyarakat pesisir. Karakter tersebut meliputi ciri-ciri umum, perilaku ekonomi, serta bagaimana merumuskan strategi pemberdayaan yang tepat.

Ciri umum masyarakat pesisir di Kabupaten Pati dikaitkan dengan sifat dan perilaku sehari-hari, keyakinan serta kondisi sosial ekonomi. Masyarakat pesisir dipandang memiliki sifat jujur, amanah, lugas, memegang teguh prinsip dan komitmen, terbuka, suka bergotong royong, berjiwa sosial, serta ekspresif. Masyarakat pesisir juga dikenal lebih agamis. Di sisi lain, masyarakat pesisir juga dikenal mudah emosi, temperamental, berkarakter keras dan berbicara

tegas. Masyarakat pesisir juga cenderung berpendidikan rendah/kurang memperhatikan pendidikan.

Masyarakat pesisir di wilayah penelitian memiliki semangat kerja tinggi, pekerja keras, ulet, kompetitif, berani ambil resiko, tidak mudah putus asa. Sikap tersebut didukung oleh kejujuran, semangat kerjasama/gotong-royong, serta kemauan berkelompok. Karakter tersebut di atas, merupakan salahsatu penopang keberhasilan mereka dalam bidang perekonomian. Semangat wirausaha juga tinggi sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Di dalam melakukan usaha mereka juga mau berubah memanfaatkan teknologi/ cara baru dalam meningkatkan bidang usahanya. Di dalam manajemen usaha, berani mengambil resiko dalam permodalan, pinjaman perbankan, pinjaman koperasi dan dana perguliran sangat dinamis.

Masyarakat pesisir berani berspekulasi dalam berusaha. Kebanyakan masyarakat pesisir sangat tergantung dari perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Prinsip masyarakat pesisir adalah selama masih ada pihak yang dihutangi, mereka tetap berusaha meski dengan hutang yang banyak. Namun sebagian masyarakat pesisir juga mengalami masalah kurangnya bantuan permodalan.

Selain beberapa karakter yang mendukung perekonomian, beberapa karakter teridentifikasi dapat menghambat perekonomian seperti boros, sulit berubah, dan kurang mempedulikan masa depan. Masyarakat sebagian masih kurang kompetensi usaha serta kapasitas pendidikan yang kurang. Masyarakat pesisir juga dianggap kurang memiliki pengetahuan tentang teknologi, agak sulit menerima perubahan aturan, sulit menerima sesuatu yang baru. Biasanya untuk menerima hal baru, masyarakat pesisir perlu ada pemahaman terlebih dahulu untuk menerima yang baru, terutama contoh nyata keberhasilan. Masyarakat kebanyakan belum menerapkan cara atau teknik usaha yang baik. Masyarakat pesisir juga dikenal keras dan tegas, tetapi kadang menjurus kepada perilaku yang temperamental serta sensitif sehingga menyebabkan potensi konflik tinggi.

Sikap mental lainnya yang kurang mendukung usaha adalah sebagian masyarakat tidak ramah lingkungan. Mereka memanfaatkan sumberdaya alam tanpa memperhatikan kelestarian. Selain itu, upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan agar usaha mereka bisa terus berjalan juga masih kurang. Di Kabupaten Pemalang, ciri utama masyarakat pesisir juga terkait dengan sifat dan perilaku sehari-hari, keyakinan dan kondisi sosial masyarakatnya. Masyarakat pesisir di Kabupaten Pemalang dipandang memiliki solidaritas tinggi. Selain itu, mereka dianggap lebih ramah, masyarakat pesisir dianggap mudah beradaptasi dengan pendatang. Sama dengan kebanyakan masyarakat pesisir lainnya, masyarakat pesisir Kabupaten Pemalang cenderung berperilaku keras, cenderung berbahasa kasar dan arogan, serta emosional. Seperti masyarakat pesisir pada umumnya, relatif lebih agamis dibandingkan masyarakat di daerah lain.

Dari beberapa penjelasan di atas, karakter yang mendukung perekonomian pada masyarakat pesisir adalah cenderung suka bekerja keras, memiliki semangat tinggi. Selain itu, mereka memandang baik persaingan sebagai salahsatu langkah memajukan usaha. Masyarakat pesisir juga memiliki etos untuk menjadi pengusaha atau membuka lapangan kerja. Sedangkan karakter yang dapat menghambat perekonomian antara lain etos kerja menurun jika menghadapi kesulitan, seperti ketika musim badai. Perilaku keseharian masyarakat pesisir cenderung konsumtif, jika mendapatkan uang lebih langsung dibelanjakan dengan segera.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka ada beberapa upaya perubahan atau strategi pemberdayaan masyarakat yang bisa dilaksanakan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di pesisir. Strategi tersebut berupa peningkatan kualitas SDM, pemberian insentif serta akses. Beberapa strategi yang bisa dilakukan adalah:

1. Meningkatkan kapasitas SDM dengan cara memberikan pelatihan, pencerahan dan keahlian sehingga bisa berwirausaha. Mengubah *mindset* dari jiwa pekerja

menjadi pengusaha, meningkatkan kemampuan masyarakat pesisir dengan membudidayakan potensi yang ada.

2. Memberikan penyuluhan teknologi yang tepat dalam bidangnya masing-masing, serta perlu adanya pemberdayaan baik keetrampilan maupun permodalan. Pelatihan-pelatihan terutama pengolahan hasil produksi dari IKM (Industri Kecil dan Menengah), pelatihan-pelatihan budidaya tambak dan sejenisnya yang dibutuhkan masyarakat. Pelatihan tersebut perlu disertai dengan contoh dan praktik langsung.
3. Memberdayakan kelompok masyarakat (tani, nelayan, dll) sebagai sarana kagiatan sosial dan ekonomi, serta hubungan pemerintah dan masyarakat. Selain itu, KUD (Koperasi Unit Desa) juga bisa dimanfaatkan melalui sebagai sarana pemberdayaan. Meningkatkan apresiasi pemerintah terhadap kelompok yang berprestasi supaya kelompok saling bersaing/berlomba dalam prestasi, tidak hanya peminta bantuan yang menumbuhkan ketergantungan. Pembinaan dan sosialisasi peemrintah perlu dilakukan melalui lembaga-lembaga yang ada, seperti musyawarah dusun, kelompok pengajian, PKK (Peningkatan Kesejahteraan Keluarga) dan kegiatan pemuda (karang taruna).
4. Pembukaan akses permodalan, seperti pembentukan dan penguatan koperasi, LKM, dan simpan pinjam. Masyarakat juga perlu dibantu dalam mempermudah akses perbankan.
5. Transfer teknologi baru dalam mengembangkan usahanya
6. Adanya informasi pemasaran yang jelas dari dinas/instansi yang memfasilitasi pemasaran produk.
7. Pemerintah memfasilitasi prasarana yang dibutuhkan pelaku kegiatan usaha (misalnya di tambak; prasarana jalan, jembatan penghubung).
8. Adanya kebersamaan pemerintah desa dengan kelompok kurang untuk mewujudkan pembangunan perekonomian desa. Semua bantuan dari instansi manapun diharapkan masuk ke rekening desa sehingga pemerintah desa ikut bertanggungjawab dalam kemajuan perekonomian

desa. Bantuan bisa dikembangkan kelompok masing-masing dan desa ikut bertanggungjawab dalam kegiatan tersebut

Oleh sebab pencerahan atau internalisasi nilai-nilai pembaharuan pada masyarakat pesisir harus dilakukan upaya pendidikan, pemahaman, penyadaran secara berkelanjutan sehingga mereka benar-benar memahami dan mendukung perubahan. Sebuah program harus mengandung nilai-nilai pembaharuan yang yang harus diinternalisasi melalui proses tersebut. Masyarakat akan sukarela mendukung keberhasilan program jika mereka meyakini nilai-nilainya. Masyarakat harus tahu manfaat dan kegunaan suatu perubahan bagi perbaikan kehidupan mereka.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kesimpulan

Prinsip-prinsip penanggulangan kemiskinan di kawasan pesisir utara Jawa Tengah yang dibutuhkan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu:

1. Berbasis pada kearifan lokal, seperti nilai, adat kebiasaan, tata nilai dan norma yang diyakini kebenarannya. Dalam konteks pemberdayaan, kondisi tersebut dapat ditanamkan melalui pencerahan atau internalisasi nilai-nilai pembaharuan. Kepada masyarakat pesisir harus dilakukan upaya pendidikan, pemahaman, penyadaran secara berkelanjutan sehingga mereka benar-benar memahami dan mendukung perubahan. Sebuah program harus mengandung nilai-nilai pembaharuan yang yang harus diinternalisasi melalui proses tersebut. Masyarakat akan sukarela mendukung keberhasilan program jika mereka meyakini nilai-nilainya. Masyarakat harus tahu manfaat dan kegunaan suatu perubahan bagi perbaikan kehidupan mereka.
2. Bersandar pada nilai sosial keterbukaan, kejujuran, solidaritas dan pelibatan masyarakat. Dari beberapa contoh keberhasilan pengelolaan dana perguliran, sifat-sifat tersebut menjadi pendorongnya. Sebuah program haruslah memuat kejelasan sasaran, prioritas dan pengelolaan.

Dengan adanya kredibilitas tersebut maka program akan mendapatkan dukungan dari masyarakat.

Implikasi Kebijakan

Terdapat beberapa hal yang perlu menjadi catatan penting terkait pelaksanaan program-program pemerintah di wilayah pesisir, baik di Kabupaen Pati maupun di Kabupaten Pemalang sebagai berikut:

1. Kegiatan diharapkan membantu masyarakat pesisir untuk meningkatkan kapasitasnya, baik keterampilan, permodalan maupun pemasaran.
2. Kegiatan diharapkan menghasilkan perubahan dalam kehidupan masyarakat, baik dalam bentuk perubahan cara kerja termasuk pemanfaatan teknologi dan memanfaatkan waktu luang mereka.
3. Program kegiatan yang ada diharapkan memberikan dampak sosial dan ekonomi melalui pemberdayaan potensi lokal.
4. Untuk pasca kegiatan pembinaan seyogyanya terus dilakukan agar terdapat keberlanjutan (*sustainability*).

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak atas keterlibatan dan bantuan baik secara material maupun non material sehingga karya tulis ini dapat diselesaikan dengan baik. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sekretariat redaksi Buletin Marina Sosial EKonomi Kelautan dan Perikanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arviyanthi, E. P., M. Suryaningsih dan T. Yuniningsih. 2014. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Secara Terpadu Di Kota Semarang (Studi Kasus Di Kelurahan Mangunharjo)*. Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. <http://www.fisip.undip.ac.id>
- Auliyani, D., B. Hendrarto dan Kismartini. 2014. *Partisipasi Masyarakat dalam Rehabilitasi Mangrove di Beberapa Desa Pesisir Kabupaten Rembang: Tinjauan Berdasarkan Tahap Perencanaan*. Maspari Journal. Volume 6 Nomor 1 Tahun 2014. Hal. 13-19

- Fitriansah, H. 2012. *Keberlanjutan Pengelolaan Lingkungan Pesisir Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kwala Lama Kabupaten Serdang Bedagai*. Jurnal Pembangunan Wilaah dan Kota. Volume 8 Nomor 4. Desember 2012. Hal. 360-370
- Hiariey, L. S. 2013. *Peran Serta Masyarakat Pemanfaat Pesisir Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Teluk Ambon Dalam*. Jurnal Matematika. Sains. dan Teknologi. Volume 14 Nomor 1. Maret 2013. Hal. 48-61
- Indarti, I. dan D. S. Wardana. 2013. *Metode Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Penguatan Kelembagaan Di Wilayah Pesisir Kota Semarang*. Benefit; Jurnal Manajemen dan Bisnis Volume 17. Nomor 1. Juni 2013. Hal. 75-88
- ltha. 2013. *Budaya Masyarakat Pesisir*. <http://ithakelautan.blogspot.co.id>. Rabu. 22 Mei 2013
- Kusnadi. 2010. *Kebudayaan Masyarakat Nelayan*. Makalah disampaikan dalam kegiatan JELAJAH BUDAYA TAHUN 2010. dengan tema "Ekspresi Budaya Masyarakat Nelayan di Pantai Utara Jawa". yang diselenggarakan oleh Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional. Kementean Kebudayaan dan Pariwisata. di Yogyakarta. tanggal 12-15 Juli 2010
- Kusumaningrum, A. 2013. *Kebijakan Pembangunan Dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Pesisir*. Agriekonomika. Volume 2. Nomor 1. April.2013. Hal 13-26
- Manumono, D. 2008. *Perubahan Perilaku Masyarakat Kawasan Pesisir Akibat Penurunan Pendapatan Sebagai Dampak Abrasi dan Rob di Kabupaten Demak*. Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional "Dinamika Pembangunan Pertanian dan Perdesaan: Tantangan dan Peluang bagi Peningkatan Kesejahteraan Petani". diselenggarakan oleh Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Departemen Pertanian. Bogor. 19 Nopember 2008
- Mardjoeki, H. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pantai Utara Daerah Kabupaten Cirebon*. Jurnal Ekonomi Issn: 2302-7169 Vol. 1 No. 1 September-Desember 2012. Hal. 52-57
- Pieter, T. 2001. *Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Praktek Pengelolaan Pesisir Secara Terpadu*. Prosiding Pelatihan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor. 29 Oktober - 3 November 2001

- Primyastanto, M., R. P. Dewi dan E. Susilo. 2010. *Perilaku Perusakan Lingkungan Masyarakat Pesisir Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Pada Nelayan dan Pedagang Ikan Di Kawasan Pantai Tambak. Desa Tambakrejo. Kecamatan Wonotirto. Kabupaten Blitar Jawa Timur)*. Jurnal Pembangunan dan Alam Lestari Vol. 1 No.1 Tahun 2010
- Sipahelut, M. 2010. *Analisis Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara*. Tesis Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Syarief, E. 2001. *Pembangunan Kelautan Dalam Konteks Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*. Majalah PP\Th 2001\Edisi-25
- Ticoalu, D.E.B.S., E. Reppie dan A. T. R. Telleng. 2013. *Analisis kebijakan pemberdayaan masyarakat perikanan tangkap di Kota Manado*. Jurnal Ilmu dan Teknologi Perikanan Tangkap Volume 1 Nomor 3. Juni 2013. 76-80
- Tulungen, J. J. 2001. *Program Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu Dan Berbasis Masyarakat: Telaah Kasus di Kabupaten Minahasa. Sulawesi Utara*. Prosiding Pelatihan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor. 29 Oktober - 3 November 2001
- Wahyudin, Y. 2003. *Sistem Sosial Ekonomi Dan Budaya Masyarakat Pesisir*. Makalah disampaikan pada pelatihan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, tanggal 5 Desember 2003 di Kampus Pusdiklat Kehutanan.
- Widodo, S. 2011. *Strategi Nafkah Berkelanjutan bagi Rumah Tangga Miskin Di Daerah Pesisir*. Makara. Sosial Humaniora. Vol. 15. No. 1. Juli 2011, Hal. 10-20

PREFERENSI MASYARAKAT TERHADAP JENIS IKAN PENEBARAN DI SEKITAR WADUK KEDUNG OMBO, PROVINSI JAWA TENGAH

Community Preferences Around The Reservoir of Kedung Ombo to Type of Fish Stocking

Aisyah¹ dan *Retno Widiastuti²

¹Pusat Riset Perikanan

Gedung Balitbang KP II, Jl. Pasir Putih II, Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara

²Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Gedung Balitbang KP I Lt. 4, Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara

Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924r 2015

*e-mail: echamichelle@gmail.com

Diterima 12 April 2014- Disetujui 25 Mei 2015

ABSTRAK

Waduk Kedung Ombo terletak di Propinsi Jawa Tengah memiliki daerah genangan air yang meliputi tiga wilayah administrasi yaitu Kabupaten Grobogan, Boyolali dan Sragen. Introduksi ikan patin siam atau *striped catfish* (*Pangasionodon hypophthalmus*, Sauvage, 1878) sejumlah 7470 ekor di Waduk Kedung Ombo dilakukan melalui Iptek Penebaran Berbasis Budidaya (*Culture Based Fisheries*, CBF) pada tahun 2013. Penelitian dilakukan pada tahun 2016 bersamaan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi. Pengumpulan data primer terkait preferensi masyarakat terhadap jenis ikan yang akan dan yang sudah ditebar dilakukan dengan wawancara langsung dengan responden menggunakan kuisioner terhadap empat komunitas masyarakat yang berkaitan langsung dengan waduk, yaitu nelayan tangkap, pengumpul ikan, penjual ikan olahan dan masyarakat yang mengkonsumsi ikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 36% menyukai jenis patin yang ditebar. Dengan analisis terpisah, jenis lain yang diharapkan ditebar antara lain nila sebanyak 57%, sisanya betutu dan karper. Untuk itu, diperlukan beberapa pertimbangan mengenai pemilihan jenis ikan yang akan ditebar. Di samping preferensi masyarakat terhadap jenis ikan tertentu, diperlukan pertimbangan ekologis seperti dampak negatif yang ditimbulkan akibat karakteristik tertentu dari suatu jenis ikan terhadap sumber daya dan habitat di perairan yang akan ditebar.

Kata Kunci: penebaran, jenis ikan tebaran, patin

ABSTRACT

*Kedung Ombo Reservoir is located in Central Java, covered 3 administrative area include Grobogan District, Boyolali and Sragen. 7470 individu of Striped catfish (*Pangasionodon hypophthalmus*, Sauvage, 1878) was introduced through culture based fisheries in 2013. Monitoring and evaluation of those introduced activity has done in 2016 by direct observation. Primary data that was collected from this research are community preferences that come from 4 community structure in Kedung Ombo Reservoir, they are fisherman, Pengumpul, Processed fish sellers, people who eat fish (buyer or tourist). The result show that 36% of Striped catfish introduction. Separated analysis between Striped catfish and others fish, Nile, Marble Goby, Common Carp are the other fish choosen by community for stocking in Kedung Ombo Reservoir.*

Keywords: stocking, stocking fish, striped catfish

PENDAHULUAN

Perikanan di Indonesia berasal dari potensi laut dan perairan daratan. Sumber-sumber perikanan daratan berasal dari beberapa tipe perairan, diantaranya adalah waduk. Waduk merupakan bentukan dari ekosistem perairan mengalir menjadi perairan tergenang karena pembendungan aliran sungai oleh manusia (Ji, 2008).

Pemanfaatan waduk di Indonesia pada umumnya berskala tradisional dengan berbagai bentuk aktivitas di masing-masing bidang seperti bidang pariwisata, bidang perikanan dan bidang yang mencakup air dan tanah waduk itu sendiri (Cowx, 2002). Untuk bidang perikanan, perikanan tangkap merupakan kegiatan usaha perikanan yang cukup dominan di perairan waduk yang memberikan kontribusi sekitar 2-4% dari total produksi perikanan tangkap di wilayah Perairan Daratan (Aisyah dan Triharyuni, 2017).

Berbagai permasalahan perikanan tangkap yang terjadi pada perairan waduk antara lain menurunnya keanekaragaman hayati sumber daya ikan baik jenis ekonomis maupun jenis asli, degradasi lingkungan sebagai akibat samping konstruksi bangunan dan kondisi di sekitarnya serta pemanfaatan berlebih sumber daya ikan dengan cara-cara yang tidak ramah lingkungan. Namun, mengingat bahwa keberadaan perikanan tangkap di perairan waduk memberikan manfaat ekonomi yang tinggi bagi masyarakat di sekitarnya, maka sangat diperlukan pola pengelolaan yang baik agar sumber daya ikan yang ada dapat berkelanjutan, seperti yang dilakukan melalui kegiatan penebaran ikan (*stocking and introduction*) secara tepat.

Kegiatan penebaran merupakan salah satu upaya memulihkan sumberdaya ikan (*fish stock enhancement*) dengan salah satu tujuannya untuk meningkatkan produksi perikanan di suatu perairan yang diantaranya dapat dilakukan melalui kegiatan penebaran ikan (*Food and Agriculture Organization/FAO*, 1999). Langkah-langkah penebaran ikan tersebut meliputi identifikasi sumber daya perairan, membentuk kelembagaan pengelolaan, mengembangkan rencana

penebaran, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi (Kartamihardja *et al.*, 2010).

Upaya pemulihan sumber daya ikan tersebut dalam pelaksanaannya melalui penebaran ikan yang dilakukan dengan menerapkan teknologi perikanan tangkap berbasis budidaya (*Culture Based Fisheries/CBF*). Dalam prakteknya, CBF telah dilakukan sejak 1999 di beberapa perairan waduk di Indonesia dengan beberapa jenis ikan tertentu, salah satunya adalah penebaran patin di Waduk Kedung Ombo.

Untuk itu, penelitian ini bertujuan mengetahui preferensi masyarakat terhadap penebaran ikan di Waduk Kedung Ombo dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi masyarakat tersebut untuk memilih jenis ikan yang sudah dan yang akan ditebar.

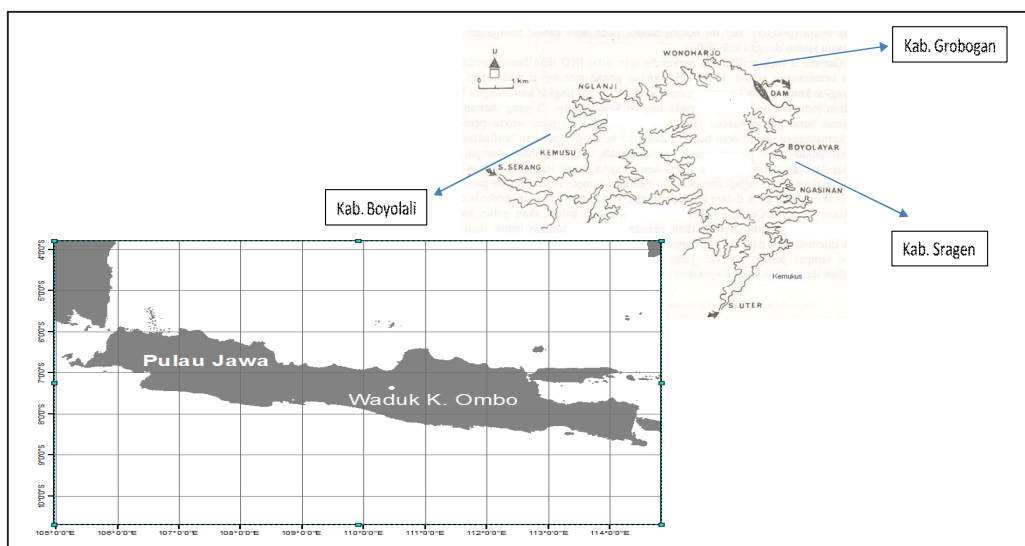
METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Waduk Kedung Ombo Wilayah Sragen pada periode 2016 bersamaan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap hasil penebaran ikan. Fokus dilakukan di sentra perikanan tangkap, yaitu Sari Mulyo-Ngagelsari Sragen) dapat dilihat pada Gambar 1.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer mengenai hasil tangkapan yang diperoleh melalui pengukuran langsung terhadap hasil tangkapan nelayan dari beberapa alat tangkap yang beroperasi di Waduk Kedung Ombo. Data primer lain diperoleh melalui hasil wawancara dan observasi lapang yang diaplikasikan pada 25 responden yang berasal dari empat komunitas masyarakat, yang berkaitan langsung dengan waduk, yaitu: nelayan tangkap, pengumpul ikan, penjual ikan olahan dan masyarakat yang mengkonsumsi ikan. Wawancara terhadap keempat komunitas tersebut dilakukan dengan menggunakan kuesioner terstruktur yang telah dinilai valid dan reliabel.



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

Sumber : Modifikasi dari Sugianti *et al.* (2006)

Validitas dan Realibilitas Instrumen (Kuesioner)

Pengujian validitas digunakan untuk mengukur sah/ *valid* atau tidaknya butir kuisisioner. Kuisisioner dikatakan valid jika butir pertanyaan kuisisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan korelasi *Product Moment Pearson* yang digunakan untuk menentukan suatu besaran yang menyatakan seberapa kuat hubungan suatu peubah dengan peubah lain. Uji validitas dalam penelitian ini terdiri dari uji validitas responden dan uji validitas kuesioner. Teknik korelasi *Product Moment Pearson*.

Uji validitas dilakukan pada 25 responden awal dan hasil pengujian tingkat validitas pada penelitian ini menunjukkan bahwa r hitung lebih besar dari pada r tabel. Di mana r hitung atribut dalam pertanyaan tersebut memiliki nilai korelasi atau r hasil antara 0,626 - 0,916 dan tidak ada yang lebih kecil dari r tabel 0,361. Sehingga pertanyaan-pertanyaan di dalam kuesioner pada penelitian ini dikatakan *valid*. Pengujian validitas diolah dengan menggunakan SPSS versi 16.

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuisisioner yang merupakan indikator dari variabel. Butir pertanyaan dikatakan reliabel atau andal apabila jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten. Pengukuran

reliabilitas dilakukan dengan cara *one shot* atau pengukuran sekali saja. Pengukuran ini mengandalkan butir pertanyaan dengan sekali menyebarkan kuisisioner terhadap responden, kemudian mengukur korelasi antar skor jawaban pada butir pertanyaan yang sama dengan teknik *Cronbach Alpha* (a).

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai alpha sebesar 0,947 untuk 25 responden awal. Di mana nilai alpha tersebut lebih dari 0,631. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertanyaan pada kuesioner tersebut reliabel. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* $> 0,60$ (Hair *et al.*, 2010).

Metode Analisis Data

Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki, yang dalam hal ini mengenai jenis ikan yang disukai oleh masyarakat sekitar Waduk Kedung Ombo. Beberapa analisis yang juga digunakan adalah uji validitas dan reliabilitas.

Analisis deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu sistem pemikiran, atau pun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. persamaannya sebagaimana disajikan berikut:

$$p = \frac{f_i}{\sum f_i} \times 100\% \quad \dots\dots\dots(1)$$

Dimana :

- p = Persentase responden yang memilih kategori tertentu
 f_i = Jumlah responden yang memilih kategori tertentu
 $\sum f_i$ = Total jawaban

Di samping itu, dalam penelitian ini dilakukan pula pengujian faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi masyarakat terhadap jenis ikan yang ditebar. Pengujian ini dilakukan menggunakan metode Analisis Faktor.

Analisis faktor adalah suatu teknik untuk menganalisis tentang saling ketergantungan atau *interpendence* dari beberapa variabel secara simultan dengan tujuan untuk menyederhanakan dari bentuk hubungan antara beberapa variabel yang diteliti menjadi sejumlah faktor yang lebih sedikit daripada variabel yang diteliti, yang berarti dapat juga menggambarkan tentang struktur data dari suatu penelitian (Suliyanto, 2005).

Analisis ini pada prinsipnya digunakan untuk mengelompokkan beberapa variabel yang memiliki kemiripan untuk dijadikan suatu faktor, sehingga dimungkinkan untuk meringkas beberapa atribut yang mempengaruhi suatu komponen variabel menjadi beberapa faktor utama yang jumlahnya lebih sedikit. Model analisa factor yang digunakan dalam kajian ini adalah *Principal Component Analysis* (PCA), yaitu model yang bertujuan mereduksi sejumlah faktor yang dihasilkan melalui bentuk matriks dari suatu PCA:

$$F = \lambda X \quad \dots\dots\dots(2)$$

Dimana :

- F = Faktor PCA (*Unobservable*)
 λ = Bobot dari kombinasi linier
 X = variabel yang diteliti (*Observable*)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Kondisi Umum Lokasi Penelitian

Waduk Kedung Ombo terletak di Propinsi Jawa Tengah, dengan daerah genangan air meliputi tiga wilayah administrasi yaitu

Kabupaten Grobogan (339 ha), Boyolali (3.400 ha) dan Sragen (2.830 ha) (Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Jawa Tengah, 2016). Waduk ini dibangun pada pertemuan Sungai Uter dan Sungai Serang yang terletak di Dukuh Kedungombo, Desa Ngrambat, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan. Kedalaman maksimum berada pada kisaran 35-40 m dan kedalaman minimum pada kisaran 0-5 m (Dharyati *et al.*, 2010). Wilayah perairan yang terdalam terletak di wilayah Sragen, sementara wilayah lain seperti Grobogan dan Boyolali cenderung dangkal (BP3U, 2010).

Karakteristik Perikanan Waduk Kedung Ombo

Perikanan yang berkembang di Waduk Kedung Ombo meliputi perikanan tangkap dan budidaya. Perikanan budidaya berkembang sangat baik melalui sistem keramba jaring apung baik milik masyarakat setempat maupun perusahaan. Terdapat setidaknya 1800 unit Keramba Jaring Apung (KJA) di waduk ini (Umar *et al.*, 2016). Konsentrasi KJA tertinggi berlokasi di wilayah Sragen, walaupun terdapat sebagian kecil yang berlokasi di wilayah Boyolali. Sementara itu, perikanan tangkap berkembang hampir di seluruh wilayah yang menjadi bagian dari Waduk Kedung Ombo. Perkembangan perikanan di wilayah Sragen lebih maju dibandingkan dengan Boyolali dan Grobogan. Desa Wisata merupakan tempat pendaratan ikan yang utama di wilayah Sragen. Di lokasi ini juga merupakan lokasi pariwisata air termasuk di dalamnya wisata bakar ikan yang berasal dari tangkapan nelayan Waduk Kedung Ombo. Jenis ikan yang diolah tersebut pada umumnya nila, patin, mas dan gurame.

Alat tangkap yang berkembang di Waduk Kedung Ombo terdiri dari enam jenis, yaitu jaring (jaring insang dan jaring khusus patin), branjang, pancing, jala, tangkul dan perangkap. Di samping itu berkembang jaring khusus patin, dengan ciri ukuran jaring dan meshsize yang lebih besar (Umar *et al.*, 2016). Jenis ikan yang terdapat di Waduk Kedung Ombo terdiri atas 13 jenis yang berasal dari 7 famili. Beberapa di antaranya merupakan ikan yang dominan tertangkap di perairan waduk, yaitu nila (*Oreochromis*

niloticus), tawes (*Barbodes gonionatus*), mujair (*Oreochromis mossambicus*), betutu (*Oxyeleotris marmorata*) dan red devil (*Amphilopus citrinelus*) (Dharyati *et al.*, 2010). Jumlah jenis pada survei tahun 2016 tidak termasuk ikan budidaya seperti gurame, nila hitam dan merah. Jenis ikan yang dijumpai pada kajian sebelumnya jauh lebih banyak dibandingkan pada tahun 2016, yaitu sebanyak 22 jenis ikan dari sembilan famili. Umar *et al.* (2016) merangkum jenis-jenis ikan yang sudah mulai sulit tertangkap yaitu gabus (*Channa striata*), betutu, karper (*Cyprinus carpio*), tawes, lele (*Clarias batrachus*) dan mujair. Ikan yang sudah langka bahkan hilang yaitu betutu, gabus, keprek abang (*Barbodes balleroides*) dan sepat (*Trichogaster pectoralis*).

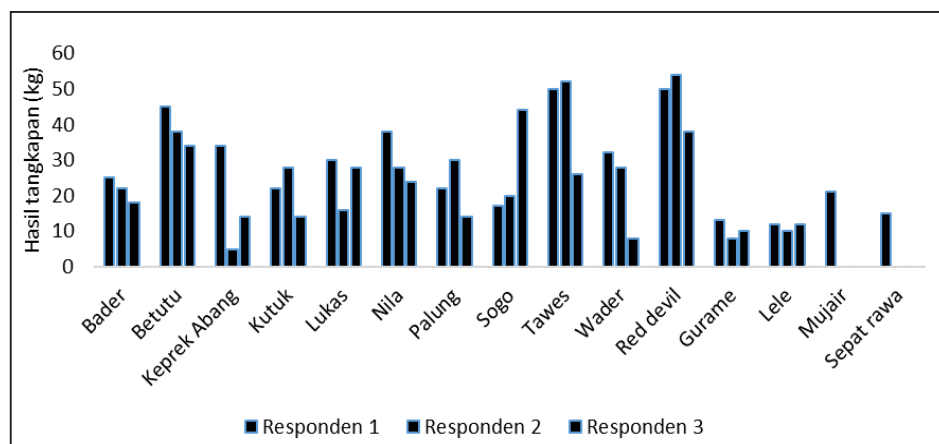
Hasil tangkapan nelayan bergantung pada jenis alat tangkap yang digunakan, jaring patin yang pada umumnya memiliki *mesh size* 7,5 - 9 *inch* digunakan untuk menangkap ikan patin, dimana tangkapan harian berkisar 1.5-46 kg (Gambar 2). Jaring dengan *meshsize* 3-3,5 *inch* menangkap nila, tawes, red devil dan karper, tangkapan harian berkisar 0.5-20 kg. Branjang dengan *meshsize* 1-2,25 *inch* menangkap *red devil* dan anak patin serta nila berukuran kecil, tangkapan harian berkisar 5-41 kg. Branjang 0,5 *inch* digunakan untuk menangkap ikan berukuran kecil dengan tangkapan harian berkisar 3-10 kg (Umar *et al.*, 2016).

Penebaran Ikan

Kegiatan penebaran dan perikanan tangkap berbasis budidaya (*Culture Based*

Fisheries/CBF) merupakan bentuk teknologi pemulihan sumberdaya ikan (Kartamihardja *et al.*, 2010). Sistem CBF atau perikanan tangkap berbasis budidaya, pada prakteknya berlandaskan pada penebaran benih ikan yang dilakukan secara rutin dengan jenis ikan yang ditebar hanya tumbuh dan tidak diharapkan berkembang biak. Sumber ikan atau benih pada penerapan sistem CBF berasal dari *stocking*. Teknologi CBF pada dasarnya diaplikasikan di suatu badan air yang berukuran relatif kecil baik yang sifatnya permanen maupun tidak, dengan tujuan dalam rangka menyediakan tambahan penghasilan bagi masyarakat yang ada di sekitar badan air tersebut (Lorenzen *et al.*, 2001 dalam Ingram dan De Silva, 2015). Secara umum tujuan dari teknologi CBF kiranya sama dengan tujuan penebaran pada umumnya yaitu pemenuhan kebutuhan protein hewani, untuk menciptakan peluang-peluang tambahan seperti wisata dan olahraga terkait perikanan serta dukungan terhadap industri yang berkembang di sekitarnya, mengendalikan kondisi lingkungan kaitannya dengan mitigasi, restorasi habitat dan konservasi.

De Silva (2015) dalam Umar *et al.* (2016) menggambarkan sejarah CBF, dimana teknologi ini pertama kali diperkenalkan oleh Mendis dan Indrasena pada tahun 1965 yang diterapkan di Sri Lanka. Kemudian diuji cobakan lagi oleh Fernando dan Ellepola pada tahun 1969 di Sri Lanka menggunakan ikan mujair (*Oreochromis mossambicus*). Selanjutnya pada tahun 1977, Mendis merekomendasikan penerapan



Gambar 2. Jumlah dan Jenis Ikan Hasil Tangkapan Nelayan Waduk Kedung Ombo

Sumber : Data Primer (2016)

teknologi CBF pada waduk kecil dan perairan yang bersifat tidak menahun (*non perennial*), dan karena kecilnya kemungkinan "kehilangan" (*minimal loss*) benih yang akan ditebar terkait kemudahan dalam mengelola dan mengontrol air.

Penebaran di Waduk Kedung Ombo dilakukan melalui introduksi ikan patin (*Pangasionodon hypophthalmus*). Awal penebaran dilakukan pada tahun 2013 sebanyak 7.470 ekor. Dengan karakternya sebagai jenis ikan omnivore dan berfekunditas tinggi yaitu sebanyak 108.800-630.000 butir (Aida *et al.*, 2013), patin diharapkan tidak berbahaya secara ekologis, di samping tujuan lain dalam menyikapi keterbatasan produksi ikan konsumsi ekonomis (Umar *et al.*, 2016). Secara ekologis, ikan patin memenuhi syarat untuk ditebar karena banyak plankton, banyak *inlet* untuk daerah pemijahan, banyak teluk untuk daerah naungan (karena termasuk ikan *phytophil*, yang menempelkan telurnya di substrat setelah terjadi pembuahan) (Kottelat, 1993; FAO, 2015; Aida *et al.*, 2013).

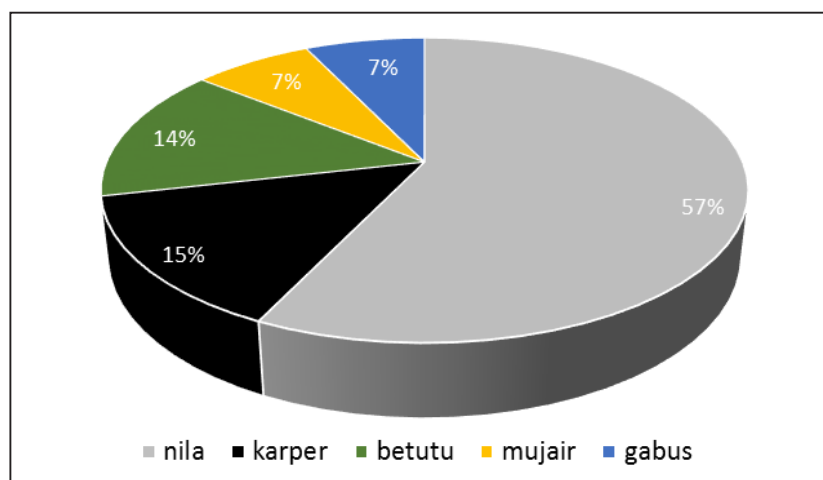
Sebagaimana prinsip CBF, pemilihan jenis ikan yang akan ditebar diharapkan merupakan jenis yang disukai pasar, disukai oleh komunitas di sekitar lokasi penebaran, mampu memanfaatkan pakan alami, mampu tumbuh dengan cepat, mampu berkembang bersama dengan jenis ikan lain yang sudah ada di perairan tersebut (De Silva *et al.*, 2006).

Preferensi Masyarakat

Preference memiliki arti pilihan atau memilih. Preferensi digunakan untuk mengganti kata *preference* dengan arti yang sama atau minat terhadap sesuatu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, preferensi merupakan suatu sifat atau keinginan untuk memilih. Kotler (2000) mendefinisikan preferensi sebagai suatu pilihan suka atau tidak suka oleh seseorang terhadap produk (barang dan jasa). Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa preferensi adalah pilihan-pilihan yang dibuat oleh para konsumen atas produk-produk yang dikonsumsi.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapang dapat diketahui bahwa sebanyak 36% responden menyukai jenis patin sebagai ikan yang ditebar. Responden yang menyukai patin didominasi oleh nelayan tangkap. Kemudian karena ukuran patin yang tertangkap jauh lebih besar atau rata-rata sebanyak 6 kg sehingga lebih bernilai secara ekonomi. Sebaliknya, patin tidak terlalu disukai oleh penjual ikan olahan (ikan bakar) karena memerlukan proses yang lebih panjang dari pada mengolah nila dan karper, seperti pemotongan tubuh patin menjadi beberapa bagian.

Dengan analisis yang terpisah antara preferensi masyarakat terhadap patin dengan jenis ikan lainnya, diketahui bahwa sekitar 57% responden menyukai nila, 7-15% menyukai jenis karper dan betutu (Gambar 3). Responden yang menyukai nila didominasi oleh nelayan tangkap



Gambar 3. Jenis Ikan Tebaran yang Disukai Masyarakat Selain Patin

Sumber : Data Primer (2016)

dan penjual ikan olahan serta masyarakat yang mengkonsumsi ikan di area wisata (Gambar 4). Sementara jenis ikan karper disukai karena dagingnya putih dan tekstur yang lembut (Sulistiyono *et al.*, 2016).

Ikan betutu yang sudah sangat jarang tertangkap disukai responden karena merupakan jenis yang sangat bernilai secara ekonomi. Kelimpahan betutu tinggi pada sekitar tahun 1990-an. Jenis ini dijual kepada pihak di luar kawasan Kedung Ombo untuk memenuhi kebutuhan restoran-restoran kota besar bahkan menjadi komoditi ekspor dengan harga tinggi. Selain cita rasanya yang lezat, daging putih dan empuk, ikan betutu juga dipercaya berkhasiat meningkatkan vitalitas bagi kaum pria dan awet muda bagi wanita (Mulyono, 2001 *dalam* Purnamasari, 2009).

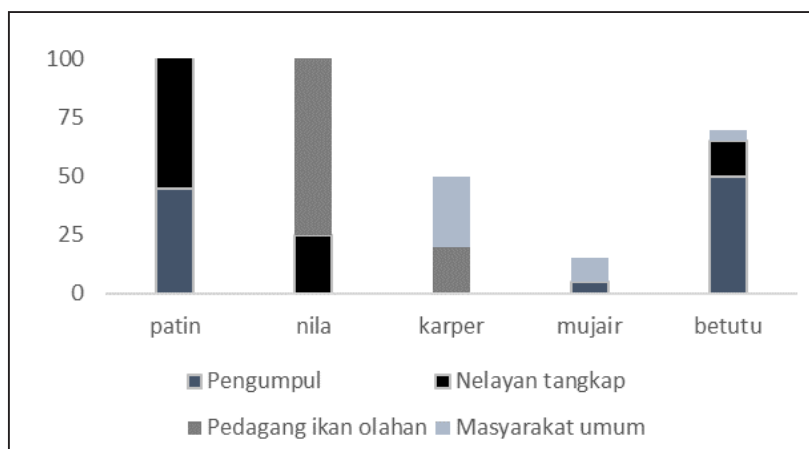
Gambaran preferensi masyarakat terhadap jenis ikan tertentu juga sebagaimana dinyatakan Suryadiyana (2014), seperti Suku Sunda yang biasa mengkonsumsi ikan teri, nila dan sepat. Sementara Suku Bugis sebagian besar memilih nila, kembung dan tongkol, dan ikan laut lainnya. Dominansi kesukaan terhadap jenis ikan laut pada umumnya terjadi pada suatu daerah yang potensi perikanan lautnya lebih tinggi (Aisyah *et al.*, 2017). Sebagaimana yang terjadi pada rencana optimalisasi pemanfaatan embung-embung di Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui penebaran ikan. Jenis ikan yang diharapkan ditebar di embung-embung tersebut

adalah bandeng, karena preferensi masyarakat yang terbiasa mengkonsumsi ikan laut, namun tetap dapat hidup di air tawar, sesuai program kerja yaitu untuk mengoptimalkan embung atau waduk berukuran kecil (Kartamihardja, 2015). Pemilihan jenis bandeng sebagai ikan introduksi di suatu perairan anatara lain dilatarbelakangi oleh pertumbuhan yang relatif cepat, preferensi habitat limnetik yang dipilihnya, sifat reproduksi yang tidak berkembang di perairan tawar (Kartamihardja, 2009 *dalam* Umar *et al.*, 2015).

Ikan mas, nila, patin siam, betutu juga termasuk bawal merupakan jenis ikan introduksi yang mampu tumbuh dan berkembang biak di waduk (Kartamihardja *et al.*, 2011). Jenis betutu meskipun bernilai ekonomis tinggi, tidak direkomendasikan untuk ditebar karena sama hal-nya dengan bawal, keduanya merupakan ikan predator yang dikhawatirkan menjadi kompetitor bagi ikan asli suatu perairan.

Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Preferensi Masyarakat

Variabel yang menjadi dasar dalam analisa faktor diperoleh pada saat proses pengambilan keputusan terkait dengan karakteristik responden terhadap produk dalam hal ini adalah jenis ikan. Proses tersebut terdiri atas pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, pembelian dan kepuasan konsumen. Kemudian dilakukan analisis faktor untuk mengidentifikasi, mengelompokkan,



Gambar 4. Persentase Preferensi Masyarakat Berdasarkan Jenis Ikan

Sumber : Data Primer (2016)

dan meringkas faktor-faktor yang merupakan dimensi suatu variabel, definisi suatu variabel, definisi dan sebuah fenomena tertentu.

Analisis faktor dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi konsumen terhadap atribut-atribut yang dimiliki. Faktor pertama (atribut produk) terdiri atas 3 variabel, yaitu komposisi/ kandungan nutrisi, kualitas produk dan hasil/manfaat produk; faktor kedua sampai dengan keenam terurai dalam matrik hasil analisa faktor dari 6 jenis ikan yang disukai masyarakat untuk ditebar di waduk.

Pada faktor produk tertinggi berasal dari betutu, karena memiliki nilai *Eigenvalue* terbesar yaitu 7,288. Nilai *Eigenvalue* yang besar menunjukkan bahwa pada betutu, faktor pertama adalah faktor yang paling mempengaruhi preferensi masyarakat terhadap jenis ikan ini dari sisi nutrisi, manfaat dan kualitas. Pada atribut produk, patin dan gabus juga memiliki nilai *Eigenvalue* tertinggi, namun masih di bawah betutu.

Faktor fitur produk tertinggi berasal dari karper, karena memiliki nilai *Eigenvalue* terbesar yaitu 7,194. Nilai *Eigenvalue* yang

besar menunjukkan bahwa pada karper. Faktor ini merupakan faktor yang paling mempengaruhi preferensi masyarakat terhadap jenis ikan ini dari sisi variasi rasa dan ketersediaan produk. Pada atribut fitur produk, jenis ikan lainnya menunjukkan nilai *Eigenvalue* yang sangat kecil.

Faktor harga dan kemasan produk tertinggi berasal dari nila, karena memiliki nilai *Eigenvalue* terbesar yaitu 7,258. Nilai *Eigenvalue* yang besar menunjukkan bahwa pada nila. Faktor ini merupakan faktor yang paling mempengaruhi preferensi masyarakat terhadap jenis ikan ini dari sisi harga dan ukuran pada atribut harga dan kemasan produk.

Faktor jaminan produk tertinggi berasal dari mujair, walaupun memiliki nilai *Eigenvalue* yang tidak tinggi namun relatif lebih tinggi dibandingkan dengan jenis lain seperti nila dan patin. Pada faktor ini terlihat bahwa secara kumulatif aspek kenyamanan mengkonsumsi, kepuasan produk dan variabel lainnya tidak terlalu menjadi perhatian bagi masyarakat dalam memilih jenis ikan yang akan ditebar.

Faktor *merk* atau *brand* produk tertinggi berasal dari mujair dengan nilai *Eigenvalue* 4,530, selanjutnya diikuti oleh nila. Pada faktor

Tabel 1. Matrik Hasil Analisa Faktor

Faktor	Variabel Asal	Total Initial Eigenvalue (%)					
		Patin	Betutu	Nila	Karper	Mujair	Gabus
Faktor Pertama (atribut produk)	Komposisi/kandungan nutrisi Kualitas produk Hasil/manfaat produk	6.289	7.288				6.562
Faktor Kedua (fitur produk)	Variasi rasa Fleksibel untuk semua kalangan Ketersediaan produk	0.124			7.194		
Faktor Ketiga (harga dan kemasan produk)	Harga produk yang terjangkau Ukuran			7.258		2.631	
Faktor Keempat (jaminan produk)	Kenyamanan mengkonsumsi Promosi yang diberikan Kualitas tahan lama Kepuasan produk	1.095		1.534		1.774	
Faktor Kelima (Merk)	Daya Tarik merk			1.260		4.530	
Faktor Keenam (kemudahan)	Kemudahan memperoleh produk Kemudahan memperoleh informasi	2.492					

ini juga terlihat bahwa secara kumulatif aspek daya tarik suatu jenis ikan tidak terlalu menjadi perhatian bagi masyarakat dalam memilih jenis ikan yang akan ditebar. Hal ini sedikit kontradiktif dengan kenyataan di lapangan, bahwa masyarakat memilih jenis ikan tertentu sebagai produk yang ditebar di waduk.

Faktor kemudahan tertinggi berasal dari jenis patin dengan nilai *Eigenvalue* yang tidak tinggi yaitu 2,492. jika dilihat berurutan terhadap nilai *Eigenvalue* patin, dapat dikatakan bahwa preferensi masyarakat terhadap jenis ikan ini disebabkan oleh kemudahan dalam memperoleh informasi setelah aspek nutrisi dan manfaatnya. Kemudahan memperoleh produk jika dituangkan ke dalam konteks perikanan merupakan kemudahan menangkap, sedangkan kemudahan memperoleh informasi merupakan bagian dari upaya sosialisasi keberadaan ikan patin hasil penebaran yang sudah dilakukan di beberapa sentra nelayan di Wilayah Kedung Ombo.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kesimpulan

Preferensi masyarakat terhadap penebaran ikan patin relatif disukai terutama oleh nelayan tangkap, sebaliknya dengan penjual ikan olahan. Preferensi terhadap jenis ikan lain seperti nila, karper dan betutu lebih tinggi. Berdasarkan analisa faktor, preferensi terhadap jenis tertentu dilatarbelakangi oleh berbagai alasan seperti kandungan nutrisi, manfaat, kualitas, variasi rasa, ketersediaan sumber daya, harga, ukuran, kemudahan menangkap dan memperoleh informasi. Jenis patin yang sudah lebih dulu ditebar secara atribut produk (komposisi dan kandungan nutrisi, kualitas dan manfaat) tidak lebih dari preferensi masyarakat terhadap jenis betutu dan gabus.

Implikasi Kebijakan

Kebijakan penebaran yang akan dilakukan harus berlandaskan pada kajian mengenai bioekologi perairan. Diperlukan beberapa pertimbangan mengenai pemilihan jenis ikan yang akan ditebar. Di samping preferensi

masyarakat terhadap jenis ikan tertentu, diperlukan pertimbangan ekologis seperti dampak negatif yang ditimbulkan akibat karakteristik tertentu dari suatu jenis ikan terhadap sumber daya dan habitat di perairan yang akan ditebar. Diharapkan melalui kebijakan tersebut salah satu tujuan penebaran untuk peningkatan ekonomi masyarakat setempat dapat tercapai namun tidak berdampak buruk bagi ekologi, lingkungan dan biodiversitas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tulisan ini merupakan bagian dari kegiatan Penerapan Model Iptek Pengelolaan Culture Based Fisheries (CBF) Ikan Patin (*Pangasianodon hypophthalmus*) di Waduk Kedung Ombo, Jawa Tengah, program Inovasi Teknologi Perikanan, sub program Paket Pengelolaan perikanan dan Konservasi SDI dalam DIPA Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan tahun 2016.

DAFTAR PUSTAKA

- Aida, S. N., A. D. Utomo, T. Hidayah, G. Subroto, B. Waro, Rr. D. Mentari dan Juadi. 2013. Percobaan penebaran ikan patin untuk perikanan berbasis budidaya di Waduk Kedung Ombo Jawa Tengah. *Laporan akhir* kegiatan. Balai Penelitian Perikanan Perairan Umum, Palembang. P 125
- Aida, S. N., A.D. Utomo, T. Hidayah, R. D. Mentari, Sunarti, A. Sentosa, Purwanto, G. Subroto, B. Waroh, Sutardi dan Juadi. 2014. Percobaan penebaran ikan patin (*Pangasianodon hypophthalmus*) di Waduk Kedung Ombo, Jawa Tengah. *Laporan akhir* kegiatan. Balai Penelitian Perikanan Perairan Umum, Palembang. P72 Aida *et al.*, 2013
- Aisyah dan S. Triharyuni. 2017. Pola musim dan hasil tangkapan di waduk. Bagian dari bunga rampai Paparan Sunda. *In preparation*. P 14
- Aisyah, E. Prianto dan E.S. Kartamihardja. 2017. Pemetaan konsentrasi jenis perikanan tangkap di Indonesia. *In preparation*.
- Cowx, I. 2002. *Principles and approaches to the management of lake and reservoir fisheries*. In I. G. Cowx, Management and ecology of lake and reservoir fisheries (pp. 376-393). UK: Fishing New Books.
- De Silva, S. S., U. S. Amarasinghe and T. T. T. Nguyen (eds). 2006. Better-practice approaches for culture-based fisheries development in Asia.

ACIAR Monograph No. 120, 96p.

- Dharyati, E., A. D. Utomo, S. Adjie, Asyari, dan D. Wijaya. 2010. Bio-ekologi dan potensi sumberdaya perikanan di Waduk Kedung Ombo dan Gajah Mungkur Jawa Tengah. *Laporan akhir* kegiatan. Balai Riset Perikanan Perairan Umum. Palembang. P 75
- Food and Agriculture Organization [FAO] of the United Nations. 1999. *Irrigation in Asia in Figures*. FAO, Rome, 36 pp
- Food and Agriculture Organization [FAO]. 2015. *Pangasius hypophthalmus*. Diunduh dalam bentuk artikel pada http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/Pangasius_hypophthalmus/en, Juli 2015
- Hair, J. F., W. C. Black, B. J. Babin and R. E. Anderson. 2010. *Multivariate Data Analysis*, 7th edition. NJ : Pearson Prentice Hall.
- Ingram, B. A. and S. De Silva. 2015. General aspect of stock enhancement in fisheries developments. Paper diunduh dalam bentuk pdf. P11.
- Ji, Z.G. 2008. *Hydrodynamics and water quality : modeling rivers, lakes, and estuaries*. Canada: John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey
- Kartamihardja, E. S., K. Purnomo, S. Koeshendrajana dan C. Umar. 2011. Karakteristik limnologis, perkembangan populasi ikan patin siam (*Pangasionodon hypophthalmus*) introduksi dan perikanan di Waduk Wonogiri, Jawa Tengah. *J. Kebijak. Perikan. Ind.* Vol.3 No.1 Mei 2011: 37-50
- Kartamihardja, E., K. Purnomo, D. W. H. Tjahjo, C. Umar, M. T. D. Sunarno dan S. Koeshendrajana. 2010. *Petunjuk Teknis Pemulihan Sumber Daya Ikan Di Perairan Umum Daratan Indonesia*. Pusat Penelitian Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Ikan. P72
- Kartamihardja, E.S. 2015. Optimalisasi Pemanfaatan Embung-Embung di NTT. *Personal Communication*
- Kotler, P. 2000. Manajemen Pemasaran (Terjemahan). Edisi Milenium. PT Indeks. Jakarta.
- Kottelat, M. W. A. 1993. *Freshwater fishes of Western Indonesia and Sulawesi*. Jakarta: Periplus Editions.
- Purnamasari, E. 2009. Prospek Usaha Budidaya Ikan Betutu (*Oxyeleotris marmorata Blkr*) dalam Keramba di Kecamatan Muara Bengkal. EPP Vol. 6 (2): 34-40.
- Sulistiyono, F. C., Rusliadi and I. Putra. 2017. *Growth and survival rate of common carp (Cyprinus carpio L) with different biofilter combination in recirculation aquaponic system*. Artikel diunduh dalam bentuk pdf pada <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=276117>, 12 Januari 2017
- Suliyanto. 2005. Analisis Data dalam Aplikasi Pemasaran. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Suryadiyana, E. 2014. Kontribusi Konsumsi Ikan Terhadap Tingkat Kecukupan Protein pada Suku Sunda dan Bugis di Sekitar Waduk Cirata, Kabupaten Cianjur. *Skripsi* pada Fakultas Ekologi Manusia-Institut Pertanian Bogor. P 39
- Umar, C., E. S. Kartamihardja, Husnah, Aisyah dan K. Kasim. 2016. Pematangan teknologi CBF Ikan Bandeng dan pengendalian ikan asing invasif di Waduk Sempor, Jawa Tengah. *Laporan akhir* kegiatan pada Pusat Riset Perikanan. P 37
- Umar, S., E. S. Kartamihardja, Husnah, Aisyah dan K. Kasim. 2015. Pematangan Teknologi CBF Ikan Bandeng dan Pengendalian Ikan Asing Invasif di Waduk Sempor, Jawa Tengah. *Laporan Akhir* Kegiatan pada Pusat Riset Perikanan. P48

Buletin Ilmiah “MARINA”

Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Pedoman Bagi Penulis

NASKAH

Redaksi hanya menerima naskah yang belum pernah dipublikasikan dan tidak dalam proses penerbitan pada publikasi lain. Misi publikasi ini adalah membahas isu aktual kebijakan kelautan dan perikanan dalam bentuk gagasan, dialog maupun polemik. Sesuai dengan misi tersebut, maka naskah harus mengandung pembahasan tentang isu analisis kebijakan kelautan dan perikanan yang aktual.

BENTUK NASKAH

Susunan naskah relatif bebas, namun harus memuat permasalahan, pendekatan yang digunakan dalam analisis masalah, pemecahan isu kebijakan dan penutup, Naskah diketik dengan menggunakan huruf Calibri, 12pt dan 1,5 spasi.

PENUTUP

Menyajikan sinopsis naskah dengan menampilkan opsi kebijakan untuk memecahkan masalah tematik atau isu kebijakan yang ada. Kebijakan yang ditawarkan perlu dikomplementasikan dengan kebijakan pendukung lintas sektoral dan koordinasi institusi terkait dalam implementasinya.

PENYERAHAN NASKAH

Naskah diserahkan ke Redaksi Pelaksana.

BAHASA

Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia.

JUDUL NASKAH

Judul naskah dalam bahasa Indonesia dan Inggris.

ABSTRAK

Setiap naskah dilengkapi abstrak yang terdiri dari dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan Inggris terdiri dari 250 kata.

KATA KUNCI

Pemilihan kata kunci mengacu pada description yang tercantum dalam AGROVOC. Apabila istilah yang dipilih tidak terdapat dalam AGROVOC, maka thesaurus lain atau kamus istilah dapat dipakai sebagai rujukan.

TABEL

Tabel data mencantumkan teks isi, tahun dan sumber data (dalam bahasa Indonesia dan Inggris).

GAMBAR DAN GRAFIK

Gambar dan grafik harus dicetak tebal sehingga memungkinkan diperkecil antara 50 sampai 60% dari teks asli. Judul gambar dan grafik diletakan di bawah tanpa mempengaruhi bagian gambar dan grafik (dalam bahasa Indonesia dan Inggris).

SATUAN PENGUKURAN

Satuan pengukuran dalam teks, grafik dan gambar memakai sistem metrik, misalnya cm, ton, ha.

REFERENSI

Referensi ditulis dalam bentuk catatan kaki atau pada halaman daftar pustaka yang disusun dengan urutan nama pengarang, tahun terbit, judul tulisan, nama majalah dan penerbit.

Buletin Ilmiah “MARINA”

Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Pedoman Bagi Penulis

NASKAH

Redaksi hanya menerima naskah yang belum pernah dipublikasikan dan tidak dalam proses penerbitan pada publikasi lain. Misi publikasi ini adalah membahas isu aktual kebijakan kelautan dan perikanan dalam bentuk gagasan, dialog maupun polemik. Sesuai dengan misi tersebut, maka naskah harus mengandung pembahasan tentang isu analisis kebijakan kelautan dan perikanan yang aktual.

BENTUK NASKAH

Susunan naskah relatif bebas, namun harus memuat permasalahan, pendekatan yang digunakan dalam analisis masalah, pemecahan isu kebijakan dan penutup, Naskah diketik dengan menggunakan huruf Calibri, 12pt dan 1,5 spasi.

PENUTUP

Menyajikan sinopsis naskah dengan menampilkan opsi kebijakan untuk memecahkan masalah tematik atau isu kebijakan yang ada. Kebijakan yang ditawarkan perlu dikomplementasikan dengan kebijakan pendukung lintas sektoral dan koordinasi institusi terkait dalam implementasinya.

PENYERAHAN NASKAH

Naskah diserahkan ke Redaksi Pelaksana.

BAHASA

Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia.

JUDUL NASKAH

Judul naskah dalam bahasa Indonesia dan Inggris.

ABSTRAK

Setiap naskah dilengkapi abstrak yang terdiri dari dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan Inggris terdiri dari 250 kata.

KATA KUNCI

Pemilihan kata kunci mengacu pada description yang tercantum dalam AGROVOC. Apabila istilah yang dipilih tidak terdapat dalam AGROVOC, maka thesaurus lain atau kamus istilah dapat dipakai sebagai rujukan.

TABEL

Tabel data mencantumkan teks isi, tahun dan sumber data (dalam bahasa Indonesia dan Inggris).

GAMBAR DAN GRAFIK

Gambar dan grafik harus dicetak tebal sehingga memungkinkan diperkecil antara 50 sampai 60% dari teks asli. Judul gambar dan grafik diletakan di bawah tanpa mempengaruhi bagian gambar dan grafik (dalam bahasa Indonesia dan Inggris).

SATUAN PENGUKURAN

Satuan pengukuran dalam teks, grafik dan gambar memakai sistem metrik, misalnya cm, ton, ha.

REFERENSI

Referensi ditulis dalam bentuk catatan kaki atau pada halaman daftar pustaka yang disusun dengan urutan nama pengarang, tahun terbit, judul tulisan, nama majalah dan penerbit.



PUSAT PENELITIAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN

GEDUNG BALITBANG KP Lt. 3-4

JALAN PASIR PUTIH NOMOR 1 ANCOL TIMUR, JAKARTA UTARA

TELP .: (021) 6471 1583 FAX.: 64700924

SAFAN: <http://bbpse.litbang.kkp.go.id>-E-MAIL: bbrsosek@yahoo.com

